BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2018

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH No.
KUALA TUNGKAL
Telp: (0742) 323587
Faks: (0742) 323587
e-mail : kesbangpoltanjabbarat@yahoo.com

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL.Prof.DR.Sri Soedewi Mascon Sofwan, SH. No. Telp. (0742) 323587
KUALA TUNGKAL 36512
e-mail : kesbangpoltanjabbarat@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : /BKBP / III/Tahun 2018

TENTANG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

c. bahwa untuk tujuan dimaksud hurup a dan b diatas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangs adan Pollitik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan KabupatenTanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025;(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11)

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014):

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daeah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

KEDUA: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA: Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : Maret 2018.

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. R. AZIS MUSLIM. M.A.P
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19680530 198810 1 001

1. Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
5. Kepala Badan/Dinas/ Badan/Instansi dan Bagian di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
6. Para Camat se – Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
7. Arsip.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Aallah SWT. Tuhan Yang Maha Es atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerj Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjun Jabung Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 201 merupakan laporan capaian kinerja setelah berlakunya Perda Nomor 10 TAhu 2014, dimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Ini menjadi salah satu pertanggungjawaban Pemerintah kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Masyarakat, dan pihak - pihak terkait atas kinerja kami selama tahun 2018.

Dari dokumen ini dapat kiranya dinilai seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai serta kegagalan kegaglan yang terjadi, termasuk hambatan - hambatan pencapainnya. Dengan demikian ada satu pijakan evaluasi peningkatan kinerja d waktu yang akan datang.

Penyususnan LAKIP ini berpijak pada Rencana Stategik (RENSTRA) 2016-1021 Perubahan yang telah dibuat dan memuat kebijakan, program maupun kegiatan yang mengacu pada RENSTRA. Namun demikian terdapat penyesuaian kebijakan untuk mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang dipandang strategis.

Harapan kami mudah- mudahan dokumen ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja kami selama pada tahun 2018. Saran, pendapat dan kritikan senantiasa kami nantikan untuk dijadikan suatu motivasi dalam perbaikan dokumen ini.

Atats perhatian Bapak serta pihak-pihak yang berkompeten di ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kuala Tungkal, 2019

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. R. AZIS MUSLIM, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19680530 198810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
SK PENETAPAN LAKIP 2018	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kewenangan Badan Kesatuan Bang dan Politik	5
- Kepala Badan	6
- Sekretaris	7
- Bidang-Bidang	9
- Struktur Organisasi	24
BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA	27
A. Rencana Strategis	27
1. Visi	27
2. Misi	28
3. Tujuan dan Sasaran	29
4. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran	33
B. Penetapan Kinerja	36
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Pengukuran Kinerja	40
B. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas	45
C. Aspek Keuangan	49
1. Belanja Tidak Langsung	50
2. Belanja Langsung	50
BAB IV P E N U T U P	57
A. Kesimpulan	58
B. Saran – Saran	58
Lampiran – Lampiran	
Lampiran 1 : Perencanaan Strategis (Form RS)	
Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT)	
Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form PKK)	
Lampiran 4 : Penilaian Kinerja Sasaran (Form PKS)	
Lampiran 5 : IKU	
Lampiran 6 : Rencana Aksi Tahun 2018	

DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi 24
2. Tabel 1 Sumber Daya Manusia.....25
3. Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Tahun 2016.....31
4. Tabel 3 Cara mencapai Tujuan dan Sasaran.....34
5. Tabel 4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja.....35
6. Tabel 5 Pagu Belanja Tidak Langsung sebelum dan sesudah APBD-P.....68
7. Tabel 6 Pagu Belanja Langsung sebelum dan sesudah APBD-P.....69
8. Tabel 7 Realisasi Belanja Tidak Langsung setelah APBD-P..... 71
9. TAbel 8 Realisasi Belanja Langsung setelah APBD-P..... 72
10. Grafik 1 Pagu APBD Murni
11. Grafik Pagu APBD Perubahan..... ..74
12. Grafik 3 Porsi Anggaran Sekretariat..... 75
13. Grafik 4 Porsi Anggaran Kegiatan Bidang bidang..... 75

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung sebesar Rp. 1.009.150.000,dari 937.775.000 terdapat perubahan kenaikan sebesar 71.375.000 atau 7,61% ,Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.283.173.563 dari 1.076.262.046 ,- bertambah menjaadi Rp. 206.911.517 atau sebesar 19,23 %.

Reliasasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.803.091.696 ,- atau 96,10% dari total alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 4.998.225.663. dengan sisa anggaran sebesar Rp.195.133.967. adapun rincian Realisasi belanja Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut:

Belanja Tidak Lngsung

Realisasi Belanja Tidak Lngsung sebesar Rp. 2.434.303.089 dari anggaran tersedia sebesar Rp. 2.510.787.100 atau sebesar 96,95% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 76.484.011.

Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 2.368.788.607 dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 2.487.438.563 atau sebesar 95,23% dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 118.649.956,

Alokasi Anggaran yang tersedia membiayai 8 Program dan 35 Kegiatan

Program yang dimaksud adalah:

1. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Didiplin Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Hasil Capaian Kegiatan :

1. Deteksi Dini Penanganan Konflik kurang dari 24 Jam pada tahun 2017 sebesar 50 %, dan pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100 %
2. Indek[illegible]

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/1998 dan Undang–undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak–banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional, serta Pokir DPRD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Undang–undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Sistem AKIP merupakan system manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes Orientid).

Sistem AKIP diimplementasikan oleh masing – masing instansi pemerintah dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta

mengukur / mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkan kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja pada dasrnya adalah mengubah mind – set para birokrat dari system yang birikratis kea rah system yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrat pemerintah. Dalam bahasa lain, transpormasi sector pemerintah yang mengubah focus akuntabilitas dari orientasi pada masukan – masukan (inputs oriented accountability), dan proses kearah akuntabillitas pada hasil (result oriented accountability), terutama berupa outcomes.

Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan cara melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di instasi masing – masing dengan
ukuran – ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menekankan pada hasil kegiatan dan untuk itu perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan maupun keggalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

B. Dasar Hukum

LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 disusun bedasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil adalah Pancasila
2. Landasan Konstitusional adalah UUD 1945
3. Landasan Oprasional adalah :
    a. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
    b. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan KabupatenTanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
    c. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851);

d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
e. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355)
f. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
g. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
h. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
j. Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

n. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025
o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jambung Barat Nomor 2 Tahun 2016);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 No.76)
s. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 No.17)
t. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daeah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
u. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 No. 37)

C. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan pengelolaan kewenangan / urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah

tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana berikut ini :

1. **KEPALA BADAN:**

   Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa,Kewaspadaan Nasional, dan Politik,Ketahanan seni budaya Sosial kemasyarakatan agama dan ekonomi,merumuskan serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan kebijakan operasional dan kebijakan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa,Kewaspadaan Nasional dan politik, ketahanan seni budaya,sosial kemasyarakatan agama dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas maka ditetapkan fungsi selaku kepala Badan sebagai berikut:

   a. Menyiapkan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja badan;
   b. Melaksanakan semua program dan kegiatan badan sesuai lingkup tugas;
   c. Merumuskan kebijakandan petunjukteknis lingkup tugas;
   d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaa kegiatan badan; dan
   e. Meaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi denganinstansi terkait dalam pelaksanaannya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan di Bidang Kesekretariatan sebagai berikut :

a. Membantu memyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja badan.
b. Menyusun Statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan Tugas.
c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan urusan Administrasi Keuangan.
e. Melaksanakan urusan Rumah Tangga, Administrasi, Tata Usaha dan Kearsipan.
f. Mengoordinasikan Pelaksanaan dan kegiatan bidang – bidang di lingkup Badan.
g. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Badan membawahi tiga Subbagian yaitu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan ;
c. Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

   Sub bagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup umum dan kepegawaian sebagai berikut :

   a. Menyusun bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
   b. Mengelola admnistrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah badan, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan

kerumah tanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.

c. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
d. Melaporkan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian, dan
e. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaannya.

2. Sub bagian Keuangan:

Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup keuangan.

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja lingkup keuangan.
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran.
c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan pengendalian keuangan, dan menyusun laporan keuangan badan.
d. Menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, dan
e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

3. Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian sekretaris lingkup perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dari bidang – bidang badan.
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program badan.
c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional badan.
d. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan penilaian pengukuran kinerja Badan.
e. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan.
f. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Pembangunan Daerah (LAPEM) badan.
g. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan, dan
h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

3. BIDANG BIDANG:

3.1 . KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala badan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.

a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesabangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosiail, pengawsan orang asing dan lembaga
a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesabangpol ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela

negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan

b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umu nasional) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik soasil, pengawsan orang asing dan lembaga
c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umu nasional) ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
d. Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan penylenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi) kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik soasil, pengawsan orang asing dan lembaga
e. Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan penylenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
f. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik soasil, pengawsan orang asing dan lembaga;
g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela

negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

h. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang kewaspadaan nasional, ideologi dan wawasan kebangsaan;
i. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan naskah dinas dibidang tugasnya;
j. Mengumpulkan dan mengelola data di Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
k. Fasiltasi dan Peningkatan Kapasitas aparatur di Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
l. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
m. Melakukan pembinaan Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja,

penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.;

n. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
o. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
p. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional membawahi dua Kasi yaitu :

a. Sub bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan
b. Sub bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

a. Sub Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian Kepala Bidang lingkup Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai berikut :
    1. Fasiltasi dan Peningkatan Kapasitas aparatur di Bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

2. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
3. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelengaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
4. Pengawasan penyelenggaran pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
5. Menyiapkan dan mengelola data di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
6. Menyusun rencana kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan laporan kegiatan Sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
8. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai berikut :

1. Fasiltasi dan Peningkatan Kapasitas aparatur di Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik

pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga,

2. Pelaksanaan dan fasilitasi di bidang Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga,
3. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelengaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga,
4. Pengawasan penyelenggaran pemerintahan di bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga,
5. Menyiapkan dan mengelola data kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
6. Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dalam penyusunan laporan kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

3.2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN POLITIK

Kepala Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala Badan dibidang Pembinaan Politik, pendidikan politik, budaya politik dan Fasilitasi pemilu dengan rincian fungsi sebagai berikut :

a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Politik, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparataur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan;

g. Melaksanakan kegiatan pembinaan politik dan kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibidang pemeliharaan stabilitas politik dan pengembangan demokrasi;
h. Melakukan stabilitas hubungan antara lembaga dengan DPRD;
i. Mengkoordinasikan pemilihan umum Pilpres dan Pilkada;
j. Melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan pembinaan di bidang pemilu serta penyusunan laporan kegiatan di sub bidang pembinaan politik;
k. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang;
l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan
m. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

Kepala Bidang Pembinaan Politik membawahi dua Seksi yaitu :

a. Sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik
b. Sub bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu

Masing – masing Subu Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Politik.

a. Sub Bidang Bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang Pembinaan Politik sebagai berikut :
    1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
    2. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik.

3. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Politik, sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
5. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparataur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan;
6. Menyusun rencana dan program kerja lingkup implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik.
7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

b. Sub Bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
2. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
3. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan

evaluasi) dibidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;

4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
5. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparataur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
6. Menyusun rencana dan program kerja lingkup subbidang Kelembagaan dan fasilitasi pemilu.
7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

3.3. KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala badan dibidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi :

a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan kulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organsiasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahananan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organsiasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
e. Koordinasi penetapan kebijjakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
f. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksaan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan ,infestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi , kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
g. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian ,pemantauan,pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi ,kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .

h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam ,ketahanan perdagangan ,Investasi,fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
i. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam perdagangan,lembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Bidang Ketahanan Seni Budaya,Agama,Kemasyarakatan, dan Ekonomi membawahi dua Seksi yaitu:

a.Sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya

b.Sub bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi

Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi :
   1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
   2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan

evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.

3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
4. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahananan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
5. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang Ketahanan seni budaya.
6. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

b. Sub Bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi:

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan agama dan kepercayaan, organsiasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .

4. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahananan agama dan kepercayaan, organsiasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
5. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam , ketahanan perdagangan , investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat , kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi , kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
6. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksaan dan ketahanan sumber daya alam , ketahanan perdagangan, infestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat ,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
7. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam ,ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
8. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, Investasi, fiskal dan moneter,perilaku masyarakat,kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian
9. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,

perdagangan, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

10. penyusunan laporan kegiatan di sub bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan ekonomi.
11. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

STRUKTR ORGANISASI
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
(PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013)

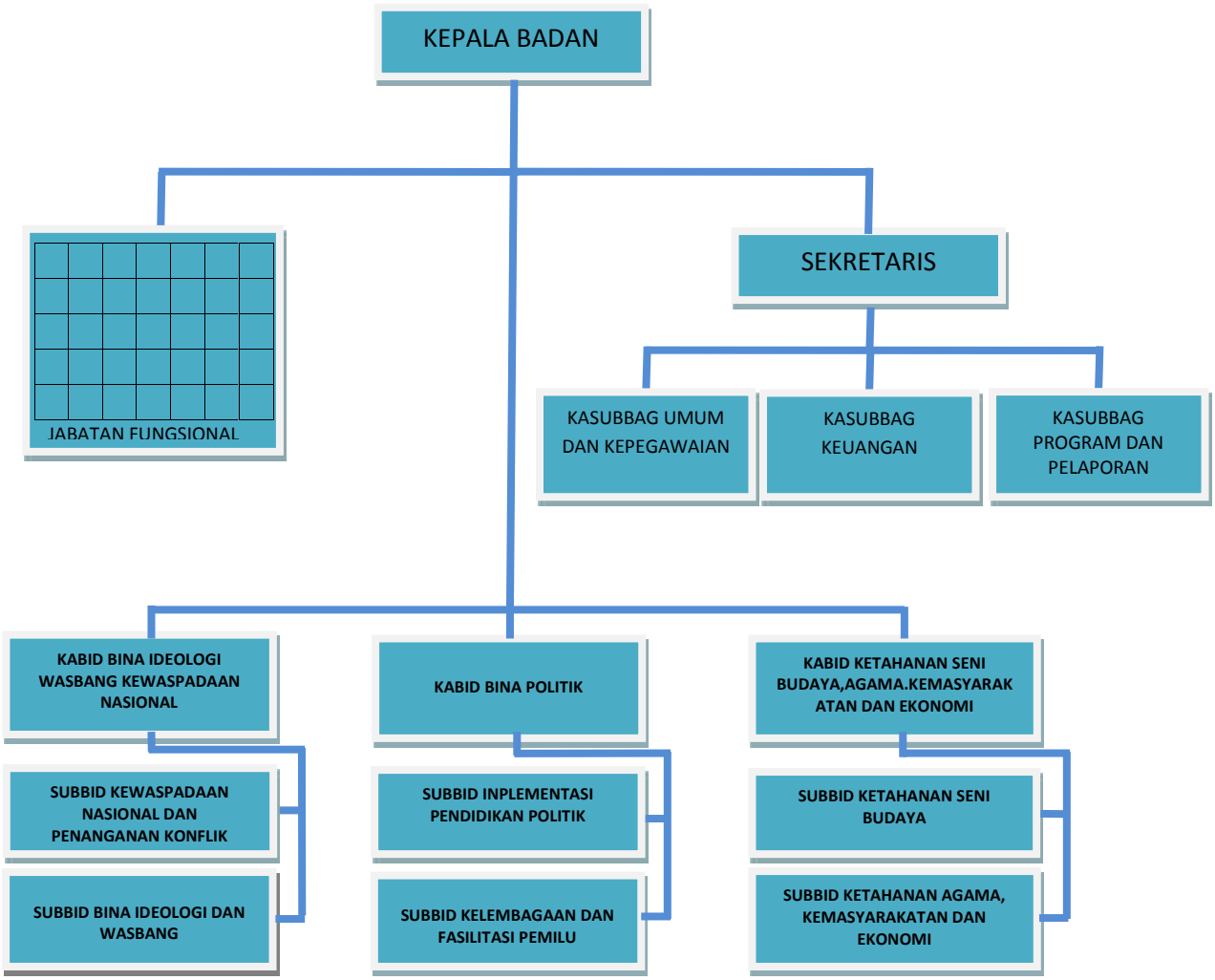

Tabel . 1
Sumber Daya Manusia
Jumlah PNS/Golongan dan TKS.

NO	GOLONGAN RUANG	PNS	TKS	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	1
3	I.c	1	-	1
4	I.d	1	-	1
5	II.a	1	-	1
6	II.b	4	-	4
7	II.c	6	-	6
8	II.d	1	-	1
9	III.a	-	-	-
10	III.b	1	-	1
11	III.c	1	-	1
12	III.d	11	-	11
13	IV.a	2	-	2
14	IV.b	1	-	1
15	IV.c	1	-	1
16	IV.d	-	-	-

17	IV.e	-	-	-
18	TKS	-	-	-
19	*)TKK	-	12	12
	Jumlah	31 Orang	14 Orang	45 Orang

Berdasarkan DUK / 1 JAnuari 2018 jumlah pegawai Negeri Sipil yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebanyak 31 orang terdiri dari :

- 1 Orang dengan jenjang Pendidikan Strata Dua (S2)
- 10 Orang dengan jenjang pendidikan Strata Satu (S1)
- 2 Orang dengan jenjang pendidikan D3
- 14 Orang dengan jenjang pendidikan SLTA/Sederajat
- 2 Orang dengan jenjang pendidikan SLTP/Sederajat
- 1 Orang dengan jenjang pendidikan SD

Serta dibantu dengan Tenaga Honorer sebanyak 14 Orang dengan masing masing berpendidikan

- 2 Orang dengan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) /Sederajat/ Persamaan
- 1 Orang dengan jenjang pendidikan SD

BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan melalui pentahapan yang konsisten, jelas dan berkesinambungan. Dengan emikian diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1. Visi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib menetapkan visi. Perumusan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerangkan apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas sehingga dapat mempersatukan seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan politik . Adapun Visi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MENUJU MASYARAKAT MADANI”

Visi harus diyunjang oleh beberapa Misiyang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan Visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan melalui visi yang telah ditetapkan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka ditetapkanlah Misi. Dimana Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan apa yang dilakukannya serta bagaimanan melakukannya. Adapun Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
2. Mewujudkan iklim kehidupan diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa di daerah;
3. Meningkatnya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan lembaga infrastruktur politik;
4. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar perperan serta dalam mengantisipasi, mencegah, terjadinya Gangguan dan Keamanan.;
5. Mewujudkan pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Melalui visi organisasi ini semua jajaran Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu berbaur dengan masyarakat untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diciptakan komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan semua kekuatan sosial politik dan komponen masyarakat lainnya agar demokratis,

tumbuh sinergi yang menguntungkan demi terciptanya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang sejahtera. Di samping itu bermanfaat pula dalam medorong anggota organisasi untuk mencapai tujuan – tujuan baik tujuan bersama maupun tujuan individu,

3. Tujuan dan sasaran.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor – factor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan dating. Untuk memaksimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan factor–factor kinci / penentu keberhasilan yang diperoleh atas dasar analisa SWOT dan analisa strategi pilihan (ASP) dengan metode SWOT dan ASP sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011–2016 sebagai perencanaan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011–2016.

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan focus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan Pemerintah dalam mencapai tujuan. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi

opersional yang berupa indikasi kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Indikator terdiri dari angka (berapa) dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Angka yang digunakan sebagai indikator kinerja menghasilkan beberapa tipe indikator kinerja. Berdasarkan tipenya indikator kinerja dapat dibagi menjadi beberapa jenis misalnya :

1. Kualitatif, indikator dengan tipe ini menggantikan angka dengan menggunakan bentuk kualitatif. Nilai yang diberika berupa suatu kelompok derajat kualitatif yang berurutan dalam suatu rentang skala. Skala yang digunakan terdiri dari dua atau lebih. Semakin banyak skala yang digunakan semakin tipis gradasi dari nilai – nilai yang diberikan. Apabila menggunakan dua skala akan member jawaban yang hitam dan putih, skala yang lebih banyak akan memberikan variasi “abu-abu” diantara hitam dan putih.
2. Persentase, indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya.
   Persentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam pecahan atau decimal.
3. Rasio, indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan angka absolute lainnya yang terkait.
4. Kuantitatif, indikator ini menunjukkan kuantitas atau jumlah capaian kinerja.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa danPolitik kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2
Tujuan dan sasaran
Tahun 2018.

VISI : **TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MENUJU MASYARAKAT MADANI"**			
Misi Ke I : Mewujudkan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas			
TUJUAN	SASRAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk menun-jang profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan	5. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan yang efektif, 6. Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/ teknis perkantoran. 7. Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran, 8. Tersedianya sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku	Pengelolaan Administrasi umum dan keuangan yang baik dan akuntabel	Peningkatan pengetahuan melalui Bimtek yang memadai.
Misi Ke II :Mewujudkan iklim kehidupan diwilayah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama			
TUJUAN	SASRAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memantapkan wawasan kebangsaan sebagai perekat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.	Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegrasi bangsa)	1.Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara. 2.Memantapkan semangat nilai nilai sejarah kebangsaaan dan bela Negara	1. Peningkatan Pengamalan masyarakat tentang Ideo logi bangsa dan Negara 2. Peningkatan pengetahu-an tentang Bela Negara 3. Penguatan Ekonomi, Sosial budaya masyara-kat

Misi Ke III : Meningkatnya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan lembaga infrastruktur politik			
TUJUAN	SASRAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya stabilitas politik yang dinamis dan kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan	Memelihara dan menghor-mati komunitas kehidupan politik masyarakat yang berorientasi pada pengem-bangan masyarakat Madani yang dicita – citakan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban Politik sebagai Warga Negara	1.Peningkatan fungsi partai politik dalam Pendidikan Politik 2.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik 3.Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemilu.
Misi Ke IV : Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar perperan serta dalam mengantisipasi, mencegah, terjadinya Gangguan dan Keamanan.			
TUJUAN	SASRAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya peran aktif dalam mengantisipasi, mencegah, terjadinya Gangguan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	Meningkatnya pencega han dini penanganan Gangguan Keamanan	1. Meningkatkan upaya Deteksi Dini kerawanan Ipoleksosbudhankam 2. Meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama. 3. Meningkatkan peran lembaga lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan	1. Pencegahan kerawanan Ipoleksosbudhankam melalui upaya deteksi Dini 2. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik Interummat beragama maupun antar ummat beragama 3. Penguatan lembaga keagamaan
Misi Ke V : Mewujudkan pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan masyarakat.			
TUJUAN	SASRAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai, tentram dan bersatu	Terwujudnya Pengendali an keamanan dan Kenya manan lingkungan	1. Meningkatkan kerukunan antar Warga 2. Meningkatkan kerjasama antar warga dalam mengantisipasi terjadainya propaganda propaganda yang bermuatan negatif 3. Meningkatkan hubungan yang kondusif antar warga	1. Peningkatan pengetahuan Warga tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Pendidikan tentang Nilai nilai sejarah dan kebangsaan 3. Peninghkatan Pengetahuan Siskamling yang memadai

4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan sasaran dapat dicapai maka diperlukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategis yang terdiri dari Tiga komponen yaitu kebijakan,program dan Kegiatan.

a. Kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan setiap SKPD. Setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan Bupati Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir khususnya mengenai Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri dapat dilihat pada format renstra terlampir.

b. Program.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan dari SKPD dalam bentuk upaya nyata yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disiapkan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 dipilih dari sejumlah program yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

menjadi Permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Kegiatan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Jadi penekanan keluarannya adalah barang atau jasa.

Kebijakan, Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3
Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

KP	Program	KK	Kegiatan
1	2	3	3
	(3.01) Urusan Penunjang		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	01	Penyediaan Surat Menyurat
		02	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		07	Penyediaan Jasa Administrai Keuangan
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		12	Penyediaan Komponen Inst.Listrik/Penerangan bangunan Kantor

		15	Penyediaan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
02	Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur		
		09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		20	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
		22	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		26	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
03	Peningkatan Disiplin Aparatur	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
		30	Penyusunan LKPJ dan LPPD.OPD Kesbangpol
		31	Penyusunan Laporan ASet (Barang Milik Daerah (Penguasaan Kesbangpol)
(1.01.05) Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10	Koordinasi Kegiatan Orang Asing,LSM Asing,(NGO), dan Lembaga Asing di Daerah.
		15	Penanganan gangguan Keamanan.
17	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat).	03	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
		15	Komonitas Inteligen Daerah (Kominda).
		19	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
		20	Failitasi Pembentukan BNN Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(3.01.01.) Penunjang Urusan Pemerintahan			
20	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	06	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
		08	Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan
		09	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

		10	Bintek Bela Negara
22	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	01	Pembinaan pendidikan Politik Masyarakat.
		04	Pemantauan Perkembangan Politik Daerah.
		13	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.
		17	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Parpol
		18	Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan
		19	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu

) KP:Kode Program, KK:Kode Kegiatan

B. Penetapan Kinerja.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun Anggaran 2018 dengan Program dan jenis kegiatan sebagai berikut :

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

Tabel. 4
Sasaran Strategis,Indikator Kinerja
Target, dan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018
Setelah Perubahan Anggran

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	59,600,000
Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Jumlah Dokumen hasil pendataan terhadap kunjungan dan kegiatan orang Asing di 13 Kecamatan	- 100 % - 2 Dokumen	**Kegiatan:** Koordinasi Kegiatan Orang – orang Asing,LSM Asing,(NGO), dan lembaga Asing di Daerah	52,625,000
	Meminimalisir terjadinya anarkis dan tidak kekerasan di wilayah konfli	13 Kecamatan	**Kegiatan:** Penanganan Konflik Sosial	6,975,000

Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas			**Program :** Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	343,956,400
	Mekanisme Kerja FKDM dalam melaksanakan Fungsi Temu Cepat Lapor dan pelaksanaan sosialisasi	2 Kecamatan	**Kegiatan:** Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	77,925,000
	Koordinasi dan Deteksi Dini antar unsur Inteligen dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	13 Kecamatan	**Kegiatan:** Komonitas Inteligen Daerah (Kominda)	81,975,000
	Jumlah peserta Sosialisasi pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba	50 Orang	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	98,141,400
	Bedirinya BNN di Kabupten Tanjung Jabung Barat	6 Buku Laporan	Fasilitasi Pembentukan BNN Kab.Tanjung Jabung Barat	85,915,000
			Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan	334,158,690
Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Jumlah rapat Forum Kerukunan antar ummat Beragama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	45 Orang	**Kegiatan:** Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	107,878,690
	Jumlah peserta Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	50 Orang	**Kegiatan:** Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	33,325,000
	Jumlah Orang peserta forum yang mengikuti sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan(FPK)	50 Orang	**Kegiatan:** Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	160,010,000
	Jumlah Orang yang mengikuti Kaderisasi dan Bimbingan Bela Negara	40 Orang	**Kegiatan:** Bimtek Bela Negara	32,945,000
			Program : Pendidikan Politik Masyarakat	514,750,807
Peningkatan	Jumlah Orang yang		**Kegiatan:**	

peran partai politik dalam demokrasi daerah	mengikuti Sosialisasi Pembinaan Politik	40 Orang Peserta	Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat	61,664,720
	Laporan Perkembangan Politik dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	8 dokumen	**Kegiatan:** Perkembangan Politik Daerah	76,911,000
Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti Pembinaan	50 Orang	Kegiatan: Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM	56,475,000
Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah	Jumlah Dokumen dan Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan Parpol	33 Orang	**Kegiatan:** Fasilitasi pengelolaan Keuangan Parpol	75,866,707
	Peningkatan persiapan Pemilu di 13 Kecamatan	13 Kecamatan	**Kegiatan:** Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan	155,828,830
	Tersedianya Laporan hasil monitoring dan Evaluasi sebelum dan Sesudah Pemilu Kada,Presiden,dan Legislatif dari 13 Kecamatan	100 %	**Kegiatan:** Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu	88,005,000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategik dan Rancana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2018

Sebagai konsekwensi dari penerapan Sistem AKIP, maka tidak lepas dari proses pengukuran kinerja. Untuk mengukur kinerja digunakan indikator kinerja, tingkat sejauh mana keberhasilan organisasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya disebut ukuran kinerja. Biasanya organisasi yang tingkat kinerjanya tinggi disebut organisasi produktif dan sebaliknya organisasi yang tingkat kinerjanya tidak mencapai standart disebut sebagai tingkat kinerjanya rendah atau kurang produktif.

Setelah menetapkan Rencana Stratejik Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, selanjutnya perlu ditetapkan indikator kinerja yang meliputi indikator input, output dan outcomes. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran, nilai indikator untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tahunan dilakukan dengan mengukur tingkat pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan. Masing – masing

kegiatan memiliki target pencapaian dan pada awal tahun berikutnya dilihat realisasinya.

Realisasi dari rencana kegiatan dibandingkan dengan target akan memperoleh prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target).

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut :Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pecapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \text{ X } 100\ \%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen sasaran ini dituangkan dalam Formulir Kinerja Tahun 2018 alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama.

Idikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi Pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD dilingkungannya.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 dan Peraturan Menteri Negara Penadayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara " Indikaotr kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur Output atau Outcome" (Meneg PAN, 2006 . Dari pengertian – pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif berupa nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur Output atau Outcome dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja diupayakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan kata lain pemilihan indikator kinerja pada Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada SKPD pendukungnya.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah dinilai melalui pengukuran pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Badan Ksatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jbung Barat tahun anggaran 2018 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016-2021 yang selanjutnya diaplikasikan dalam Resntra Badan Kesbangpol Tanjung Jabung Barat periode 2016-2021. Selanjutnya dari Renstra dituangkan dalam Renja, selanjutnya menjadi RKA, dan terakhir dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabng Barat berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran tersebut. Adapun rincian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 adalah sebagaiberikut:

Pada Tahun Anggaran 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam APBD murni memiliki Anggaran Rp. 4.724.749.446,00 (Empatmilyard Tujuh Ratus Duapuluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), dan setelah melalui APBD-P Tahun Anggaran 2018 berubah bertaambah menjadi Rp. 4.998.225.663,00 (Empat Milyard Sembilan Ratus Sembilanpuluh Delapan Juta Dua Ratus Dua puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau bertamah sebesar Rp.273.476.217,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah.) atau betambah sebesar 5,79 %

Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja pegawai (ASN) sebanya 31 Orang selama kurun waktu 12 bulan dengan besaran Anggaran Rp.2.510.787.100, dengan realisasi sebesar Rp. 2.434.303.089 atau 96,95 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 76. 484.011 adapun rinciannya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.
Pembiayaan Belanja Tidak Langsung
(Gaji Rutin PNS/ASN)

No	Uraian	Anggaran Tersedia (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran
Belanja Tidak Langsung		2.510.787.100	2.434.303.089	76.484.011
1	Gaji Pokok/Uang Representasi	1.472.801.700	1.429.448.300	43.353.400
2	Tunjangan Keluarga	167.445.400	157.324.495	10.120.905
3	Tunjangan Jabatan	158.390.000	154.210.000	4.180.000
4	Tunjangan Fungsional Umum	46.935.000	45.070.000	1.865.000
5	Tunjangan	99.126.000	91.828.560	7.297.440

	Beras			
6	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	1.400.000	1.260.841	139.159
7	Pembulatan gaji	. 439.000	22.835	416.165
8	Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	57.700.000	55.007.008	2.692.992
9	Tambahan Penghasilan atas prestasi kerja	506.550.000	500.131.050	6.418.950

B. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang diperunakan untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesbangpol tahun anggaran 2018, yang terdiri dari 8 Program dan 35 Kegiatan yang terdiri dari Belanja Rutinitas dan belanja Program Strategis. Program rutinitas terdiri dari 4 Program dan 19 Kegiatan, sedangkan pada Program strategis terdiri dari 4 Program dan 14 Kegiatan.

dengan besaran Anggaran Setelah APBD-P. menjadi **Rp. 2,487,438,563**, dari APBD murni sebesar Rp.2.085.037.046,00 atau terdapat perubahan penambahan sebesar Rp. 402.401.517,00. dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.368.788.607** atau **95,23** % dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 118.649.956** adapun rinciannya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6
Jumlah Anggaran dan Persentase Realisasi
Anggaran Perprogram PerKegiatan

No	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI		
		JUMLAH	PROPORSI %	KEUANGAN		FISIK
				JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Pelayanan Aadministrasi Perkantoran**	**786.847.666**	**31.63%**	**769.577.265**	**97,88**	**98,96**
1.1.	Penyediaan Surat	2.250.000	0.09%	2.250.000	100	100

	menyurat					
1.2.	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	77.500.000	3.12%	60.307.234	77,82	89,58
1.3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.500.000	2.83%	77.500.000	100	100
1.4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.695.601	0.43%	10.695.601	100	100
1.5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.327.950	1.14%	28.327.950	100	100
1.6.	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	9.222.000	0.37%	9.222.000	100	100
1.7.	Penyediaan Komponen Listrik Instalaasi/penerangan bangunan Kantor	2.722.115	0.11%	2.722.115	100	100
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	4.200.000	0.17%	4.200.000	100	100
1.9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.200.000	0.17%	4.200.000	100	100
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	577.230.000	23.21%	577.152.365	99,99	100
2	**Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur**	**334.540.000**	**13.45%**	**303.630.325**	**90.76%**	**78,47**
2.1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	20.000.000	0.80%	20.000.000	0	0
2.2.	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	11.000.000	0.44%	10.920.000	99.27	100
2.3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	180.740.000	7.27%	180.466.000	99,85	100
2.4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	116.000.000	4.68%	105.964.325	90,96	92,35
2.5	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	6.300.000	0.25%	6.300.000	99.68	100
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**15.750.000**	**0.63%**	**15.750.000**	**100**	**100**
3.1.	Pengadaan Pakaian DInasbeserta perlengkapannya	15.750.000	0.63%	15.750.000	100	100
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**	**97.835,000**	**3.93%**	**97.835,000**	**100**	**100**
4.1.	Monitoring,Evaluai dan Pelaporan	40.337.500	1.62%	40.337.500	100	100
4.2.	Penyusunan LKPJ dan	27.087.500	1.09%	27.087.500	100	100

	LPPD. Badan Kesbangpol					
4.3.	Penyusunan Aset (BMD) OPD Kesbangpol	30.410.000	1.22%	30.410.000	100	100
5	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**59.600.000**	**2.40%**	**58.225.000**	**97,69**	**100**
5.1.	Koordinasi Kegiatan orang Asing,LSM, Asing(NGO) dan lembaga asing di Daerah	52.625.000	2.12%	51.250.000	97,39	100
5.2.	Penanganan Konflik Sosial	6.975.000	0.28%	6.975.000	100	100
6.	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**	**343.956.400**	**13.83%**	**280.196.100**	**81.46%**	**82,78**
6.1	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	77.925.000	3.13%	76.525.000	98,20	100
6.2.	Komonitas Intelijen Daerah (Kominda)	81.975.000	3.30%	80.225.000	97,87	100
6.3	Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba	98.141.400	3.95%	94.391.400	96.18	100
6.4	Fasilitasi Pembentukan BNN.Kabupaten Tanjung Jabung Barat	85.915.000	3.45%	29.055.000	33,82	31.11
7.	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**334.158.690**	**13.43%**	**333.109.930**	**99.69%**	**100**
7.1.	Bintek Bela Negara	32.945.000	1.32%	32.896.240	99.85	100
7.2.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	107.878.690	4.34%	107.878.690	100	100
7.3	Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	.33.325.000	1.34%	33.325000	100	100
7.4.	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	160.010.000	6.43%	159.010.000	99,38	100
8.	**Program Pendidikan Masyarakt**	**514.750.807**	**20.69%**	**510.464.687**	**99,17**	**100**
8.1.	Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat	61.664.720	2.48%	59.514.720	96,51	100
8.2.	Pemantauan PerkembanganPolitik Daerah	76.911.000	3.09%	76.016.000	98.84	100
8.3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Parpol	75.866.707	3.05%	74.966.707	98.81	100
8.4.	Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan	155.828.380	6.26%	155.667.260	99.90	100
8.5.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu	88.005.000	3.54%	87.825.000	99.80	100
8.6.	Pembinaan Lembaga					

	Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	56.475.000	2.27%	56.475.000	100	100
Jumlah 2018		**2,487,438,563**	**100 %**	**2.368.788.607**	**95,23**	**94,66**
Jumlah 2017		**1.487.633.863**		**1.422.731.394**	**95,64**	**95,20**

Uraian Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018

I. **Program Rutinitas**.

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Untuk menunjang kegiatan perkantoran dalam rangka mewujudkan Visi misi Bupati terpilih yang ditunjang dengan visi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2018, maka pemerintah daerah telah menganggarkan program ini pada APBD murni sebesar Rp. 886,847,666,- setelah melalui APBD-P anggaran tersebut terjadi penambahan atau berubah menjadi sebesar Rp.786,847,666 atau ada penambahan sebesar Rp. 100,000,000, hal ini bertambahnya anggaran perjalanan Dinas.adapun realisasi anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp. 769,577,265. dengan sisa anggaram sebesar Rp. 17,270,401 atau dengan prosentase realisasi sebesar 97,80 % serta prosentase fisik yang dihasilkan sebesar 98,96%.

Kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini terdiri dari :

1.1. Penyediaan Jasa Surat menyurat**:**

Aggaran yang disediakan pada APBD murni Rp. 2.250.000 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.250.000 tidak ada peruahan baik penambahan ataupun pengurangan. dengan target kinerja kuantitatif selama 12 bulan dengan pembiayaan Materai Rp.6.000 sebanyak 250 lembar dan Materai Rp.3.000 250 lembar,

- Pgu Anggaran = Rp. 2.250.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 2.250.000
- Sisa Anggaran = Rp.-
- Realisasi Anggaran = 100%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

1.2. **Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik:**
Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp. 77.500.000. tidak terdapat perubahan baik penambahan maupun pengurangan. dengan pos pembiayaan pada Telepon sebesar Rp. 3.000.000, Air PDAM sebesar Rp. 1.800.000, belanja listrik Kesbangpol ex PU. Sebesar Rp. 5.400.000, ex Litbangda ebesar Rp.1.500.000, ex Veteran sebesar Rp.16.200.000. penambahan Daya dan jaringan dalam ruangan ex Veteran sebesar Rp.40.000.000. dan biaya Internet sebesar Rp.9.000.000 dengan target kinerja kuantitatif selama 12 bulan

- Pgu Anggaran = Rp. 77.500.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 60.307.234
- Sisa Anggaran = Rp. 17.192.766
- Realisasi Aanggaran = 77,82%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

1.3. **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan :**
Anggaran yang disediakan pada APBD murni adalah sebesar Rp. 70.500.000 . dengan pembiayaan Honor pada: PA Rp.11.400.000, PPK.Rp.4.800.000, PPTK. Rp. 16.000.000, Bend. Pengeluaran Rp. 7.200.000, Penata usahaan Pengguna Barang Rp.8.400.000.Pengurus Barang Rp. 8.400.000, Bendaharawan Gaji Rp. 4.200.000. Pejabat Pembuat Komitmen Rp.800.000, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rp.2.100.000, Operator SIKD.Rp.7.200.000, target kinerja kuantitatif selama 12 bulan.

- Pgu Anggaran = Rp. 70.500.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 70.500.000
- Sisa Anggaran = Rp. -
- Realisasi Aanggaran = 100%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

1.4. **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor:**
Anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 10.695.601 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 10.695.601 atau terdapat pengurangan sebesar Rp. - . dengan pembiayaan pada: Belanja Bahan Pakai Habis

Rp.4.695.601 serta honorarium petugas kebersihan Rp. 6.000.000 target kinerja kuantitatif 12 bulan.

- Pgu Anggaran = Rp. 10.695.601
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 10.695.601
- Sisa Anggaran = Rp. –
- Realisasi Aanggaran = 100%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

1.5. **Penyediaan Alat Tulis Kantor:**

Anggaran yang disediakan dari anggaran APBD murni adalah sebesar Rp. 28.327.950. dengan pembiayaan pada: Belanja Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 28.327.950, target kinerja kuantitatif selama 12 bulan

- Pgu Anggaran = Rp. 28.327.950
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 28.327.950
- Sisa Anggaran = Rp. –
- Realisasi Aanggaran = 100%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

1.6. **Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan :**

Anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 9.222.000 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. . 9.222.000 dengan pembiayaan pada: Belanja bahan pakai habis.Rp. 5.000.000 dan Belanja cetak Rp. 4.222.000 target kinerja kuantitatif selama 12 bulan.

- Pgu Anggaran = Rp. 9.222.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 9.222.000
- Sisa Anggaran = Rp.
- Realisasi Aanggaran = 100%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

1.7. **Penyediaan Komponen Listrik Instalasi/penerangan bangunan Kantor :**

Anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.722.115. dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 2.722.115 dengan pembiayaan pada: Belanja alat lisrik dan elektronika Rp. 2.722.115, target kinerja kuantitatif selama 12 bulan.

- Pgu Anggaran = Rp. 2.722.115

-Realisasi anggaran sebesar = Rp. 2.722.115
-Sisa Anggaran = Rp. –
-Realisasi Aanggaran = 100%
-Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

1.8. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.**

adapun anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 4.200.000 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 4.200.000 atau terdapat pengurangan sebesar Rp. - dengan pembiayaan pada: Belanja jasa kantor/Surat Kabat dan majalah, target kinerja kuantitatif selama 12 bulan.

-Pgu Anggaran = Rp. 4.200.000
-Realisasi anggaran sebesar = Rp. 4.200.000
-Sisa Anggaran = Rp. –
-Realisasi Aanggaran = 100%
-Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

1.9. **Penyediaan Makanan dan Minuman :**

Anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 4.200.000 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 4.200.000 atau terdapat pengurangan sebesar Rp. - dengan pembiayaan pada: Belanja Makanan dan Minuman rapat, target kinerja kuantitatif selama 12 bulan.

-Pgu Anggaran = Rp. 4.200.000
-Realisasi anggaran sebesar = Rp. 4.200.000
-Sisa Anggaran = Rp. –
-Realisasi Aanggaran = 100%
-Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

1.10. **Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah :**

adapun anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 577.230.000 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 477.230.000 atau terdapat penambahan sebesar Rp. 100.000.000 atau sebear 20,95% target kinerja kuantitatif selama 12 bulan.

-Pgu Anggaran = Rp. 577.230.000
-Realisasi anggaran sebesar = Rp. 577.152.365
-Sisa Anggaran = Rp. 77.635
-Realisasi Aanggaran = 99,99%

-Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur

2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua

Biaya Pengadaan kendaraan dinas roda dua ini adalah ebesar Rp. 20.000.000 dari APBD-P.

Pengadaan kendaraan ini tidak terealisasi hal ini disebabkan pihak penyedia tidak merespon permintaan panitia melalui aplikasi e-katalog penyedia di LKPP.

- Pgu Anggaran = Rp. 20.000.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. -
- Sisa Anggaran = Rp. 20.000.000
- Realisasi Aanggaran = 0%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 0%

2.2. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Pada APBD murni terdapat anggaran sebesar Rp.11.000.000 dengan belanja modal yang terdiri dari pengadaan printer 2 Unit, sebesar Rp. 3.000.000. dan Laptop 1 unit Rp.8.000.000.

- Pgu Anggaran = Rp. 11.000.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 10.920.000-
- Sisa Anggaran = Rp. 80.000
- Realisasi Aanggaran = 99,27%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

2.3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor :

adapun anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 180.740.000 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 73.000.000 atau terdapat penambahan sebesar Rp. 107.740.000- (147,59%) dengan pembiayaan pada: Belanja Honorarium Pegawai tidak tetap /Penjaga Kantor sebanyak 2 Orang x 12 bulan Rp.12.000.000, Belanja Barang dan Jasa Kantor sebesar Rp.4.625.000. Belanja Modal Rp.164.115.000 dan Belanja Modal Pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp. 60.000.000 target kinerja kuantitatif selama 12 bulan.

Belanja Modal terdiri dari ;

Bangunan Gudang	Rp. 80.200.000
Jasa Perncanaan	Rp. 4.000.000
Jasa Pengawasan	Rp. 3.200.000

Belanja Modal Pemeliharaan terdiri dari:

Perbaikan Plafon Deck	Rp. 5.000.000
Partisi/penyekatan Ruangan kerja	Rp. 25.000.000
Pengecatan Gedung	Rp. 10.000.000
Perbaikn halaman Kantor	Rp. 10.000.000
Perbaikan WC	Rp. 10.000.000

Adapun pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

- Pgu Anggaran = Rp. 180.740.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 180.466.000
- Sisa Anggaran = Rp. 274.000
- Realisasi Aanggaran = 99.85%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

2.4. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional.

Anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 116.500.000 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 116.500.000 : Belanja Honor Pegawai tidak tetap Rp. 6.000.000, (Sopir 1Orang x 12 Bulan Belanja perawatan Kendaraan Rp.97.000.000 (3 unit Roda 4, 16 Kendaraan R 2 1 Unit Genset, target kinerja kuantitatif 1 Kegiatan.

- Pgu Anggaran = Rp. 116.000.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 105.964.325
- Sisa Anggaran = Rp. 10.535.675
- Realisasi Aanggaran = 99,85%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 92,35%

2.5. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor :

Adapun anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 6.300.000 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 6.300.000 atau terdapat pengurangan sebesar Rp. - (0%) dengan pembiayaan pada: Pemeliharaan computer 7 Unit sebesar Rp. 4.200.000, Pemeliharaan AC 6 Unit Rp. 2.100.000, target kinerja kuantitatif 1 Kegiatan.

- Pgu Anggaran = Rp. 6.300.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 6.280.000
- Sisa Anggaran = Rp. 20.000
- Realisasi Aanggaran = 99,68%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp.15.750.000 dari anggaran APBD murni sebesar Rp.15.750.000 atau terdapat dengan pembiayaan pada: Belanja Pakaian Dinas PNS. 32 stel Rp.11.200.000, Non PNS.13 stel Rp. 4.550.000. target kinerja kuantitatif 1 Kegiatan.

- Pgu Anggaran = Rp. 15.750.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 15.750.000
- Sisa Anggaran = Rp. -
- Realisasi Aanggaran = 100%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan:

4.1. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan:

adapun anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 40.337.500 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 24.737.500 atau terdapat penambahan sebesar Rp. 15.600.000- (63,06%) dengan pembiayaan pada: Belanja Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 29.000.000, dan honorarium Non PNS. Rp.10.000.000. Belanja Barang dan Jasa Rp.1.337.500, 5 bulan, target kinerja kuantitatif 12 bulan.

- Pgu Anggaran = Rp. 40.337.500
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 40.337.500
- Sisa Anggaran = Rp. -
- Realisasi Aanggaran = 100%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

4.2. Penyususnan LKPJ,dan LPPD Kesbangpol:

Anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 27.087.500 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 16.165.000 atau terdapat penambahan sebesar Rp. 10.922.500 (67,57%) dengan pembiayaan pada Belanja :Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 15.000.000, dan honorarium Non PNS. Rp.10.000.000.

Belanja Barang dan Jasa Rp.1.337.500, 10 bulan, target kinerja kuantitatif 12 bulan Kegiatan.

- Pgu Anggaran = Rp. 27.087.500
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 27.087.500
- Sisa Anggaran = Rp. -
- Realisasi Aanggaran = 100%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

4.3. Penyusunan Aset (BMD) OPD Kesbangpol

Anggaran yang disediakan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 30.410.000 dari anggaran APBD murni sebesar Rp. 19.110.000 atau terdapat penambahan sebesar Rp. 11.300.000 (59,13%) dengan pembiayaan pada Belanja :Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 15.750.000, dan honorarium Non PNS. Rp.12.500.000. Belanja Barang dan Jasa Rp.2.160.000, 10 bulan, target kinerja kuantitatif 12 bulan Kegiatan.

- Pgu Anggaran = Rp. 30.410.000
- Realisasi anggaran sebesar = Rp. 30.410.000
- Sisa Anggaran = Rp. -
- Realisasi Aanggaran = 100%
- Realisasi Fisik Kegiatan = 100%

II. Program Strategis

2.1. Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2.1.1. Pemantauan dan Koordinasi Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing,LSM Asing dan Lembaga Asing(NGO)

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp. 52.625.000,- dengan pembiayaan sebagai berikut : Belanja Pegawai Honorarium PNS, Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 39.800.000,- honorarium pegawai tidak tetap /Non PNS sebesar Rp. 12.000.000,- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 425.000,- Belanja makan dan minum rapat Rp.400.000,

MAKSUD DAN TUJUAN :

Pelaksanaan rapat Tim Penganan Orang asing yang kan di Kantor Kesbangpol Kab. Tanjab Barat dengan jumlah peserta 23 0rang.

Pemantauan dan koordinasi Kegiatan Orang Asing, LSM Asing (NGO) yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kegiatan ini menitik beratkan pada pemantauan dan rapat koordinasi bersama Tim penanganan orang Asing dan pembinaan aktifitas orang Asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga tercipta rasa kenyamanan dan keamanan dilingkungan masyarakat setempat maupun dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini menghasilkan 2 laporan selama dua smester

- PGU Anggaran : Rp. 52.625.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 51.250.000,-
- Sisa Anggaran : Rp. 1.375.000,-
- Realisasi Anggaran : 97,39 %
- Realisasi Fisik Kegiatan : 100 %

2.1.2. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (PKS)

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp. 6.975.000,- dengan pembiayaan belanja barang dan jasa sebesar rp. 6.975.000,- belanja bahan pakai habis sebesar Rp. 1.000.000,- belanja cetak dan pengadaan Rp. 2.375.000,- belanja makan dan minum rapat Rp. 3.600.000,-

Dasar pelaksanaan `kegiatan ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial.
2. Perturan mentri Dalam Negeri Repullik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Koordinasi penanganan konflik social.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang perubhan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komonitas Inteligen Daerah.

Pelaksanaan kegitan:

- Melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) kepada OPD penanggung Jawab Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada lima Aspek
  a. Pencegahan konflik social yang meliputi:
     - Penanaman Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
     - Sara
     - Politik/Batas Daerah Administrasi
     - Ekonomi/Industri
     - Lahan/SDA
  b. Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme
     - Penghentian
     - Penyelesaian Konflik Sosial
       a. Sebelum Tahun 2017
       b. Sejak Tahun 2018
  c. Percepatan Penegakan Hukum:
       a. Sebelum Tahun 2017
       b. Sejak Tahun 2018
       d. Pemulihan Pasca KOnflik
       e. Monitoring dan Evaluasi
       f. Pelaporan

2.2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

2.2.1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp. 77.925.000,- dengan pembiayaan belanja pegawai PNS, Panitia kegiatan sebesar Rp. 29.000.000,- honorarium pegawai tidak tetap / Non PNS sebesar Rp. 12.000.000,- belanja cetak dan pengadaan Rp. 425.000,- belanja makan dan minum rapat Rp. 3.250.000,-

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya Kegiatan ini :
DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 232/Kep-Bup/Kesbangpol/2018 tentang Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.

- Melaksanakan Rapat Anggota Forum Kewaspdaan Dini Masyarakat (FKDM) di 3 Kecamatan , Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Bram Hitam dengan jumlah peserta masing-masing setiap kecamatan sebanyak 25 orang.
- forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ,menitik beratkan pada peningkatan kemampuan dan pemahaman pengurus Forum Kewaspdaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Tanjung Jabung Barat, melaui pembinaan dan pelaksanaan kegiatan rapat kepada para pengurus maupun anggota di tiap-tiap kecamatan.
  serta selaku wadah unyuk menampung dan menjaring informasi dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini menghasilkan 2 Laporan, satu laporan per satu semester

Kegiatan ini dapat dijelaskan bahwa :

- PGU Anggaran : Rp. 77.925.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.76.525.000,-
- Sisa Anggaran : Rp. 1.400.000,-
- Realisasi Anggaran : RP. 98.20%
- Realisasi Fisik kegiatan : Rp. 100%

2.2.2. Komunitas Intelijen Daerah

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp. 81.975.000,- dengan pembiayaan belanja pegawai PNS, Panitia kegiatan sebesar rp. 58.750.000,- honorarium pegawai tidak tetap / Non PNS sebesar Rp. 20.000.000,- belanja cetak dan pengadaan Rp. 725.000,- belanja makan dan minum rapat Rp. 2.500.000,-

MAKSUD DAN TUJUAN :

DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah .

2. SK Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 34/ .Bup / BPKAD / 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Melaksanakan Rapat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) merencanakan,mencari,mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Daerah Khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini dilakanakan di 13 kecamatan
  - Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah Kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di Kabupaten.
  - Kegiatan ini terdiri dari 4 Laporan yaitu laporan pertriwulan

- PGU Anggaran : Rp. 81.975.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.80.225.000,-
- Sisa Anggaran : Rp. 1.750.000,-
- Realisasi Anggaran : RP. 97.87%
- Realisasi Fisik kegiatan : Rp. 100%

2.2.2. Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp.**41.281.400**,- dan pada APBD.P ada penambahan sebesar Rp.**56.860.000**,- jadi jumlah Total Rp.**98.141.400**,- dengan pembiayaan: Belanja Pegawai Honorarium PNS, Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar *Rp 22.500.000,-* honorarium pegawai tidak tetap /Non PNS sebesar Rp.6000.000,- Bewlanja Alat Tulis Kantor Rp.6.426.400,- Biaya Dokumentasi Rp. 1000.000,- Biaya Dekorasi Rp. 750.000,- Biaya Publikasi Rp. 4.500.000,- Belanja jasa kerja Rp. 20.750.000,- Belanja Transportasai Rp. 14.225.000,- Belanjan jasa tenaga ahli/Nara sumber Rp.14.000.000,- Belanja Cetak Rp. 70.000, Belanja Pengadaan Rp. 420.000,- Belanja makan dan minum rapat Rp.7.500.000,-

- PGU Anggaran : Rp.98.141.400,-
- Realisasi Anggaran : Rp.94.391.400,-
- Sisa Anggaran : Rp. 3.750.000,-
- Realisasi Anggaran : 96.18 %

- Realisasi Fisik Kegiatan : 100 %

Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksnakan di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 Agustus 2018 yang dihadiri Peserta dari Generasi Pemuda, Pelajar SMA, SMP dan utusan tokoh masyarakat Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah peserta 50 orang.

Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Bela Negara,

1. Mengoptimalisasi Peran Pemuda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Meingkatkan koordinasi Konsolidasi serta sinergitas antar unsur Pemuda, Pelajar, dan Masyarakat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menyikapi ancaman bahaya Penyalahgunaan Narkoba di tengah-tengah masyarakat di kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Untuk menambah pengetahuan bagi peseta dalam upaya meningkatkan Kewaspadaan dan Keterpaduan Penanggulanagan Penyalahgunaan Narkoba

2.2.3. Fasilitasi Pembentukan BNK. KAB. TANJAB BARAT.

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp.**85.915.000**, dengan pembiayaan: Belanja Pegawai Honorarium PNS, Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 21.125.000,- honorarium pegawai tidak tetap /Non PNS sebesar Rp.6.250.000,- selama 5 (lima) bulan, Belanja Cetak, Rp. 180.000, Belanja Makan Minum rapat Rp. 1.500.000,-

- PGU Anggaran : Rp.85.915.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.29.055.000,-
- Sisa Anggaran : Rp.56.860.000,-
- Realisasi Anggaran : 33.82 %
- Realisasi Fisik Kegiatan : 31,11 %

Rencana semula, anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena berdaarkan skor yang dipersyaratkan telah

terpenuhi begitu juga syarat lainnya. namun setelah di usulkan ke Kementrian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), tidak mendapat persetujuan. dengan alasan :

1. Dari 70 (Tujuh Puluh) Kabupaten /Kota, Menpan RB. Dalam Pertemuan Dengan Kepala BNN Tanggal 17 April 2018 di Kementrian PAN RB memberikan Arahan Kebijakan agar BNN Memprioritaskan Penataan Instansi Vertikal BNN Pada Evaluasi Optimalisasi Kapasitas Organisasi Dan Sumber Daya Terhadap 34 BNNP Dan 173 BNNK/Kota Yang Sudah Terbentuk.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di Atas, Prioritas Pertama BNN Adalah Penguatan Kapasitas Organisasi Instansi Vertikal Melalui Penguatan Dukungan Personel, Pembiayaan, Serta Penyediaan Dan Pemenuhan Sarana Prasarana Agart Instansi Vertikal Yang Telah Dibentuk Lebih Optimal Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Funsinya.
3. Prioritas Kedua BNN Adalah Merivisi Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Dapat Dilakukan Secara Lebih Selektif Dan Cermat Berdasarkan Skala Prioritas. Dukungan BNNP Dalam Pembentukan Instansi Vertikal Akan Lebih Diutamakan. Penanganan Pelaksanaan Tugas, Fungsi , Dan Wewenang BNN Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Dilakukan Melalui Pendekatan Regionalisasi Dengan Mengoptimalkan Peran Dan Koordinasi BNNP Dan BNNK/ Kota Yang Telah Ada Sambil Melakukan Pemantapan Pembentukan BNNK/Kota Yang Baru.

4. Berdasarkan Penjelasan Tersebut Diatas, BNN Perlu Melaksanakan Penguatan Kapasitas Organisasi Instansi Vertikal Dan Merevisi Peraturan Kepala No. 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Di Lingkungan BNN Sesuai Arahan Menteri PAN RB Sebelum Mengusulkan Kembali Pembentukan BNN Kab/ Kota Yang Baru.

2.3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2.3.1. Bimbingan Teknis Bela Negara

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp.32.945.000**,-** dengan pembiayaan: Belanja Pegawai Honorarium PNS, Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar *Rp.12.375.000,-* honorarium pegawai tidak tetap /Non PNS sebesar Rp. *3.750.000*,-Belanja barang pakai habis Rp. 3.370.000,-Biaya Belanja Jasa Kantor Rp. *8.900.000,-* Belanja Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. *200.000,-* Belanja Sewa Gedung Rp. *1.500.000,-* Belanja makan dan minum rapat Rp.*2.850.000*,-,

MAKSUD DAN TUJUAN :

Pelaksanaan Bimbingan teknis Bela Negara dilaksanakan di Hotel masa Kini pada tanggal 17 Oktober 2018 yang dihadiri peserta sebanyak 50 orang yang terdiri palajar SMA sederajat SMP sederajat dan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Kuala Tungkal.

Bimbingan Teknis Bela Negara, bermaksud :

1. Meningakan pengetahuan berwawasan kebangsaan bagi para pelajar selaku Kader Bela Negara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Untuk mewujudkan tercapainya Pengetahuan berwawasan bagi pelajar agar tersedianya Kader Bela Negara dan Perluasan wawasan kebangsaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- PGU Anggaran : Rp.32.945.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.32.896.240
- Sisa Anggaran : Rp. 48.760
- Realisasi Anggaran : 99,85%
- Realisasi Fisik Kegiatan : 100 %

2.3.2. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Anggaran yang tersedia pada APBD murni adalah sebesar Rp. 107.878.690. dengan pembiayaan: Honorarium PNS/ASN sebesar Rp. 89.750.000. terdiri dari Dewan Penasehat FKUB Ketua 1 Orang, Wakil Ketua 1 Orang, Sekretari 1 Orang, Anggota 14 Orang , dengan keanggotaan FKUB Ketua 1Orang, Wakil Ketua 2 Orang, Sekretaris 1 Orang,Wakil Sekretaris 1 Orang dan Anggota 12 Orang selama 10 Bulan.Honorarium Non PNS/pegawai tidak tetap : sebanyak 5 Orang selama 10 orang. Belanja barang pakai habid Rp.1.121.690, belanja Jasa Kantor Rp.2.250.000, Belanja cetak dan Penggandaan107.000, Belanja Makan dan Minum Rapat Rp.20150.000,Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi / Dialog antar Umat Beragama sehingga menghasilkan terbinanya suasana yang kondusif yang didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang harmonis antar semua pihak yang terkait sehingga dapat mewujudkan keharmonisan antar sesama umat beragama, kegiatan ini dilaksanakan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Merlung, Kecamatan Muaro Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh kegiatan ini dihadiri oleh peserta sebanyak 15 Orang peserta/Kecamatan.

Kesimpulan dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Pemantapan kepengurusan FKUB. Kecamatan
2. Pemantauan terhadap kerukunan Ummat beragama di Kecamatan
3. Menjaga solidaritas dimasing-masing agama sehingga tercipta kerukunan agama sehingga secara umum kondisi kehidupan beragama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjalan dengan dinamis damai dan penuh dengan nuansa yang menjunjung tinggi demokrasi serta saling menghargai satu sema lainnya.
4. Bahwa FKUB kecamatan merupakan merupakan perpanjangan FKUB Kabupaten dalam menindak lanjuti masalah yang ada di Kecamatan dan tetap menjaga silaturrahim antar kecamatan dan Kabupaten dalam menciptakan suaana kerukunan antar umat beragama.

- Pagu Anggaran : Rp 107.878.690.00,-
- Realisasi anggaran sebesar : Rp 107.878.690.00,-
- Sisa Anggaran : Rp –
- Realisasi anggaran : 100%
- Reaslisasi Fisik Kegiatan : 100%

2.3.3. Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan

Adapun anggaran yang disediakan pada APBD murni adalah sebesar Rp 33.325.000,-Dengan pembiayaan pada Belanja Pegawai Panitia Pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 10.875.000,-, Honorarium pegawai tidak tetap sebesar Rp 3.750.000,- , Belanja Bahan Pakai Habis Rp 2.500.000,-, Belanja Jasa Kantor Rp 11.850.000,- Belanja Cetak dan Penggadaan Rp 400.000,- Belanja Sewa Rumah/Gedung tempat pertemuan Rp 1.500.000,-, Belanja Makan dan Minum rapat Rp 2.450.000,- target peserta forum ini adalah 50 orang peserta, dan dihadiri sebanyak 50 Orang peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Forum diskusi/dialog dalam rangka penguatan nilai – nilai Sejarah bangsa bagi para pelajar dan mahasiswa, sehingga menghasilkan pemahaman tentang pentingnya akan nilai – nilai sejarah Bangsa yang perlu dijaga dan di lestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Forum ini dihadiri perserta sebanyak 50 orang terdiri dari peserta dalam kota 29 orang peserta luar kota (kec. Betara) 3 orang, (kec. Tungkal Ulu) 6 orang , (Merlung) 6 orang , (Tebing Tinggi) 3 orang , (pengabuan) 3 orang.

- Pagu Anggaran = Rp 33.325.000.00,-
- Realisasi anggaran sebesar = Rp 33.325.000.00,-
- Sisa Anggaran = Rp –
- Realisasi anggaran = 100%
- Reaslisasi Fisik Kegiatan = 100% (50 Orang Peserta)

2.3.4. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Adapun anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp 135.450.000 dan APBD perubahan terdapat perubahan sehingga menjadi Rp. 160.010.000, atau terdapat penambahan sebesar Rp 24.560.000 dengan pembiayaan pada : Belanja Pegawai Panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp 101.000.000. Honorarium Pegawai tidak tetap sebesar Rp 12.500.000. Belanja Bahan habis Pakai Rp.7.950.000, Belanja Jasa Kerja Kantor Rp.28.575.000,Belanja Cetak dan penggandaan Rp.125.000,Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp.1.500.000,Belanja makan minum rapat Rp.8.250.000, target kinerja 13 Kecamatan.

Kegiatan ini berbentuk Forum / dialog kegiatan dan dilaksanakan di 13 Kecamatan antara pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di kecamatan. Dengan Forum ini maka diharapkan adanya kontribusi kepada Negara dan Bangsa Indonesia khususnya diwilayah Kabupaten Tanjung Barat agar dapat tercipta suatu nilai kebersamaan dan saling menghargai dan menghormati dalam kemajemukan masyarakat dalam wadah NKRI.

Dan pada kegiatan ini telah dilaksanakan sosialisasi dan keberadaan Kampung Pancasila yang berada Kecamatan Tebing Tinggi

- Pagu Anggaran = Rp 160.010.000.00,-
- Realisasi anggaran sebesar = Rp 159.010.000.00,-
- Sisa Anggaran = Rp 1000,-
- Realisasi anggaran = 99,38%
- Reaslisasi Fisik Kegiatan = 100%

2.4. Program Pendidikan Politik Masyarakt

2.4.1. Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat.

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp. 30.173.240. setelah perubahan maka kegiatan ini berubah bertambah menjadi Rp 61.664.720,- atau terdapat penambahan sebesar Rp.31.491.480,00 atau sebesar 104,37 %. dengan pembiayaan: Belanja Pegawai Honorarium PNS, Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 23.700.000,- honorarium pegawai tidak tetap /Non PNS sebesar Rp. 7.500.000,-, belanja bahan pakai habis sebesar Rp. 6.352.220,- Belanja Jasa Kantor Rp. 17.100.000,- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 187.500,- Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir Rp. 1.500.000,- Belanja makan dan minum rapat Tim Rp. 5.325.000,-,

- PGU Anggaran : Rp. 61.664.720,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 59.514.720,-
- Sisa Anggaran : Rp. 2.150.000,-
- Realisasi Anggaran : 96.51 %
- Realisasi Fisik Kegiatan : 100%

Peserta yang mengikuti Sosialisasi ini berjumlah 120 orang peserta, yang terdiri dari Tokoh Masyarakat 40 Orang,

mahawiswa / Pelajar 40 orang, tokoh agama 20 orang dan pengurus partai politik 20 orang.
Dengan sasaran kegiatan ini adalah :
1) Membangun kesadaran berpolitik dan memberikan pengetahuan yang memadai sehingga dapat berpikir secara rasional dalam pengambilan keputusan dan penggunaan hak politik secara sadar dan rasional.

2) Mewujudkan atau menyiapkan kader-kader yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas dalam arti yang benar-benar memahami semangat yang terkandung dalam perjuangan sebagai kader bangsa sebagai warga negara kita harus sanggup mengabdikan diri untuk ikut serta dalam membangun negara.

2.4.2. Pemantauan Perkembangan Politik Daerah

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp. 76.911.000,- dengan pembiayaansebagai berikut : Belanja Pegawai Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 61.250.000, dimana terdiri dari Pembina, 1Orang,Wakil Pembina 1Orang,penanggung Jawab 1Orang,Ketua 1 Orang,Sekretaris 1 Orang, Anggota 10 Orang, staff Sekretariat 4 Orang. honorarium pegawai tidak tetap/Non PNS sebesar Rp. 10.000.000,-, 4 Orang, belanja bahan pakai habis Rp. 1.885.000,- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 776.000,- Belanja makan dan minum rapat Tim Rp. 3.000.000,-,

- PGU Anggaran : Rp. 76.911.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 76.016.000,-
- Sisa Anggaran : Rp. 900.000,-
- Realisasi Anggaran : 98,81 %
- Realisasi Fisik Kegiatan : 100%

target Kinerja 10 bulan pada 13 Kecamatan di wilayah Kab. Tanjung Jabung barat.
Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan pelaksanaan koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah dalam rangka Pemantauan dan Pelaporan.
Melakasanakan Pemantauan Perkembangan Politik di 13 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan Outcome kegiatan 8 dokumen laporan.

Pada Triwulan I

1. Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 pukul 10.00 Wib Bertempat di Ruang Media Center KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Pleno Penyampaian hasil verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Perindo untuk menjadi calon peserta pemilu 2019 oleh KPU Kab. Tanjab Barat.

2. Pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 Sekira pukul 09.00 Wib bertempat di ruang Media Center KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan penyerahan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol Berkarya dan Parpol Garuda oleh KPU Kab. Tanjab Barat.

   kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt dan didampingi oleh anggota KPU Tanjab Barat (SUROSO, S.Pt., HAIRUDIN, S.Sos, A. HADZIQ, SH.I dan M. TAUFIK, S.Tr) serta dihadiri oleh masing-masing penghubung Parpol Berkarya dan Parpol Garuda.

   pelaksanaan kegiatan disaksikan oleh Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I dan anggota Panwaslu Kab. Tanjab Barat MON REZI, S.Sos.I.
   hasil penyerahan verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol Berkarya dan Garuda oleh KPU Kab. Tanjab Barat sebagai berikut :

   A. Parpol BERKARYA :
   1. jumlah sampel data sipol sebanyak 71 (tujuh puluh satu) anggota;
   2. Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) anggota;
   3. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 34 (tiga puluh empat) agota.

   B. Parpol GARUDA :
   1. jumlah sampel data Sipol sebanyak 37(tiga puluh tujuh) anggota;
   2. Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 2 (dua) anggota;
   3. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 35 (tiga puluh lima) anggota.

3. Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di ruang Media Center KPU Tanjab Barat dilaksanakan penyampaian perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual dan penyampaian struktur kepengurusan baru parpol Perindo Tanjab Barat, kegiatan dipimpin anggota KPU Tanjab Barat Divisi Hukum AHMAD HADZIQ, SH.I didampingi anggota KPU Tanjab Barat HAIRUDIN S.Sos., SUROSO, S.Pt., TAUFIK, S.Tr., serta dihadiri pengurus DPD Perindo Tanjab Barat

Catatan :

1) Didalam PKPU No 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD , bahwa pengambilan sampel hanya 5 % dari data Sipol yang Memenuhi Syarat (MS) masing-masing Parpol, Syarat minimal untuk bisa lolos Verifikasi hanya 17 orang yang menyatakan dukungan dan 17 orang tersebut didapat dari 5 % dari batas minimal syarat keanggotaan parpol yaitu 322/jumlah Penduduk Kab. Tanjab Barat 322.058;

2) Tim Verifikator dari KPU Kab. Tanjab Barat mengecek SK Kepengurusan DPD Partai, Surat keterangan domisili Kantor DPD Partai, Surat pernyataan sewa kantor dan bukti sewa, memperhatikan pengurus keterwakilan 30 % kepengurusan wanita dan menunjukkan KTP dan KTA Anggota Parpol yang diambil sampel.

4. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat melakukan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik untuk menjadi Peserta pemilu tahun 2019 berdasarkan PKPU No 5 tahun 2018 tentang Jadwal, tahapan dan program pemilu serta PKPU No 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD. Kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt., dan didampingi oleh Sekretaris, Komisioner, Tim Pokja Verifikator KPU Kab. Tanjab Barat serta dimonitor oleh Anggota Panwaslu Kab. Tanjab Barat MON REZI, S.sos.I dan Unit I Satintelkam Polres Tanjab Barat

5. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 17.30 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat

dilaksanakan RAPAT PLENO PENUTUPAN PENYERAHAN BERKAS CALON PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kab.

6. Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat melakukan Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 berdasarkan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang jadwal, tahapan dan program Pemilu serta PKPU No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

   Kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt dan didampingi oleh Sekretaris, Komisioner, tim Pokja Verifikator KPU Kab. Tanjab Barat.

Keterangan :

1) data Sipol NasDem yang memenuhi syarat pada saat tahapan penyerahan berkas *foto copy* E- KTP dan KTA ke KPU Kab. Tanjab Barat beberapa waktu yang lalu berjumlah 484 (484x5 % = 25 sampel);

2) sekira pukul 11.30 Wib tim Verifikasi dari KPU, Panwaslu dan Unit Intelkam Polres Tanjab Barat menemui warga binaan Lapas Kelas II B Kuala Tungkal a.n. RIANO JAYA WARDHANA, Nst, S.H. (Ketum DPD Nasdem Kab. Tanjab Barat) untuk melakukan Verifikasi Kepengurusan Partai NasDem.

7. Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 Pukul 14.45 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Penyampaian hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019.

   Kegiatan dipimpin oleh Angota KPU Kab. Tanjab Barat A. HADZIQ, S.H.I, dan didampingi oleh Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat. Dimonitor oleh Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I., Unit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat serta dihadiri oleh Penghubung 12 Parpol :

Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 untuk 12 Parpol tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)

8. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat mengumumkan hasil seleksi Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu tahun 2019 di Kab. Tanjab Barat dengan Nomor Pengumuman : 45/PP.05-PU/01/1506/KPU-Kab/II/2018 tanggal 04 Februari 2018. Pendaftaran dibuka dari tanggal 25 Januari 2018 s.d 03 Februari 2018 dengan jumlah pendaftar sebanyak 203 orang dan tidak lulus sebanyak 1 (satu) orang yang berasal dari Kec. Seberang Kota dan lulus 202 orang terdiri dari :

a. Kec. Batang Asam 9 (sembilan) orang Laki-laki;
b. Kec. Betara 12 orang (10 Laki-laki, 2 Perempuan);
c. Kec. Bram Itam 18 orang (13 Laki-laki, 5 Perempuan);
d. Kec. Kuala Betara 14 orang (13 Laki-laki, 1 Perempuan);
e. Kec. Merlung 15 orang (10 Laki-laki, 5 Perempuan);
f. Kec. Muara Papalik 6 (enam) orang (3 Laki-laki, 3 Perempuan);
g. Kec. Pengabuan 26 orang (20 Laki-laki, 6 Perempuan);
h. Kec. Renah Mendaluh 6 (enam) orang Laki-laki;
i. Kec. Seberang Kota 11 orang (10 Laki-laki, 1 Perempuan);
j. Kec. Senyerang 10 (sepuluh) orang Laki-laki;
k. Kec. Tebing Tinggi 6 (enam) orang (5 Laki-laki, 1 Perempuan);
l. Kec. Tungkal Ilir 61 orang (38 Laki-laki, 23 Perempuan);
m. Kec. Tungkal Ulu 8 (delapan) orang (4 Laki-laki, 4 Perempuan).

Keterangan :
Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak untuk mengikuti tes tertulis yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 pukul 14.00 Wib bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati.

9. Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 Pukul 10.15 Wib bertempat di Hotel Rivoli Jl. Prof. Sri Soedewi Kel. Sungai

Nibung Kec. Tungkal Ilir dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2019. Rapat pleno di pimpin Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt dan didampingi oleh Komisioner sekretaris KPU Kab. Tanjab Barat.

Rekapitulasi hasil verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2019 untuk 12 parpol tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan untuk parpol BERKARYA sudah MS pada saat Verifikasi sebelum dikeluarkannya PKPU No 5 tahun 2018 tentang jadwal, tahapan dan program pemilu serta PKPU No 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD;

Selanjutnya KPU Kab. Tanjab Barat akan mengirim rekapitulasi hasil verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2019 Kab. Tanjab Barat ke tingkat KPU Prov. Jambi pada tanggal 9 s.d 10 Februari 2018.

10. Pada Hari Rabu tgl 7 Februari 2018 pukul 14.30 Wib bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat, jumlah yang lulus adminstrasi sebanyak 202 Orang.

11. Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 10.00 Wib bertempat di Hotel Syari'ah Kuala Tungkal dilaksanakan UJI PUBLIK Usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilihan umum Tahun 2019 Kab. Tanjab Barat. Kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt., dan didampingi oleh Komisioner dan Sekretaris KPU Kab. Tanjab Barat.

12. Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 21.00 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Pleno hasil tes wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih untuk Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat.

Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt dan dihadiri oleh Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat

Dimonitor oleh Unit I Satintelkam Polres Tanjab Barat
Hasil Rapat Pleno penetapan Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

13. Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat mengeluarkan pengumuman seleksi administrasi pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai tanggal 6 s.d 17 Februari 2018 untuk di 20 Kelurahan dan 114 Desa se Kab. Tanjab Barat.

    Nomor Pengumuman : 81/PP.05-Pu/01/KPU-Kab/II/2018 tentang hasil seleksi penelitian administrasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu tahun 2019 di Kab. Tanjab Barat dengan hasil seleksi penelitian administrasi PPS.
    Keterangan :
    Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan jumlah peserta per Desa/Kelurahan lebih dari 6 (enam) orang peserta wajib mengikuti tes tertulis, sedangkan bagi peserta yang jumlahnya sampai dengan 6 (enam) orang atau kurang pesertanya maka hanya wajib seleksi wawancara dan tidak mengikuti tes tertulis.

14. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Pukul 14.00 wib telah dilaksanakan ujian tertulis tahapan seleksi calon PPS (Panitia Pungutan Suara) bertempat di Aula Kantor Desa Serdang Jaya Kec. Betara Kab. Tanjab Barat oleh Komisioner KPU Tanjab Barat.

15. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Pukul 14.00 Wib telah dilaksanakan ujian tertulis tahapan seleksi calon PPS (Panitia Pungutan Suara) yang bertempat di Aula Kantor Camat Kuala Betara Kel. Betara Kiri Kec. Kuala Betara Kab. Tanjab Barat oleh Komisioner KPU Tanjab Barat.

    Rangkaian kegiatan :
    1) Lembaran ujian tertulis dibagikan ke setiap peserta ujian dan di bacakan tata tertib selama ujian berlangsung;
    2) Kegiatan ujian seleksi calon PPS dibatasi waktu selama 1 (satu) jam dengan 30 soal berganda/pilihan;

3) Dari 8 (Delapan) calon peserta PPS yang ikut ujian tertulis tahapan seleksi akan diambil 6 (enam) orang calon PPS yang akan ikut tahapan seleksi wawancara;
4) Pengumuman peserta lulus tahapan seleksi calon PPS yang ikut ujian tertulis akan diumumkan pada tanggal 22 Februari 2018 dan selanjutnya bagi yang lulus ujian tertulis akan dilaksanakan tahapan seleksi wawancara pada tanggal 23 s.d 24 Februari 2018 di kantor Kec. Kuala Betara Kab. Tanjab Barat.

16. Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat mengeluarkan pengumuman seleksi hasil tes tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018. Pengumuman hasil tes tertulis, Nomor Pengumuman : 83/PP.05-Pu/01/KPU-Kab/II/2018

Catatan :
Dari sejumlah Kel/Desa yang melaksanakan tes terulis ditemukan 1 (Desa) yaitu Desa Bukit Harapan Kec. Merlung yang peserta lulusnya kurang dari target yaitu hanya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang yang nantinya dibutuhkan, peserta yang tidak lulus tes tertulis untuk PPS Desa Bukit Harapan dikarenakan 1 (satu) orang tidak hadir dan 4 (empat) orang hanya mengisi absen dan tidak mengerjakan soal tes tetulis.

Keterangan :
- Bagi Peserta yang telah lulus tes tertulis akan melakukan tes wawancara bersama peserta dari Desa lain yang jumlah pendaftar perdesa/Kelurahan hanya 6 (enam);
- Tes wawancara akan dilakukan oleh KPU Kab. Tanjab Barat terhadap 20 Kel/114 Desa;
- Jadwal dan tempat Tes Wawancara PPS dijadwalkan pada hari sabtu tgl 24 s.d hari minggu 25 Februari 2018 pukul 09.00 wib di masing masing Kantor Camat yaitu sebanyak 13 Kecamatan.

17. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 pukul 09.00 Wib di 13 Kantor Camat se-Kabupaten Tanjab Barat KPU Tanjab Barat melakukan tes wawancara Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 20 Kelurahan dan 114 Desa untuk pelaksanaan Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat. Kegiatan wawancara dilakukan secara serentak oleh KPU Kab. Tanjab Barat, dengan Petugas sebagai berikut :

a. Di Kantor Camat Batang Asam : RENO, JUMIATI
b. Di Kantor Camat Betara : NOPRIADI, RUDI
c. Di Kantor Camat Bram Itam : Hj. NANIK MUSROFAH, SUGENG
d. Di Kantor Camat Kuala Betara :ALI , SUDARMADI
e. Di Kantor Camat Merlung : HAIRUDIN S.Sos, SAINI, MUKTI
f. Di Kantor Camat Muara Papalik : YENI, EKO
g. Di Kantor Camat Pengabuan : TAUFIK, S.Tr, NOVI
h. Di Kantor Camat Renah Mendaluh: AMIN, ANDRE, LATIF
i. Di Kantor Camat Seberang Kota : RAMA SEPYANA , FATIMAH, TABRANI
j. Di Kantor Camat Senyerang : SUTRISNO, S.Pd, S.AP, IRMA
k. Di Kantor Camat Tebing Tinggi : A. HADZIQ, SH.I, RETNO
l. Di Kantor Camat Tungkal Ilir : APNIZAL, S.Pt, TARI
m. Di Kantor Camat Tungkal Ulu : LEVI, NITA

18. Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat mengeluarkan pengumuman Hasil Tes Wawancara/Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk di 20 Kelurahan dan 114 Desa se Kab. Tanjab Barat Pada Pemilu 2019. Nomor Pengumuman : 81/PP.05-Pu/01/KPU-Kab/II/2018 tentang hasil seleksi penelitian administrasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu tahun 2019 di Kab. Tanjab Barat dengan hasil seleksi penelitian administrasi PPS,

19. Pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 KPU Kab. Tanjab Barat mengumumkan hasil tes wawancara calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang telah dilakukan wawancara susulan oleh KPU Kab. Tanjab Barat pada tanggal 1 s/d 2 Maret 2018 untuk 4 (empat) Desa yang masih kurang jumlah PPS nya dari 3 (tiga) orang hanya ada 2 (orang) Perdesa yang ada, karena pada saat tes wawancara serentak pada tanggal 24 Februari 2018 oleh KPU Kab. Tanjab Barat hanya dihadiri 2 (orang).

Keterangan :
dengan telah dikeluarkannya pengumuman tersebut diatas maka seluruh anggota panitia pemungutan suara (PPS) untuk di 20 Kelurahan dan 114 Desa Se Kab. Tanjab Barat terpenuhi 3 (tiga) orang Perdesa dan Kelurahan

20. Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 13.59 Wib bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Kab. Tanjab Barat dilaksanakan PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KAB. TANJAB BARAT PADA PEMILU 2019.

21. Pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Kegiatan Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Tungkal Ilir pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU Kab. Tanjab Barat dihadiri oleh :

22. Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 KPU Kab. Tanjab Barat melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Kelurahan dan Desa di 12 Kecamatan untuk Pemilu 2019 Kab. Tanjab Barat.

23. Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Hotel Syari'ah Jl. Prof. Sri Soedewi Kuala Tungkal KPU Kab. Tanjab Barat melaksanakan Rapat Koordinasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Tahun 2019 Kab. Tanjab Barat.

TRIWULAN II
BIDANG POLITIK

1. Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 pukul 09.30 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab.Tanjab Barat Dilaksanakan rapat paripurna pertama tentang Penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati Kab. Tanjab Barat tahun anggaran 2017

   Kegiatan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kab. Tanjab Barat, MULYANI SIREGAR, S.H.
   Didampingi oleh :
   1) Bupati Kab. Tanjab Barat Dr. Ir. H. SAFRIAL MS;
   2) Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat, Drs. H. AMIR SAKIB;
   3) Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat, FAISAL RIZA, S.T., M.M.

   Dihadiri oleh :
   1) Sekda Kab. Tanjab Barat, Drs. H. AMBOK TUO, MM;
   2) Danramil 419-02/ Tungkal ulu KAPTEN Inf. GUNAWAN;

3) Anggota DPRD yang Hadir sebanyak 26 Orang;
4) Para Asisten, staf Ahli, Kepala SKPD, Pejabat Eselon II, III, Kepala
Instansi Vertikal, BUMD, Perbankan.

2. Pada hari selasa Tanggal 03 april 2018 pukul 10.00 wib S/d 11.10 wib MUSRENBANG RKPD 2019 kab.Tanjung jabung barat di gedung pola kantor bupati Tanjab Barat dilaksanakan kegiatan Musrenbang RKPD 2018, dengan tema "PERWUJUDAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI PERCEPATAN KONEKTIVITAS WILAYAH GUNA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN". Acara MUSRENBANG RKPD 2019 di hadiri pejabat instansi terkait sebagai berikut :
   1) Bupati Tanjab Barat;
   2) Dandim 0419/Tanjab;
   3) Kabagren Polres Tanjab Barat;
   4) Ketua DPRD Tanjab;
   5) Kasi pidum Kejari Tanjab;
   6) Wakil Kepala pengadilan Tanjab;
   7) Sekda Tanjab;
   8) Pasi Ter kodim 0419/Tanjab;
   9) Kepala OPD Tanjab;
   10) Staf ahli bupati;
   11) Para asisten;
   12) Ibu ketua GOW Tanjab;
   13) Kepala basarnas propinsi Jambi;
   14) Tamu undangan Musrenbang RKPD 2019 Kab.Tajab Barat yang hadir.

3. Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Ruang Rapat Kesbangpol Kab. Tanjab Barat Dilaksanakan Rapat Bulanan Kominda. Kegiatan Dipimpin Oleh Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat Drs. H. R. AZIS MUSLIM, M AP.

   Dihadiri Oleh :
   1) Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab KAPTEN SUSENO;
   2) Perwakilan Imigrasi ADRIAN SOETRISNO;
   3) Perwakilan Kajari BOBBI MUHAMAD ALI SH. MH;
   4) Kesbangpol BUKRAN HADINATA SE;
   5) Satpol PP MUKHTAR Spd;
   6) Kesbangpol Topik;
   7) Polres Tanjab Barat BRIPKA ARIS .F.

   Hasil rapat kominda sbb :

1) Kab. Tanjab Barat mendapat Rangking 11 Pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Se Prov. Jambi
2) Beberapa Konflik lahan yg masih bergulir untuk terus dimonitor diantaranya :

a) Konflik lahan antara PT. CKT dengan KUD Tungkal Ulu.
b) Masyarat 5 (lima) dengan Koptas Kotalu Kec. Muara Papalik.

3) Saran agar apabila dilaksanakan Rapa masalah Konflik dapat mengundang Tokoh Agama, tokoh masyarakat dan tokoh Pemuda guna dapat memberikan masukan yang Positif;
4) Pada bulan Februari 2018 Imigrasi Kuala Tungkal mendeportasi Warga Negara China yang bekerja di Perusahaan Setia Mas Koko Kec. Bram Itam karena KITAS nya tidak sesuai;
5) Memonitor Tapal Batas antar Desa yg dapat menimbulkan Konflik;
6) Tahapan Pemilu 2019 dimana saat ini Panwaslu dan Panwascam sedang merekrut Panwas Kelurahan dan Desa.
7) Pada tanggal 21 April 2018 KPU RI dan KPU Prov dan Kab/Kota secara akan melakukan pagelaran seni menuju Pemilu 2019.
8) Permasalahan Listrik di Kab. Tanjab Barat yg belum stabil sehingga terdapat beberapa hearing yg dilakukan ileh oleh Aliansi Mahasiwa dan Ormas guna mempertanyakan Listrik di Kab. Tanjab Barat kepada PLN, DPRD maupun Pemda.
9) Adanya firal Video Puisi Sukmawati Soekarno Putri yg diduga berbau syara agar dipantau terhadap aksi solidaritas di Kab. Tanjab Barat
10) Memantau terhadap adanya makanan Sarden/Makarel yg mengadung Cacing Pita
11) Memonitoring beberapa efen kedepan di Pertengahan bulan April 2018 yaitu Simulasi penanganan Karhutla yg akan melakukan Workshop, Simulasi dan Terjun Payung oleh Kopaska dan Marinir di Lapangan Bhakti Karya Kuala Tungkal

4. Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 pukul 09.45 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab.Tanjab Barat Dilaksanakan rapat paripurna kedua tentang Penyampaian pemandangan umum oleh Anggota Dewan dengan membawakan suara

fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Kab. Tanjab Barat tahun anggaran 2017.

Kegiatan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kab. Tanjab Barat, MULYANI SIREGAR, S.H.
Didampingi oleh :
1) Bupati Kab. Tanjab Barat Dr. Ir. H. SAFRIAL MS;
2) Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat, FAIZAL RIZA, S.T., M.M;
3) Wakil Ketua II DPRD Kab. Tanjab Barat, A. JAHFAR, S.H.

Dihadiri oleh :
1) Sekda Kab. Tanjab Barat, Drs. H. AMBOK TUO, MM;
2) Dandim 0419/Tanjab , LETKOL ARH HARRY SASONO UTOMO, S.H;
3) Kabag Ren Polres Tanjab Barat, KOMPOL HOTMAIDA SIANTURI;
4) Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal , Drs. H. SENEN, S.Ag., M.H;
5) Anggota DPRD yang Hadir sebanyak 20 Orang;
6) Para Asisten, staf Ahli, Kepala SKPD, Pejabat Eselon II, III, Kepala Instansi Vertikal, BUMD, Perbankan.

Rangkaian kegiatan
1) Pembukaan
2) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3) Kata sambutan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat MULIYANI SIREGAR, S.H.
4) Penyampaian pemandangan umum oleh Anggota Dewan dengan membawakan suara fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Kab. Tanjab Barat tahun anggaran 2017, sebagai berikut :

a) Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Sdr. H. ASSEK;
b) Fraksi Partai PDIP disampaikan oleh Sdr. HAMDANI, S.E;
c) Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh DEDI HADI. S.H;
d) Fraksi PAN disampaikan oleh Sdr. H. NAZARUDIN;
e) Fraksi PKB disampaikan oleh Sdri, Hj. NUR ASIAH,S.Pd.I;
f) Fraksi Restorasi Keadilan oleh Sdr. AZIZ ROHMAN;
g) Fraksi Demokrat Hanura disampaikan oleh JAMAL DERMAWAN SIE, S.E.

Catataan : Pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 akan dilaksanakan kembali Rapat Paripurna Ketiga tentang Tanggapan Bupati terhadap pemandangan umun anggota Dewan dengan membawakan suara fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Kab. Tanjab Barat tahun anggaran 2017 serta

Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus DPRD Kab. Tanjab Barat terhadap LKPJ Bupati Kab. Tanjab Barat tahun anggaran 2017

5. Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 09.00 Wib di ruang rapat Kantor Badan Kesbangpol Tanjab Barat dilaksanakan rapat persiapan pemantapan pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Kecamatan di wilayah Kab. Tanjab Barat. Rapat dipimpin Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat R. AZIZ MUSLIM, M.AP serta dihadiri :

6. Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09. 00 Wib di Hotel Syariah Kuala Tungkal telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan dan Bimtek Panitia Pendaftaran Pemilih (pantarlih) pada pemilu 2018 di KPU Tanjab Barat. Kegiatan dipimpin anggota KPU Kab. Tanjab Barat Divisi hukum AHMAD HADZIQ, SH dan didampingi Komisioner dan para Kasubbag Sekretariat KPU Tanjab Barat serta dihadiri Sekretaris PPK yaitu masing - masing Sekcam, PPK Se Kab. Tanjab Barat berjumlah 39 orang dan Staf Sekretariat KPU Kab. Tanjab Barat. Kegiatan diisi dengan Paparan dan arahan komisioner menjelang Pencocokan dan Penelitian oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Coklit Pantarlih) mulai tanggal 17 April 2018 s.d 17 Mei 2018 sesuai PKPU RI No 5 tahun 2018 atas Perubahan PKPU RI No 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

7. Pada hari Selasa, 10 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gedung Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjab Barat telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kegiatan dipimpin oleh Bupati Tanjab Barat Ir. H. SAFRIAL,MS serta didampingi, Sekda Tanjab Barat Drs.AMBOK TUO, MM, Tim KPK AMALIA ROSANTI dan Kepala BKP-SDM Tanjab Barat Drs. ENCEP JARKASIH.

8. Pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di ruang Kantor DPRD Kab. Tanjab Barat telah dilaksanakan kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus RAPI Wilayah 03 Tanjung Jabung Barat 2018. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tanjab Barat Drs. H. AMIR SAKIB, yang di dampingi oleh Ketua RAPI 05

Daerah Jambi RITAS MAIRIYANTO, SE, dan Ketua RAPI 03 Kab. Tanjab Barat SAZLI FIRDAUS.

9. Pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib dilaksanakan kegiatan Bimtek PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pemilu Tahun 2018/2019 Se - Kecamatan Betara. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat.

10. Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertampat di depan Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Apel Kesiapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) untuk 10 (sepuluh) Kelurahan dan 2 (dua) Desa se Kec. Tungkal Ilir, kegiatan dipimpin oleh anggota KPU Prov. Jambi SANUSI serta dihadiri Komisioner, Sekretaris dan Staf Sekretariat KPU Kab. Tanjab Barat, PPK, PPS se Kec. Tungkal Ilir.

11. Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 09.20 Wib bertempat di Ex. Gedung serba guna Kuala Tungkal dilaksanakan Pagelaran Seni Budaya Menyongsong 1 (satu) tahun Pemilu Serentak 2019.
    Tema "Melalui Pagelaran Seni Budaya Membangun Pemilu Berdaulat Guna Mensukseskan Pemilu Serentak 2019".

12. Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 10.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Merlung dilaksanakan Sosialisasi Pemantapan Pemilu 2019 di Kab Tanjab Barat, dengan moderator Staf Kec. Merlung NORA serta pemberi Materi Sosialisasi sbb :
    1) Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat Drs. H. AZIZ MUSLIM, M.AP;
    2) Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt;
    3) Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I;
    4) KBO Sat Intelkam Polres Tanjab Barat IPDA EFRIYADI.

    Peserta Sosialisasi sebanyak 30 orang yang terdiri dari Staf Kantor Camat, Kades, Lurah, Tokoh masyarakat, tokoh agama. Setelah Pemberian materi dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab.

13. Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 10.30 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Tungkal Ulu dilaksanakan Sosialisasi Pemantapan Pemilu 2019 di Kab Tanjab Barat,

dengan moderator Sekcam Tungkal Ulu NANDA LIZA derta pemberi Materi :

14. Pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 14.30 Wib bertempat di Aula Rapat Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih 2019 untuk Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat.

    Rapat dipimpin oleh Anggota KPU Kab. Tanjab Barat SUROSO, S.Pt dan didampingi oleh Anggota KPU Kab. Tanjab Barat AHMAD HADZIQ, S.H.I

    Dihadiri oleh :
    a. TAUFIQURRAHMAN, S.H. (Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat);
    b. FERIZANO (Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat);
    c. HATTA HARAHAP (Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat);
    d. KIKI KARLINA (Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat);
    e. BRIPKA HARIS FADHILLAH (Ps. Kanit I Satintelkam Polres Tanjab Barat).

16. Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 10.23 Wib bertempat di aula Hotel Masa Kini Kuala Tungkal dilaksanakan RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PEMILU 2019 PEMILU SERENTAK 2019.

17. Pada hari Senin 30 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Paripurna Ke IV DPRD Kab. Tanjab Barat. Adapun rangkaian kegiatan sebagi berikut :

    a. Mendengarkan penyampaian laporan hasil kerja Pansus LKPJ tahun anggaran 2017 Kab. Tanjab Barat;
    b. Penetapan keputusan DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjab Barat tahun anggaran 2017;
    c. Tanggapan Bupati Tanjung Jabung Barat atas keputusan DPRD terhadap pelaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2017. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanjab Barat MULYANI SIREGAR, S.H.

    Didampingi oleh :
    a. Bupati Tanjab Barat Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS;
    b. Wakil Bupati Tanjab Barat Drs. H. AMIR SAKIB;
    c. Wakil Ketua II DPRD Kab. Tanjab Barat AHMAD JAHFAR, SH.

Dihadiri oleh :
a. Sekda Tanjab Barat, Drs. H. AMBOK TUO MM;
b. Anggota DPRD Kab. Tanjab Barat;
c. Para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Pejabat Eselon II dan III, Dirut BUMD, Instansi Vertikal dan Perbankan.

Hasil rapat Paripurna :
a. Laporan Pansus LKPJ T.A. 2017 Disampaikan oleh Anggota DPRD Kab. Tanjab Barat HAMDANI, SE;
b. Setelah Penyampaian Laporan Pansus oleh anggota DPRD Kab. Tanjab Barat terjadi Walk Out dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) karena Fraksi PAN menolak LKPJ Bupati;
c Ketua Fraksi PAN DPRD Tanjab Barat, H. NAZARUDDIN mengatakan menyampaikan :
1) Diduga ada permainan anggaran oleh tim Pemkab Tanjab Barat soal air bersih yang mana dalam pembahasan di banggar hanya terdapat satu paket pekerjaan berupa peningkatan akses jaringan air bersih air sebesar Rp 85 miliar, namun kenyataannya dilakukan pemecahan menjadi dua paket berupa peningkatan akses jaringan air bersih Rp 46,6 miliar, dan peningkatan kapasitas IPA dan Intake Tebing Tinggi Rp 36,6 Miliar tanpa adanya pemberitahuan ke banggar DPRD Tanjab Barat soal pemecahan;
2) Fraksi PAN merasa masukan tentang pansus LKPJ Bupati tidak diakomodir oleh Pansus LKPJ.

d. Selanjutnya Penyampaian Bupati Tanjab Barat :
1) LKPJ akhir Tahun 2017 selain merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai salah satu bahan evaluasi serta wahana antara eksekutif dan legislative untuk perbaikan di masa berikutnya baik dalam melaksanakan roda pembangunan maupun dalam menyusun LKPJ itu sendiri;

2) Pembangunan Daerah harus kita laksanakan secara serius dan bersama-sama serta saling bahu membahu pada semua lini, sehingga arah pembangunan kedepan kita upayakan pada hasil yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

BIDANG EKONOMI

1. Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Sekira Pukul 13.00 Wib Dilaksanakan Simulasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Masyarakat Maritim dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Tanjab Barat - Provinsi Jambi. Bertempat di Jl. Lintas Kuala Tungkal - Jambi Lapangan Desa Muntialo Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat.

   Rangkaian kegiatan sebagai berikut :
   1) Simulasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan pembacaan Narasi Simulasi berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulanganan Kebakaran Bencana bahwa penanggulangan bencana tidak terlepas dari 3 (tiga) Pilar yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Bahwa masyarakat membuka lahan dengan cara membakar semak belukar dengan harapan mempermudah pekerjaan, namun api cepat membesar sehingga sulit dikendalikan. Kejadian tersebut diketahui masyarakat dan langsung dilaporkan kepada Kepala Desa Muntialo dan Tim pemadam kebakaran;
   2) Pemadaman Api oleh BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, KMPA (Kelompok masyarakat peduli api), RPK PT. WKS, PT. Petro China Ltd, PT. MANDALA ENERGY INDONESIA, Manggala Agni dengan menggunakan Alat Pemadam kebakaran 1 unit Semprotan APAR dari PT. Mandala Energy Lemang dan unit Mesin Tohatsu V.82.
   3) Pelaksanaan Apel Konsolidasi Pasca Kebakaran dan Laporan dari masing-masing komandan regu pemadam kebakaran;
   4) Kegiatan Foto bersama TNI, POLRI, dan Instansi Terkait serta Regu simulasi pemadam kebakaran.

2. Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kantor Camat Tungkal Ilir Jl. Panglima H. Saman Kuala Tungkal, dilaksanakan Operasi Pasar LPG 3 KG oleh Agen Gas PT. RENRA JAYA UTAMA bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjab Barat.

   Kegiatan tersebut dalam rangka mengantisipasi terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg di wilayah Kec. Tungkal Ilir. Gas LPG 3 Kg yang disediakan untuk masyarakat sebanyak 560 Tabung dengan harga jual Rp. 18.000,-/Tabung untuk 1 KK.

3. Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di ruang rapat Bupati Tanjab Barat dilaksanakan rapat Tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka penyelesaian permasalahan Koptas Kotalu dengan masyarakat 4 Desa. Rapat tersebut dipimpin oleh Bupati Tanjab Barat Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS.

   Dihadiri oleh :
   1) Staf Ahli Hukum dan Pemerintah Ir. ERWIN;
   2) Asisten I HIDAYAT, S.H.;
   3) Asisten II Ir. AMDANI;
   4) Kadis Perkebunan dan Peternakan Tanjab Barat Ir. MAILAM BANGUN;
   5) Kepala Bappeda Tanjab Barat Ir. FIRDAUS KHATAB
   6) Kadis PMD PTSP YAN HERY;
   7) UPT KPHP Tanjab Barat DRI HANDOYO, S.H;
   8) Sekretaris Koperindag Tanjab Barat KAMALUDDIN;
   9) Kasatreskrim Polres Tanjab Barat AKP PANDIT WASIANTO;
   10) Pasiter Kodim 0419 Tanjab Kapten Inf ZULKARNAEN, S.H.;
   11) Kasatintelkam Polres Tanjab Barat IPTU DADANG SAPUTRA;
   12) Kasi Pidum Kajari Tanjab Barat ANGGA MAHATAMA, S.H.

   Dalam rapat tersebut masing-masing pihak menyampaikan :
   1) Bupati Tanjab Barat :
   a) Rapat dilaksanakan dalam rangka penyelesaian permasalahan Koptas Kotalu dengan masyarakat 4 Desa karena dikhawatirkan permasalahan ini dapat menyebabkan terjadi Konflik Horizontal;
   b) Salah satu tujuan pelaksanaan rapat yakni untuk membentuk Tim terpadu penanganan Konflik Sosial guna menentukan langkah yang dilakukan;
   c) Meminta agar mencari rumusan dalam rangka penyelesaian permasalahan seperti jumlah besaran ganti rugi imas tumbang dan bibit sesuai klasifikasinya;
   d) Terdapat perusahaan yang menguasai lahan 1.500 hektar dilahan yang diperuntukkan untuk Koptas Kotalu;
   e) Pada tahap awal, penyelesaaian permasalahan difokuskan pada lahan yang saat ini dikuasai oleh PT. RATNA SERUNI.

   2) Kadis Perkebunan dan Peternakan :

a) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjab Barat telah beruoayan untuk menghubungi Ibu TITIN/pemilik lahan 1.500 hektar namun hal tersebut itdak direspon;
b) Besaran ganti rugi imas tumbang Rp. 1.000.000,-/hektar, bibit bersertifikat Rp. 37.000,-/batang dan tidak bersertifikat Rp. 20.000,-/batang;
c) Dalam rangka penyelesaian permasalahan maka sepakat untuk dibentuk Tim terpadu penyelesaian konflik.

3) Kasatreskrim Polres Tanjab Barat :

a) Saat ini Polres Tanjab Barat masih melakuka penyelidikan terkait dengan laporan Koptas Kotalu terkait dugaan perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik namun hal ini tentunya memerlukan proses dan waktu;
b) Polres Tanjab Barat sepakat untuk dibentuk Tim terpadu penanganan Konflik sosial.

4) Asisten I Setda Tanjab Barat :
a) Menyarankan agar dilakukan pertemuan antara masyarakat 4 Desa dengan Tim terpadu penanganan konflik sosial;
b) Tim terpadu penanganan konflik sosial agar turun untuk mencari data fakta terkait permasalahan.

Kesimpulan Rapat :
1) Tim terpadu membentuk tim kecil melakukan pendataan untuk memperoleh Informasi pendahuluan terkait konflik penguasaan lahan peruntukan Koptas Kotalu, unsur tim kecil mewakili masing-masing anggota tim terpadu;
2) Berdasarkan laporan tim kecil, tim terpadu akan melakukan rapat pembahasan hasil data yang diperoleh dari tim kecil dan melakukan inventarisasi masyarakat/kelompok yang menguasai lahan peruntukkan Koptas Kotalu;
3) Dari hasil inventarisir, Tim terpadu akan memanggil secara bertahap masyarakat/kelompok yang menguasai lahan peruntukkan Koptas Kotalu guna membahas lahan yang dikuasai.
4) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi agar memproses masyarakat/kelompok yang menguasai lahan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
5) Tim terpadu akan mencari rumusan-rumusan untuk mencari solusi penyelesaian Konflik.

Kegiatan selesai sekira pukul 16.00 Wib berjalan lancar.

4. Pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib diruang rapat kerja wakil Bupati Tanjab Barat dilaksanakan rapat pembentukan tim satuan tugas pangan Kab. Tanjab Barat. rapat tersebut dipimpin oleh Asisten II Kab. Tanjab Barat Ir. AMDANI.

1. Kegiatan tersebut dihadiri oleh :
a) Kadis ketahanan pangan Drs. M. H. ASBI ASSDIQIQI;
b) Kadiskoperindag SYAFRIWAN, SE;
c) Kepala Inspektorat Kab. Tanjab Barat GATOT SUWARSO;
d) Kepala Sufdivre Bulog Kuala Tungkal TOMMY WIJAYA;
e) Sekdis Bunak Kab. Tanjab Barat FATMAWATI;
f) Sekertaris Badan Kesbangpol PONDI SAYUTI;
g) Dinas kesehatan KHAINA DEWIANA;
h) Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab LETDA M. AZHAR ALAMSYAH;
i) Dinas Kelautan dan Perikanan RIKA. S;
j) Kasat Pol PP SYAMSUL JAUHARI.

2. Hasil rapat sebagai berikut :
a) Rapat dilaksanakan dalam rangka membahas draf SK Bupati Tanjab Barat tentang pembentukan Tim Satgas pangan Kab. Tanjab Barat;
b) Setelah draf SK tentang pembentukan Tim Satgas pangan Kab Tanjab Barat disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Tanjab Barat selanjutnya akan dilaksanakan rapat mekanisme pelaksanan tugas Satgas pangan Kab Tanjab Barat.

5. Pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Ruang Rapat Bupati Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Tim Terpadu penanganan konflik sosial membahas tentang permasalahan antara Koptas Kotalu masyarakat 4 Desa. Rapat dipimpin oleh Bupati Tanjab Barat Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS dan dihadiri oleh :

1. Asisten I Kab Tanjab Barat HIDAYAT, SH , MH;
2. Asisten II Kab. Tanjab Barat Ir. AMDANI;
3. Kabagops Polres Tanjab Barat KOMPOL R.P NAINGGOLAN;
4. Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal BOBBI MUH ALI, S.H., M.H;
5. Staf ahli Bidang hukum dan pemerintahan Kab. Tanjab Barat Ir. H. ERWIN;

6. Kadis PMPTSP YAN ERY;
7. Kadis Bunak MELAM BANGUN;
8. Kasi Perencanaa dan kawasan UTPD KPHP Tanjab Barat LIYANTO BAHRI;
9. Kasatreskrim Polres Tanjab Barat AKP PANDIT WASIANTO, S.I.K., M.H;
10. Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab LETDA M. AZHAR;
11. KBO Satintelkam Polres Tanjab Barat IPDA EFRIYADI.

Hasil rapat :

1. Tim kecil yang diketuai oleh Kepala badan Kesbangpol yang terdiri dari perwakilan anggota Tim terpadu bersama Dinas kehutanan Provinsi Jambi akan segera melakukan pendataan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018, pendataan difokuskan kepada PT. RATNA SERUNI!
2. Informasi kepada Sekwan DPRD Tanjab Barat ke 4 (empat) Kades (Kades Sungai rotan, Kades sungai paur, Kades Lampisi, dan Kades Cinta Damai) yang mengikuti kegiatan Anggota dewan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI Jakarta, tidak diundang oleh DPRD termasuk kehadiran ke 4 (empat) Kepala Desa ke Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Kadis PMD, Inspektur dan Kabag Hukum mengkaji dan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas tindakan yang dilakukan 4 Kepala Desa, termasuk menindaklanjuti teguran yang telah diberikan kepada 4 Kades diatas;
4. Tim kecil diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat, dengan Anggota terdiri dari perwakilan anggota Tim terpadu, bersama Dinas kehutanan Provinsi Jambi akan melakukan pendataan dimulai pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018.

BIDANG BUDAYA

1. Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor DPRD Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Kerja Gabungan Komisi I,II,III DPRD Kab. Tanjab Barat dengan Laskar Pengawal Negri (LAPEN), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), AMPU (Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Bersatu), terkait Permasalahan listrik di Kab. Tanjab Barat.

Tuntutan Aksi :

1. Pemadaman Listrik Yang sering terjadi pada wilayah Kab. Tanjab Barat;
2. Pelayanan kualitas listrik yang belum memadai bagi masyarakat Kab. Tanjab Barat (Tegangan listrik yang tidak stabil);
3. Hal - hal lain yang dianggap perlu terkait dengan permasalahan listrik.

Rapat di pimpin Oleh : Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat FAISAL RIZA, S.T., M.T., didampingi oleh HAMDANI, Ketua Komisi II AMBOK ANGKA, S.H., H. SAIFUDIN, Anggota DPRD ,BUDI AZWAR, JAMAL DARMAWANSIE, S.E., HERI JUANDA, ASSEK,

Hadir dalam Kegiatan :

- Sekda Kab. Tanjab Barat AMBOK TUO, MM;
- Asisten JETER SIMAMORA;
- Asisten Ir. AMDANI;
- Kabag SDA SUPARTI;
- Kasat Intel Polres Tanjab Barat IPTU DADANG SAPUTRA;
- Kapolsek Tungkal Ilir IPTU SUMARNO BERUTU, S.H,
- KBO Sat Intelkam Polres Tanjab Barat IPDA EFRIYADI;
- Kabag SDA SUPARTI;
- Kasi Pem Kec. Tebing Tinggi KUNARDI;
- Dinas ESDM Prov. Jambi EKO PANDIO HADI;
- Perwakilan PT. Petro China, LASNO, GERARD MAYOL,
- SKK Migas, Humas MUHAMMAD AGUS, SOFIAN HADI,
- PT. TJP (Tanjung Jabung Tower), DIKY RIYADI,
- Perwakilan PLN UPPJ (Unit Pelaksana Proyek Jambi) EKO RAMKO, RIZKY FAUZIAN;
- Perwakilan dari PT. TJP, GATOT PRAWIRO
- PLN Kuala Tungkal , Manager TASILI,
- Korlap aksi Ormas LAPEN M. IKIN, ERWIN, WAWAN, ALIF;
- Ketua Ormas ANPU, AHMAD FAUZI;
- Demisioner HMI Cabang Kab. Tanjab Barat ABDUL KADIR HAMKA;
- LSM Jaguar, AGUS;
- Para anggota ormas ± 40 orang

Hasil Hearing :

1. Ketua DPRD menanyakan kepada Pihak PLN :

- Kapan tegangan listrik di PLN bisa normal;
- Terkait ganti rugi tolong diperjelaskan;
- Apakah kerusakan elektronik bisa diganti.

2. Manager PLN Kab. Tanjab Barat TASILI :
- Terkait tegangan listrik bisa normal kembali pihak PLN menyampaikan akan di bangunya Gardu Induk di wilayah Kab. Tanjab Barat dan ± 76 Tower akan berada di Kab. Tanjab Barat sedang dalam proses perizinan;
- Pada tahun 2019 Kab. Tanjab Barat akan ada gardu Induk di Kuala Tungkal dan Pelabuhan Dagang;
- Hingga saat ini PLN Kuala Tungkal masih tergantung dengan Gardu Induk Muara Sabak sehingga untuk menormalkanya PLN Kuala Tungkal menghidupkan genset;
- Saat ini PLN Kuala Tungkal mengharapkan PT.TJP untuk dapat menormalkan arus listrik di Kuala Tungkal;
- Terdapat 4 Item yang bisa mendapatkan Kompensasi yang diberikan PT. PLN Yaitu : Lamanya padam, Banyaknya Padam, Terjadi kesalahan, dan Tingkat Mutu Pelayanan.

3. Penyampaian dari Perwakilan masyarakat :
- Selama tahun 2018 telah terjadi 10 peristiwa kebakaran yang di akibatkan oleh korsleting listrik.
- Di Kab. Sarolangun pernah terjadi krisis listrik namun Pemkab Sarolangun mempunyai inisiatif yang berkerja sama dengan perusahaan membangun PLTG sehingga saat ini Listrik di sarolangun kembali normal.
- HAMKA (HMI) : PLN tidak bisa menganti rugi.

4. Perwakilan dari PT. TJP (Tanjung Jabung Power) GATOT PRAWIRO :
- Pembangunan gardu induk sudah 99 % akan tetapi banyaknya alat yang di impor dari luar negri dan membuat lambatnya pembangunan gardu tersebut;
- PT. PJP berjanji akan menyumplai paling lambat akhir april.

Kesimpulan Rapat :
- Bahwa Pemda sudah menyiapkan lahan di bukit 3 beradik di pematang lumut.
- Pemda sudah menyiapkan lahan tapi tidak digunakan oleh PT.TJP dan PT. TJP memakai lahan PT. TJP.
- Disarankan kepada masyarakat untuk menggugat Closh Action;
- Bahwa PT. TJP pembangunan sudah 99 % ,DPRD dapat meninjau ke lapangan untuk menyelesaikan pada akhir bulan april 2018;

- PT. TJP berkomitmen paling lambat pada tanggal 30 april 2018 sudah siap menyiplai energi listrik ke PT. PLN dan PT.PLN wajib menormalkan tegangan listrik ke masyarakat, apabola pada sampai tanggal 30 april 2018 PT. TJP tidak dapat menyuplai listrik, maka PT. PLN bertanggung jawab penuh untuk mencari solusi dari permasalahan listrik tersebut;

2. Pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Mts Raudatul Islamiyah dilaksanakan Pembukaan "Festival Anak Sholeh Indonesia 2018 Se Kab. Tanjab Barat dan sebagai Tuan Rumah Pelaksana adalah Kec. Bram Itam. Dengan Thema "Bina Santri Jujur, Amanah dan Ramah"

Kegiatan di buka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Kab. Tanjab Barat Drs. MUHAMMAD ARIF,MM.

Dihadiri oleh :
- Waka Polres Tanjab Barat KOMPOL HENRY AGUS BATUBARA;
- Kabag AKRK Setda Kab. Tanjab Barat HIDAYAT KASUMA,S.Sos.I;
- Camat Bram Itam HENDRY FONDA,S.TP.M.A;
- Danramil 0413/Kuala Tungkal
- Lurah Desa Pembengis MUHAMMAD TAHER;
- Ketua Panitia Pelaksana Ketua BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia Kec. Bram Itam Ustad ZULHAM,S.Pd.I;
- Para Dewan Juri 30 Orang;
- Panitra 6 Orang;
- Para peserta lomba ± 500 orang.

3. Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 mulai pukul 08.00 Wib bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjab Barat dilaksanakan kegiatan Pembukaan Pelatihan Masyarakat Maritim Penanggulangan Kebakaran Hutan Lahan Gambut Kab. Tanjab Barat - Prov. Jambi.

4. Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Mts Raudatul Islamiyah dilaksanakan Penutupan "Festival Anak Sholeh Indonesia 2018 Se Kab. Tanjab Barat dan sebagai Tuan Rumah Pelaksana adalah Kec. Bram Itam dengan Thema "Bina Santri Jujur, Amanah dan Ramah".

5. Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Syariah Kuala Tungkal dilaksanakan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni HMI (KAHMI) Tanjung Jabung Barat masa bakti 2017-2022, dengan tema "*Mempertegas peran KAHMI untuk Tanjung Jabung Barat yang lebih baik*". Hadir dalam kegiatan :

a) Bupati Tanjab Barat Dr. H. SAFRIAL, MS;
b) Wakil Bupati Tanjab Barat Drs. H. AMIR SAKIB;
c) Kepala Pengadilan Negeri Kuala Tungkal AHMAD PETENSILI, S.H., M.H.;
d) Staf Ahli bidang Politik dan Pemerintahan M. ARIF;
e) Sekretaris KAHMI Nasional MANIMBANG KAHARIADI;
f) Ketua Majelis Wilayah KAHMI Prov. Jambi Dr. dr. H. MAULANA, M.KM;
g) Ketua Umum Korps Alumni KAHMI Tanjab Barat AHMAD JAHFAR, S.H.;
h) Kadis PU Tanjab Barat ANDI AHMAD NUZUL;
i) Kadis Bappeda Tanjab Barat YON HERI, S.Pm.;
j) perwakilan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Kota Jambi;
k) perwakilan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Muaro Jambi;
l) Pasi Ter Kodim 0419/Tanjab KAPTEN INF. ZULKARNAEN;
m) KBO Satintelkam Polres Tanjab Barat IPDA EFRIYADI;
n) Ketua KNPI Tanjab Barat SUPRAYOGI SAIFUL, S.IP.;
o) peserta ± 70 orang.

6. Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Stadion Karya Bhakti Kuala Tungkal telah dilaksanakan giat Geladi Kotor Pelepasan Penerjun Payung Oleh TNI AL dalam rangka Penutupan Pelatihan Masyarakat Maritim Penanggulangan Kebakaran Hutan Lahan Gambut Kab. Tanjab Barat - Prov. Jambi tahun 2018.

7. Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Stadion Karya Bhakti Kuala Tungkal dilaksanakan Penutupan Loka Karya Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran Hutan Lahan Gambut Kab. Tanjab Barat - Prov. Jambi tahun 2018.

8. Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Alun-alun Kota Kuala Tungkal dilaksanakan pawai obor dalam rangka memperingati hari lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

yang ke 58 yang diselenggarakan oleh PMII Cabang Kab. Tanjab Barat dan Remaja Mesjid Agung Kuala Tungkal, dengan hasil sebagai berikut :

BIDANG POLITIK

1. Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 pukul 09.15 Wib bertempat di Aula Hotel Syariah Kuala Tungkal dilaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Menuju Pemilu Serentak 2019.

2. Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Rumah Dinas Bupati Tanjab Barat dilaksanakan kegiatan Coffe Morning antara Pemda Tanjab Barat bersama DPRD Tanjab Barat dalam rangka meningkatkan Silahturahmi.

3. Pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 09.50 Wib bertempat di Aula Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Kursus Kepemiluan Menuju Pemilu Serentak 2019 kegiatan di pimpin oleh Anggota KPU Kab. Tanjab Barat AHMAD HADZIQ, SH.I

4. Pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pukul 11.00 Wib Bertempat di Kantor Desa Sungai Dungun Kec. Kuala Betara dilaksanakan KURSUS KEPEMILUAN MENUJU PEMILU SERENTAK 2019

5. Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 pukul 09.30 Wib bertempat di aula kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan kursus kepemiluan menuju Pemilu serentak 2019. kegiatan di pimpin oleh ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt.

6. Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wib telah dilaksanakan kegiatan arahan KPUD Provinsi. Jambi Korwil Tanjab Barat didampingi KPUD Tanjab Barat Korwil Betara tentang coklit data pemilih Pemilu DPR/DPR Prov/DPR Kab dan Presiden tahun 2019.bertempat di sekretariat PPS Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat.

BIDANG EKONOMI

1. Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Bupati Tanjab Barat telah dilaksanakan Pengukuhan Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2018 s.d 2020.

2. Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kantor Diskoperindag (Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan) Kab. Tanjab Barat dilaksanakan rapat dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan akan diadakan Pasar Beduk dan Pasar Obral.

3. Pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib di Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat telah dilaksanakan kegiatan peluncuran badan usaha milik desa (bumdesa) plus di Desa Dataran Kempas kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab barat.

4. Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 14.20 Wib bertempat di ruang rapat Bupati Tanjab Barat dilaksanakan Rapat menindak lanjut pengecekan lapangan oleh Tim Kecil dalam rangka fasilitasi penguasaan lahan peruntukan Koptas Kotalu di Kec. Renah Mendaluh.

5. Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jln. Melati simpang JK dilaksanakan Pembukaan Pasar Beduk Kuala Tungkal Ramadhan 1438 H/2018 M.

Pembukaan di buka oleh Bupati Kab. Tanjab Barat Dr. Ir. H. SAFRIAL,MS beserta Isteri;

6. Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Timdu Penanganan Konflik Sosial Kab. Tanjab Barat melakukan pengecekan koordinat Lahan Koptas Kotalu di Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjab Barat.

BIDANG BUDAYA

1. Pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Lapangan TKD KM 2.5 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat

dilaksanakan perayaan hari buruh sedunia/MayDay 2018 dengan Tema "UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) MENUJU PELAKSANAAN UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATEN (MKSK) TANJAB BARAT.

2. Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjab Barat dilaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) Kab. Tanjab Barat.

4. Pada hari ini Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Pesantren Riyadhus Shalihin telah dilaksanakan giat Haul Syekh M. DAUD ARIF dan Haul Jama'.

5. Pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 06.55 wib bertempat di Vihara Budhayana Jln. Prof. Sri Soedewi dilaksanakan Jalan Santai Umat Budha dalam rangka menyambut hari Raya Waisak yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018.

6. Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Gedung Pola Kantor Bupati Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Kordinasi Angkutan Lebaran 1439 H/2018 M.

Rapat dipimpin oleh Asisten II Pemkab Tanjab Barat Ir. AMDANI didampingi oleh Kadis Perhubungan Drs. ENDANG SURYA, ALMARDI S.E., dan Kabagops Polres Tanjab Barat KOMPOL R.P. NAINGGOLAN.

7. Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah Dinas Bupati Tanjab Barat dilaksanakan "Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Jambi Beserta Rombongan Di Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ke Tujuan Tahun 2018.
8. Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor PT. Paramarta Jl. Parit Lapis Tomo Kec. Betara Kab. Tanjab Barat berlangsung aksi Unras oleh Ormas IPI dan Ormas Rajawali sakti sesuai dengan surat pemberitahuan aksi nomor : 0103/B/SP/DPC-IPI/TJB/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018.

BIDANG POLITIK

1. Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Pukul 16.00 wib bertempat di Kantor DPD Partai Berkarya Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) Partai Berkarya Kab. Tanjab Barat. Kegiatan dihadiri oleh :
2. Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 mulai pukul 10.00 wib s/d 13.30 wib Telah Dilaksanakan Rapat Pleno Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Betara sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Aula Kantor Camat Betara.

3. Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 mulai pukul 10.00 wib s/d 13.30 wib Telah Dilaksanakan Rapat Pleno Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Kuala Betara sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Aula Kantor Camat Kuala Betara.
4. Pada hari Kamis Tanggal 14 Juni 2018 pukul 10.15 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Tebing Tinggi di laksanakan rapat Pleno DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran) Pemilihan umum Tahun 2019 oleh PPK Kec. Tebing Tinggi.

5. Pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 Pukul 20.43 Wib bertempat di Hotel Rivoli Jl. Prof. Sri Soedewi Kuala Tungkal dilaksanakan RAPAT PLENO TERBUKA Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

BIDANG EKONOMI

1. Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 09.40 wib di Gedung Pola Atas Kantor Bupati Tanjab Barat telah dilaksanakan rapat Kordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, rakor tersebut dipimpin oleh Bupati Tanjab Barat Dr. Ir. H. Safrial. MS sidampingi oleh Dandim 0419/Tanjab, Letkol Inf ARRY YUDISTIRA S.I.P., M.I.Pol., Kapolres Tanjab Barat diwakili Kabag Ops Polres Tanjab Barat Kompol R.P. NAINGGOLAN, Sekda Tanjab Barat, Drs. H. AMBO TUO, MM dan BMKG Prov Jambi dihadiri Asisten Tiga Setda Tanjab Barat, Pasi Intel Kodim

0419/Tanjab, Pasi Ops Kodim 0419/Tanjab, Pasi Ter Kodim 0419/Tanjab, Danunit Intel Kodim 0419/Tanjab, Danramil 02 Tungkal Ulu, Danramil 03 Tungkal Ilir, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD Tanjab Barat, BPBD Tanjab Barat, UPTD Dinas Kehutan Tanjab Barat, Tagana Tanjab Barat dan para undangan.

BIDANG BUDAYA

1. Pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ex. Gedung Runtuh Jln. Patunas Dilaksanakan Tabligh Akbar dan Aksi Bela Palestina Houl Abuya Assayid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Milad Ke-4 Front Pembela Islam Tanjab Barat.

2. Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Exs. Gedung Runtuh Kuala Tungkal Jln. Patunas dilaksanakan Silaturahmi Dan Buka Bersama Ceo PT. Nazmira Resources Bapak M. YUSUF.S.Si Dengan Masyarakat Kuala Tungkal Serta Santunan Anak Yatim Dan Kaum Duafa.

3. Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Depan Rumdin Bupati Tanjab Barat dilaksanakan Pawai Takbiran Keliling Idul Fitri 1439 Hijriah / 2018 Masehi dengan tema " mari hindarkan diri dari segala perilaku buruk, serta kita tingkatkan persatuan dalam bingkai NKRI yang berketuhanan yang maha esa dan berkehiduoan damai di Tanjab Barat.

TRIWULAN III

4. Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 Pukul 09.15 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Paripurna Ke 2 :

- Penyampaian Pemandangan umum oleh Anggota Dewan dengan membawakan suara Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Tanjab Barat T.A. 2017

- Penetapan Panitia Khusus DPRD Kab. Tanjab Barat terhadap LKPD T.A. 2017.

Rapat Paripurna Selesai sekira Pukul 11.00 Wib berjalan lancar

5. Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Pukul 09.30 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Paripurna Pertama :

6. Pada pada hari Senin, 16 Juli 2018 sekira Pukul 08.15 Wib telah berlangsung RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN KEPALA DESA Se Kabupaten Tanjab Barat bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjab Barat.

   Kegiatan dibuka oleh : Bupati Tanjab Barat Ir. H. SAFRIAL, MS

Didampingi oleh :
- Wakil Bupati Drs. H. Amir Sakib
- Asisten I Setda Tanjab Barat
- Sekretaris Dinas PMD, Indarto

Giat dihadiri oleh :
- Seluruh Camat SeKabupaten Tanjab Barat
- Seluruh Lurah/Kepala Desa SeKabupaten Tanjab Barat

Giat diawali dengan :
- Pembukaan oleh Protokol
- Kata Sambutan Bupati Tanjab Barat :
- Rapat Koordinasi Pembinaan Kepala Desa ini digelar dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara Pemerintah Desa,Kecamatan, \dan Pemerintah Daerah, serta sebagai wahana untuk saling bertukar informasi.
- Penyelenggara Pemerintah desa mulai dari Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- Pemerintahan Desa dituntut untuk dapat menyusun rencana kerja pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi keuangan desa. "Pemenuhan pelayanan dasar, sarana dan prasarana desa, serta pengembangan ekonomi lokal desa harus menjadi perhatian pemerintah desa".
- Dalam bidang pembinaan masyarakat, pemerintah desa dituntut untuk membina keamanan, ketertiban, ketentraman dan memelihara kerukunan. Begitu pula dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Bupati

berharap pemerintah desa dapat memfasilitasi kelompok - kelompok masyarakat melalui pelatihan usaha ekonomi, pendayagunaan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat, kelompok usaha, kelompok tani, dan lainnya.

- Terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak di 15 Desa yang akan dilaksanakan di Tahun 2018 ini, Bupati berharap Kepada Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa untuk dapat berperan aktif untuk ikut serta mensukseskan kegiatan tersebut.

Kegiatan selesai sekira Pukul 09.25 WIB berlangsung aman dan lancar.

7. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Pengajuan Bakal Calon anggota Legislatif DPRD Kab. Tanjab Barat dalam Pemilu 2019 oleh Parpol.

8. Pada hari rabu, 18 juli 2018 pukul 09.50 wib telah dilaksanakan Rapat paripurna DPRD Ketiga bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Tanjab Barat. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjab Barat, Faizal Riza, ST, MM serta didampingi oleh Bupati Tanjab Barat, Dr. Ir. H. Safrial, MS dan Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Mulyani Seregar, SH dan Ahmad Djafar, SH.

9. Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Pukul 09.15 Wib bertempat di Gedung PKK Kab. Tanjab Barat Jl. Panglima Cama Kuala Tungkal dilaksanakan SOSIALISASI PP RI No 1 TAHUN 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PP RI Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol dan PERMENDAGRI No 36 TAHUN 2018 Tentang Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan parpol.

13. Pada hari Kamis, 19 Juli 2018, sekira pukul 09.00 WIB telah berlangsung lanjutan rapat Paripurna ketiga tentang Agenda Tanggapan Bupati atas Pemandangan Umum Anggota Dewan terhadap 4 Raperda Inisiatif Pemkab Tanjab Barat dan Penyampaian Fraksi-Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap 1 Raperda Inisiatif DPRD

serta pembentukan Panitia Khusus DPRD terhadap 5 raperda tersebut bertempat di gedung Rapat DPRD Tanjab Barat.

14. Pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 Pukul 14.35 Wib bertempat di Kantor KU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Tahapan Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Parpol Peserta Pemilu di Kab. Tanjab Barat
15. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 Pukul 09.15 Wib bertempat di Hotel Masa Kini Kuala Tungkal dilaksanakan RAPAT PLENO TERBUKA Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

BIDANG EKONOMI

1. Pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Pukul 07.30 wib bertempat di Lahan TKD Km. 2, 5 Kel. Tebing Tinggi kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat dilaksanakan pengecekan lokasi Pembangunan Pasar Tradisional Modern oleh Bupati Tanjab Barat DR. Ir. H. SAFRIAL, MS didampingi :

1) Kadis KUKM Perindag Tanjab Barat SYAFRIWAN, S.E.;
2) Camat Tebing Tinggi ARDIANSYAH, S.E.;
3) Kasubsektor Tebing Tinggi IPDA WS. JATMIKO;
4) Babinsa Tebing Tinggi SERDA TRI.

Pengecekan tetsebut dalam relokasi pasar lamat ke lokasi yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, kegiatan selesai pukul 09.00 Wib berjalan tertib dan lancar.

BIDANG BUDAYA

1. Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 mulai pukul 09.45 wib di Dermaga Pelabuhan RORO Kuala Tungkal dilaksanakan kegiatan Bhakti Sosial Penanaman Mangrove dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke - 58 tahun 2018 dan HUT Ikatan Adhyaksa Darmakarini ke - 18 tahun 2018.

Giat dihadiri oleh :
- Plt. Gubernur Jambi Drs. H. FACHRORI UMAR, MM.

- Kajati Prov. Jambi ANDI NURWINAH, SH, MH
- Dirkrimsus Polda Jambi KBP I KOMANG SANDI ARSANA, S. IK, MH.
- Kabag Ops BINDA Prov. Jambi KOLONEL INF. ARMANSYAH, SH.
- Bupati Tanjab Barat DR. Ir. H. SAFRIAL, MS.
- Ketua DPRD Tanjab Barat FAISAL RIZA, ST, MM.
- Kapolres Tanjab Barat AKBP A. D. G. SINAGA, S. IK.
- Dandim 0419 Tanjab LETKOL INF. ARRY YUDHISTIRA, S. IP, M. Pol.
- Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal AHMAD PETENSILI, SH.
- Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal SENEN, S. Ag.
- Kajari Kuala Tungkal TRI JOKO, SH.
- Kepala Kejaksaan Negeri Se-wilayah kerja Kejati Prov. Jambi.
- Para Staf Ahli, Asisten dan OPD Pemkab Tanjab Barat.
- Pengurus Ikatan Adhyaksa Darmakarini Kejati Jambi.
- Ketua TP PKK Kab. Tanjab Barat.
- Ketua Cabang Yayasan Bhayangkari Polres Tanjab Barat.
- Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0419 Tanjab.

2. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Aula Hotel Ar-Riyadh Kuala Tungkal dilaksanakan kegiatan Seminar oleh Korps HMI-Wati Kab. Tanjab Barat dengan tema "Peran Perempuan Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikal dan Terorisme di Kab. Tanjab Barat"

BULAN AGUSTUS 2018
BIDANG POLITIK

1. Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Aula Kantor Desa Mandala Jaya Kec. Betara Kab. Tanjab Barat telah dilaksanakan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mandala Jaya, Desa Muntialo dan Desa Lubuk Terentang Kec. Betara Kab. Tanjab Barat Periode 2018 - 2024.
2. Pada hari Kamis, 2 Agustus 2018, sekitar Pukul 10.15 Wib dilaksanakan rapat Rapat Paripurna Keempat dan Pertama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Ruang Rapat Kantor DPRD Tanjab Barat.

3. Pada hari Jum'at tanggal 3 Agusus 2018 Pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Koordinasi tentang Rencana lanjutan Sosialisasi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Kecamatan wilayah Kab. Tanjab Barat

4. Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 pukul 09.30 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Tebing Tinggi dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT.

5. Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 pukul 10.30 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Batang Asam dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT.

6. Pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 09.55 Wib di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangkaian memperingati HUT Kab. Tanjab Barat Ke 53 Tahun 2018. Kegiatan dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat FAIZAL RIZA, ST, MM didampingi oleh Plt. Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekda Prov. Jambi Bpk. M. DIANTO, M.Si., Bupati Kab. Tanjab Barat Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS dan Wakil Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat AHMAD JAHFAR, SH dan dihadiri :

1) Unsur Forkompimda;
2) Mantan Bupati Kab. Tanjab Barat Periode 2006 - 2011 dan 2011-2016 Drs. H. USMAN ERMULAN, MM;
3) Mantan Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat Periode 2011-2016 KATAMSO SA, SE, ME;
4) Mantan Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat SAFRUDIN EFENDI;
5) Mantan Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat H. UMAR IBRAHIM, SH;
6) Anggota DPRD Prov. Jambi Dapil Kab. Tanjab Barat dan Kab. Tanjab Timur SAINUDIN;
7) Anggota DPRD Prov. Jambi Dapil Kab. Tanjab Barat dan Kab. Tanjab Timur SILABAN;
8) Anggota DPRD Kab. Tanjab Barat;
9) Para Asisten, Staf ahli, Kepala OPD, Para Camat, Pejabat Eselon II dan III, Instansi Vertikal, Dirut BUMD, Dirut Perbankan;
10) Undangan diantaranya : Pimpinan Parpol, Ketua KPU, MUI, FKUB;

11) Istri Sekda Prov. Jambi, Istri Bupati, Istri Ketua dan Wakil DPRD, Istri Forkompimda, Istri Mantan Bupati dan Wakil Bupati, Istri dan Suami Anggota DPRD, Tim Penggerak PKK, GOW.

Susunan Acara :

1) Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
2) Sambutan Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat menyampaikan diantaranya :

a. Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa tahun ini tidak ada pidato Bupati Kab. Tanjab Barat dan akan disampaikan pada Upacara HUT ke 53 tahun pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 di lapangan Kantor Bupati Kab. Tanjab Barat;
b. HUT Ke 53 tahun merupakan tahun ke 3 kepemimpinan Bupati Kab. Tanjab Barat Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS dan Wakil Bupati Drs. H. AMIR SAKIB;
c. Mengajak segala pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat untuk bersama sama berkarya membangun Tanjab Barat sesuai Visi dan Misi Bupati demi kemajuan Tanjab Barat;
d. Dengan bertambah usia Tanjab Barat maka hendaknya bertambah dewasa pula perilaku untuk membangun Tanjab Barat;
e. Kondisi Perekonomian dihadapi dengan situasi global yang fluktuatif dengan menurunnya harga minyak dan Kelapa yang berdampak di daerah;
f. Ditahun ke 3 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati telah mengalami peningkatan dibidang air bersih oleh sebab itu DPRD mengapresiasi;
g. Mengapresiasi kepada Pemda yg mana sebelumnya mendapat prediket Descliemer dari BPK RI namun meningkat menjadi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berharap kedepan mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
h. Penghargaan yg setinggi tingginya kepada Putra dan Putri Kab. Tanjab Barat yang berhasil meraih prestasi di Tingkat Nasional maupun Internsional;
i. Penghargaan khusus diberikan Kepada Kapolres Tanjab Barat AKBP A.D.G. SINAGA, S.I.K. dimana Polres Tanjab Barat telah berhasil mengungkap Kasus Narkoba selama tahun 2017-2018 sebagai berikut :

1) Narkoba Jenis Shabu - Shabu seberat ± 1 Kg Pada bulan September 2017;
2) Narkoba Jenis Shabu - Shabu seberat ± 3 Kg pada bulan Desember 2017;

3) Narkoba Jenis Shabu - Shabu seberat ± 7 Kg pada bulan Juli 2018.

j. Narkoba memang musuh bangsa dimana data BNN Pada tahun sebelumnya menempatkan Prov. Jambi pada rangking 20 tingkat nasional dalam peredaran Narkoba namun sekarang menjadi peringkat 4 peredaran Narkoba;

k. Dalam Menghadapi Pesta Demokrasi Pemilu 2019 DPRD Kab. Tanjab Barat mengajak agar kita semua menjaga keutuhan NKRI walaupun berbeda dalam pilihan serta mendukung kesuksesan dsn kelancaran Pemilu 2019.

3) Sambutan Plt. Gubernur Jambi yg disampaikan oleh Sekda Prov. Jambi :

a. Dalam menghadapi Pemilu 2019 agar kita semua menjaga Sitkamtibmas;

b. Selamat HUT ke 53 semoga Tanjab Barat lebih baik dan maju di masa akan datang.

4) Pembacaan Do'a yang dipimpin oleh Kakan Kemenag Kab. Tanjab Barat;

5) Ramah tamah.

Kegiatan selesai pukul sekira pukul 11.15 Wib berjalan aman dan lancar.

7. Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Pukul 14.40 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Pleno Penyampaian Hasil Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD dan Sinkronisasi rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tanjab Barat Untuk Pemilu Tahun 2019.

8. Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 pukul 1.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Bram Itam dilaksanakan sosialisasi pemantapan pemilu 2019 di kab. Tanjab barat, sebagai moderator adalah Sekcam Bram Itam.

9. Pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 pukul 10.00 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Tanjab Barat dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia.kegiatan dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat FAIZAL RIZA ST, MM

10. Pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Pukul 15.10 Wib bertempat di Hotel Masa Kini Kuala Tungkal dilaksanakan RAPAT PLENO TERBUKA Penyampaian Hasil Penetapan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

11. Pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 pukul 15.00 Wib bertempat di Hotel Masakini Kuala Tungkal dilaksanakan Rakor bersama DPP, DPD, Fraksi PDIP, DPC dan bakal Caleg 2019 PDIP se Kab. Tanjab Barat dalam rangka silaturrahmi dan pembekalan Caleg 2019

12. Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 20.30 Wib tatap muka Reses anggota DPR RI Dapil Jambi Fraksi Golkar Hj. SANIATUL LATIVA,SE.MM di wilayah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat.

13. Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 09.00 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Paripurna Pertama :

penyampaian Nota Rancangan (KUPA) dan Rancangan Prioritas Flapon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Kab. Tanjab Barat Tahun Anggaran 2018.

1) Bupati kab. Tanjab Barat Ir. H. SAFRIAL, MS;
2) Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat Drs. H. amir Sakib;
3) Sekda Kab. Tanjab Barat AMBOK TUO, MM;
4) Kasdim Kodim 0419 Tanjab MAYOR INF FIRDAUS;
5) Kabag Sumda Polres Tanjab Barat KOMPOL MAS EDY;
6) Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal SENEN S, Ag, M.H;
7) Anggota DPRD Kab. Tanjab Barat yang hadir sebanyak 22 orang;

Susunan Acara :

1) Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
2) Sambutan sekaligus membuka Rapat Paripurna oleh Ketua DPRD FAISAL RIZA ST,MT;
3) penyampaian Nota Rancangan (KUPA) dan Rancangan Prioritas Flapon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Kab. Tanjab Barat Tahun Anggaran 2018 Oleh Bupati Kab. Tanjab Barat :
   Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran perubahan apbd (kupa) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018

yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu kehadapan seluruh Anggota dewan yang terhormat. Naskah rancangan kupa dan rancangan PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 disusun sebagaimana diamanatkan dalam PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang telah dicapai dan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dalam tahun berjalan, adanya prediksi pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 yang berimplikasi pada diperlukannya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang Akan digunakan pada tahun akan datang berjalan. Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi yang menjadi dasar Pencapaian sasaran yang akan diraih, maka kebijakan umum perubahan apbd tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan.
Pendapatan daerah merupakan unsur terpenting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah. Jumlah pendapatan daerah yang diproyeksikan pada apbd tahun anggaran 2018 adalah sebesar rp. 1.271.039.910.143,(satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah), dalam perjalanan waktu target yang diproyeksikan tersebut tidak bisa tercapai hal lnl dikarenakan adanya penurunan penerimaan dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak serta dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Sehingga pada APBD perubahan menurun menjadi sebesar Rp. 1.214.157.501.694,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Belas Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau turun sebesar Rp. 56.882.408.449,00 (Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan

Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau turun sebesar sebesar 4,48 persen.

b) Belanja
Belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung penlngkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja, guna menurunkan angka kemiskinan. Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (konektifitas jalan, air bersih, jaringan listrik, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta peningkatan akses layanan kepada masyarakat.
Belanja daerah pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2018 kami usulkan kepada legislatif sebesar Rp. 1.443.408.979.530,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus).

Rapat Paripurna Selesai sekira Pukul 10.00 Wib berjalan lancar.
Kegiatan dipimpin oleh Ketua DPRD FAISAL RIZA ST,MT dan Dihadiri oleh :

14. Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 10.30 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Paripurna Keempat :

1) Penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus I dan II DPRD.
2) Pengambilan Keputusan DPRD dan Pendapat akhir Bupati Kab. Tanjab Barat atas Keputusan DPRD terhadap 5 Raperda Kab. Tanjab Barat.

Dihadiri oleh :
1) Bupati kab. Tanjab Barat Ir. H. SAFRIAL, MS
2) Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat Drs. H. amir Sakib
3) Sekda Kab. Tanjab Barat AMBOK TUO, MM
4) Kasdim Kodim 0419 Tanjab MAYOR INF FIRDAUS
5) Kabag Sumda Polres Tanjab Barat KOMPOL MAS EDY
6) Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal SENEN S, Ag, M.H.

7) Anggota DPRD Kab. Tanjab Barat yang hadir sebanyak 22 orang
8) Para Asisten, Staf ahli, Kepala OPD, Pejabat eselon III, Instansi Vertikal, BUMD, Perbankan.

Dengan disetujuinya 4 (empat) rancangan peraturan daerah tersebut untuk di sah kan menjadi peraturan daerah, sudah menjadi kewajiban dari kepala daerah melalui perangkat daerah terkait untuk melaksanakan Perda tersebut, sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas sedangkan 1 (satu) Raperda lagi yakni raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi di tunda untuk pengesahannya dengan alasan berdasarkan hasil konsultasi ke kementrian pekerjaan umum dan perumahan.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin selama ini, dan pada masa-masa yang akan datang. Saya, selaku kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentu bersama DPRD kabupaten tanjung jabung barat bertekad memberi Yang terbaik bagi kepentingan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Kekeliruan dan kesalahan, atau perbedaan pendapat yang kerap muncul dalam komunikasi dan interaksi Anggota daerah dan DPRD, merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara bijak untuk mencari solusi penyelesaian yang terbaik, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

BIDANG EKONOMI

1. Pada hari kamis, 02 Agustus 2018 sekitar Pukul 08.30 Wib dilaksanakan kegiatan Dalam rangka kegiatan gebyar bulan panutan pajak daerah Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2018 di gedung pola kantor Bupati Tanjab Barat.

BIDANG BUDAYA

1. Pada hari Rabu 01 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Laut yang diadakan

BAKAMLA RI yang bertempat di Balai Pertemuan Pelabuhan Pantai Kuala Tungkal.

Kegiatan dibuka oleh Direktur kerjasama BAKAMLA RI DEDE RUSKANDAR S.H, M.H., dan dihadiri oleh :

- Bupati Tanjab Barat diwakili oleh Asisten I Setda Tanjab Barat HIDAYAT S.H, M.H;
- Kasubdit PPKKL KOMBESPOL SUHARWIYONO;
- Kadis pendidikan dan Kebudayaan Tanjab Barat;
- Kabid pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Prov. Jambi HERNOWO A.Pi;
- Ditpolair Polda Jambi;
- Kepala Dinas Perikanan Kab. Tanjab Barat;
- Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal;
- Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal;
- Kepala Satuan Kerja PSDKP Tanjab Barat;
- Danposal Kuala Tungkal;
- Kasat Polairud Polres Tanjab Barat IPTU SYAIFUL;
- Ketua DPC HNSI Tanjab Barat SUPRAYOGI Syaiful S.IP;
- Para Nelayan Kuala Tungkal ± 50 Orang.

2. Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Balai Adat Kab. Tanjab Barat Jln. Prof Sri Soedewi Desa Pembengis dilaksanakan "Pencanangan Bulan Pelayanan Serengkuh Dayung Serentak Ke Tujuan" dalam rangka menyambut hari Ulang Tahun Kab. Tanjab Barat Ke - 53 dan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke - 73.

   Tema "Dengan Semangat Serengkuh Dayung, Serentak Ketujuan, Mari Kerja, Untuk Mewujudkan Prestasi Bangsa"

Dihadiri oleh :
- Bupati Kab. Tanjab Barat DR. Ir. H. SAFRIAL, MS;
- Sekda Kab. Tanjab Barat Drs. H. AMBOK TUO, MM beserta Isteri;
- Ketua Pengadilan Negri Kab. Tanjab Barat AHMAD FATEN SILI beserta isteri;
- Ketua Pengadilan Agama Kab. Tanjab Barat SENEN beserta Isteri;
- Ibu Ketua PKK Kab. Tanjab Barat H. CICI HALIMAH SAFRIAL, MS;

- Kapolres Tanjab Barat yang diwakili oleh Kapolsek Tungkal Ilir IPTU S. BERUTU, S.H;
- Dandim 0419/Tanjab yang diwakili oleh Pasi Lok Kodim 0419/Tanjab KAPTEN TAUFIK;
- Para Ketua OPD Kab. Tanjab Barat;
- Para Pejabat Tinggi Pratama/Para Administrator beserta jajarannya di lingkup Kab. Tanjab Barat;
- Para Ketua BPD Se Kab. Tanjab Barat;
- Para Tamu undangan;
- Warga Masyarakat dan Siswa Siswi SD, SMP dan SMA ± 200 orang.

3. Pada hari Sabtu, 3 Agustus 2018, sekitar Pukul 10.00 Wib telah berlangsung giat Pelantikan Pengurus KONI Kab.Tanjung Jabung Barat masa bhakti 2016-2020, bertempat di Hotel Arryadh Kuala Tungkal.

Giat dihadiri oleh :
- Ketua Umum KONI Provinsi H. INDRA ARMENDALIS, SH
- Ketua Umum KONI Tanjab Barat MUHSİAF IL,SSH
- Staf Ahli Bupati Tanjab Barat H. M. ARIF, MM
- Kabag Ops Polres Tanjab Barat Kompol R.P. NAINGGOLAN
- Danunit Kodim 0419/Tanjab Letda Inf M. AZHAR
- Ketua Panitia FERI EIVIANTO
- Kabid Perhubungan Darat Dishub Tanjab Barat JUNAIDI TANJUNG
- Perwakilan PSSI Tanjab Barat H. SARIFUDDIN GANTE
- Perwakilan Kepala dinas Pemuda dan Olahraga Tanjab Barat SUWARNO
- Bendahara Umum KONI Jambi YUZAN
- Pengurus KONI Tanjab Barat sekitar 40 Orang
- Tokoh Adat
- Tokoh Pemuda
- Tamu Undangan sekitar ± 50 Orang

Rangkaian acara :
- Pembukaan
- Sambutan Ketua KONI Tanjab Barat sebagai berikut :
  Kami Sangat mengharapkan kepada Bapak Bupati agar hadir dalam acara pertemuan KONI Tanjab Barat, agar kami dari KONI Tanjab Barat bisa bertatap muka langsung kepada Bupati Tanjab Barat supaya kami bisa menjelaskan secara langsung tentang susunan kepengurusan KONI, serta tentang Kinerja KONI Tanjab

Barat dan kendala kami dilapangan bisa kami sampaikan langsung Kepada Bupati Tanjab Barat.

- Sambutan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi menyampaikan
  Saya sangat setuju dgn Penyampaian dari Ketua KONI Tanjab Barat melalui staf ahli Bupati Tanjab Barat bisa bertatap muka langsung dengan Bupati Tanjab Barat dan bisa menyampaikan langsung apa saja kendala yg terjadi dilapangan.
- Setiap ada kegiatan KONI saya minta untuk masing2 ketua Cabor supaya menghadiri kegiatan yang dilaksanakan.Karna Cabor ini berada dibawah kepengurusan KONI Tanjab Barat.Serta untuk pengurus yang telah dilantik saya minta untuk meningkatkan kinerja masing2 pengurus.
- Faktor yang paling utama untuk KONI adalah dukungan langsung dari Pemerintah Daerah,karna jika tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan KONI tidak akan berjalan sebagaimana mana mestinya.
- Sambutan Bupati melalui Staf Ahli Bupati Tanjab Barat.
  Dalam Pelantikan Pengurus KONI Tanjab Barat ini bisa menjadi memontum untuk mengangkat motivasi dalam pembinaan olahraga Kab. Tanjab Barat.Serta bisa mengangkat kemajuan atlit Tanjab Barat agar bisa memberikan yang terbaik untuk Kab Tanjab Barat yang kita banggakan ini.
- Semoga KONI Tanjab Barat bisa melaksanakan tugasnya bisa melaksanakan tugas keseharian sebagai pengurus KONI bisa dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Serta bisa membuat atlit-atlit Tanjab Barat dapat meraih prestasi yang membanggakan ditingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.
- Pelantikan Pengurus KONI Tanjab Barat oleh Ketua KONI Provinsi Jambi H. INDRA dilanjutkan penyerahan Bendera Pataka KONI dari Ketua KONI Provinsi Jambi kepada Ketua KONI Tanjab Barat.

Berikut nama nama susunan Pengurus KONI Tanjab Barat, :

- Pelindung KONI Tanjab Barat

1. Bupati Tanjab Barat Ir. H. SAFRIAL, MS
2. Ketua DPRD Tanjab Barat FAISAL RIZA ST,MT
3. Kejari Tanjab Barat TRI JOKO SH,MH

4. Dandim 0419/ Tanjab Letkol Inf M. ARRY YUDHISTIRA S.IP, M.IP
5. Kapolres Tanjab Barat AKBP Pol A.D.G. SINAGA S.IK

- Susunan Kepengurusan KONI Tanjab Barat

Ketua Umum : Muh. Sjafril Simamora, SH
Ketua Harian : Syarifuddin, SE
Sekretaris : Cecep
Bendahara : Iwan Suhendra

Giat selesai sekira Pukul 11.30 Wib dalam keadaan aman dan lancar

4. Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Ancol Beach Kuala Tungkal dilaksanakan Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara 2018 dan Pembukaan Pameran Bazar dan Pasar Rakyat dalam Rangka Menyambut Hut Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-73 dan Hut Kab. Tanjab Barat Ke-53.

5. Pada hari Jum'at, 10 Agustus 2018, sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan Upacara dalam rangka memperingati hari jadi ke-53 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, bertempat di Halaman Kantor Bupati Kab. Tanjab Barat.

6. Pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Dinas Bupati Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Malam Silaturahmi Daerah dan Siraman Rohani Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Ke 53 Kab. Tanjab Barat Tahun 2018.

7. Pada hari Sabtu tanggal 09.30 Wib bertempat di Rumah Dinas Bupati Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Pelepasan Jama'ah Calon Haji Kab. Tanjab Barat tahun 1439 H/2018 M dengan Thema "Semoga Menjadi Haji Yang Mabrur"

8. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Aula Kantor Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat dilaksanakan Kegiatan Penyerahan Sembako Paket Kemerdekaan Dalam Rangka HUT RI Ke 73 Oleh MTA (Majelis Tafsir Al - Qur'an) Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat.

9. Pada hari Kamis 23 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 WIB telah berlangsung giat pembukaan Festival Tabuh Bedug dan Baca Takbir yang digelar oleh MUI Tanjab Barat bekerjasama dengan Pemkab Tanjab Barat dan Remaja Masjid Agung (RMA) Al- Istiqamah Kuala Tungkal, bertempat di Halaman halaman PHI belakang masjid Agung Al-Istiqomah Kuala Tungkal.

10. Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Gedung Balai Pertemuan Kantor Bupati dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan dan Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Berbasis Pesantren di Kab. Tanjab Barat yang di Selenggarakan oleh Direktorat RSKPN Kemensos RI dan Bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab. Tanjab Barat.

BULAN SEPTEMBER 2018
BIDANG POLITIK

1. Pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Tungkal Ilir dilaksanakan Sosialisasi pemantapan pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat

2. Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Kuala Betara dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT

3. Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 11.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Seberang Kota dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT

4. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 09.30 Wib bertempat di Kantor PKK Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka pelaksanaan Pengasawasan Pemilu 2019 Di Kab. Tanjab Barat

5. Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 pukul 06.00 Wib bertempat di Alun alun Kota Kuala Tungkal dilaksanakan DEKLARASI PEMILU 2019 YANG AMAN,

SEJUK DAN DAMAI yang diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Kab. Tanjab Barat.

6. Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Pukul 15.00 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Koordinasi Penempatan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Untuk Pemilu 2019 Di Kab. Tanjab Barat

8. Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, pukul 10.30 Wib di Aula Hotel AW Syariah Kuala Tungkal dilaksanakan Bimtek Aplikasi Pelaporan dana kampanye oleh KPU Tanjab Barat.

9. Pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 pukul 10.30 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kab. Tanjab Barat sisa jabatan 2014 – 2019. Kegiatan dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat FAIZAL RIZA ST.

10. Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Pukul 15.00 Wib bertempat di Kantor KPU kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Persiapan Pemilu 2019. Kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab HAIRUDIN, S.Sos.I, didampingi oleh Anggota KPU Kab. Tanjab Barat M. ILYAS, S.Kom.I

11. Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 09.50 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Paripurna Pertama DPRD Tentang APBD Perubahan Tahun 2018. Rapat paripurna pertama DPRD Tanjab Barat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanjab Barat MULYANI SIREGAR, SH

12. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Pengabuan dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT.

13. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 11.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Senyerang dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT.

14. Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 Pukul 21.45 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat di laksanakan Rapat Paripurna Kedua DPRD dengan Agenda Mendengarkan Pemandangan Umum Anggota DPRD Membawakan Suara Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. Kegiatan di Pimpin oleh Ketua DPRD Kab. Tanjab Barat FAIZAL RIZA, ST, MM.

15. Pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 Pukul 08.15 Wib bertempat di Gedung DPRD Kab. Tanjab Barat Rapat Paripurna ketiga dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Bupati atas Pemandangan Umum Anggota DPRD dengan membawakan suara Fraksi - Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan RAPERDA tentang Perubahan APBD Kab. Tanjab Barat T.A. 2018.

16. Pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 Pukul 23.45 WIB bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tanjab Barat di laksanakan Rapat Paripurna Keempat DPRD dengan Agenda :

BIDANG EKONOMI

1. Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Pukul 09.30 Wib bertempat di gedung PKK Tanjab Barat, dilaksanakan sosialisasi pedoman kerja tentang sistem peringatan dini secara terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Jambi.

BIDANG BUDAYA

1. Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Hotel AW Syariah Kuala Tungkal dilaksanakan Pelantikan dan Pengukuhan Badan Pimpinan Cabang Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia/BPC PHRI Kab. Tanjab Barat periode 2018 - 2023.

2. Pada hari Jum'at, 07 September 2018, sekira Pukul 19.30 WIB telah dilaksanakan Kegiatan Penyambutan Tim penilai asuhan mandiri pemanfaatan toga dan akupresur tingkat Nasional bertempat di Gedung Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjab Barat.

3. Pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib dilaksanakan kegiatan pengamanan pembukaan MTQ Tingkat Kec. Merlung ke XXIX Tahun 2018. Lokasi kegiatan di halaman Masjid Barokkah, Jln. Nusa Indah RT. 04 RW. 02 Desa Pinang Gading Kec. Merlung.

4. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kab. Tanjab Barat dilaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan Pungli Tim Pokja Pencegahan UPP Provinsi Jambi di Tanjung Jabung Barat.

I. SITUASI POLITIK LAINNYA :

Bahwa hubungan antara Kepala Daerah (Bupati) dengan anggota DPRD cukup baik dan harmonis serta kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah diterima oleh masyarakat melalui perwakilannya di DPRD Kab. Tanjab Barat.

II. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

1. Peredaran Narkotika dan obat terlarang merupakan salah satu musuh masyarakat. Peredaran Narkoba dapat merusak generasi muda serta dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Peredaran narkoba jenis sabu sedang marak-maraknya terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahkan sudah masuk ke pelosok kampung. Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam mendukung pemberantasan narkoba yang selama ini dilakukan Polri.

2. Bupati Tanjab Barat memerintahkan para camat berada di wilayah masing-masing selama semingu penuh, itu supaya memudahkan koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah koordinasi dengan Danramil dan Babinsa, mengingat pada Juli dan Agustus merupakan saat puncak musim kemarau.Wilayah rentan karhutla ada di wilayah Betara dan Senyerang. Bupati memerintahkan dinas terkait melakukan pendataan titik rawan api dan lainnya. Dalam mengantisipasi Karhutla Pemkab juga bekerjasama dengan perusahaan guna melakukan di

wilayah kerja masing-masing. Apabila membuka lahan dengan cara membakar akan ada sanksinya berupa ancaman hukuman.

III. PERMASALAHAN

a. Kekurangan gas elpiji 3 kg bersubsidi di Kab. Tanjab Barat mencapai 15.900 tabung. Jumlah itu berdasarkan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten.Pemkab mengajukan surat ke Pertamina Jambi untuk menambah kekurangan. Pendistribusian harus tepat sasaran sehingga bisa dinikmati keluarga miskin.

b. Kebakaran yang terjadi di wilayah Desa Parit Pudin RT. 04 Kecamatan Pengabuan, dimana proses pemadaman tidak dibantu oleh petugas Damkar karena akses ke lokasi jauh dari pos Damkar, jadi warga memadamkan api dengan cara gotong royong.

IV. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melakukan diskusi dengan warga masyarakat untuk pembangunan dan pelebaran jalan menuju ke Pelabuhan RORO, bahwa masyarakat yang terkena dampak pembukaan dan pelebaran jalan akan mendapatkan ganti rugi akan tetapi warga diminta untuk segera melengkapi surat-surat terkait kepemilikan lahan tersebut.

V. KESIMPULAN

1. Sampai saat ini situasi perkembangan politik di Wilayah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat relatif aman dan kondusif serta hubungan Pemerintahan Daerah dengan anggota DPRD berjalan dengan baik.
2. Rapat atau pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan anggota DPRD selama Triwulan II Tahun 2017 telah berjalan dengan baik sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 218/Kep.Bup/Kesbangpol/2017 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017, bahwa Tim selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas pemantauan

yang melibatkan pihak Kodim, Polres, Kejari dan instansi terkait lainnya.

VI. REKOMENDASI / SARAN

Tim Pemantauan Politik Daerah di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten agar selalu dapat meningkatkan koordinasi baik secara tertulis atau lisan dalam melakukan Pemantauan Perkembangan Politik, dengan tujuan untuk meminimalisir persoalan politik yang tidak diinginkan di kemudian hari.

2.4.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Parpol

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp.51.939.170 dan pada APBD-P terdapat perubahan penambahan Anggaran sebesar Rp. 23.927.537 atau bertambah sebesar 46,07%, sehingga menjadi Rp.75.866.707,- dengan pembiayaan: Belanja Pegawai sebesar Rp.35.250.000, terdiri dari Ketua 1Orang,Sekretaris 1Orang,Anggota 6 Orang, Staff 5 Orang, honorarium pegawai tidak tetap/Non PNS 4 Orang sebesar Rp. 8.000.000, belanja bahan pakai habis Rp. 5.271.707,- belanja Jasa Kerja Rp. 9.050.000, Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp. 2.100.000,- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur Rp. 6.000.000,- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 565.000,- Biaya Sewa Gedung Rp. 3.000.000,- Belanja makan dan minum Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Parpol dan Makan Minum Kegiatan Bimtek Rp.5.130.000,- target Kinerja 10 bulan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Parpol di wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat

- PGU Anggaran : Rp. 75.866.707,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 74.966.707,-
- Sisa Anggaran : Rp. 161.120,-
- Realisasi Anggaran : 98,80 %
- Realisasi Fisik Kegiatan : 100% (11 Rekomendasi pencairan Batuan Keuangan Parpol)

Kegiatan ini terdiri dari 14 orang Verivikator dan 33 Orang Pengurus Partai dari 11 Parpol yang memiliki perwakilan di DPRD Tanjab Barat Dengan total pencairan sebesar Rp. 1.036.477.200 (Satumiliar Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu dua ratus Rupiah).

2.4.4. Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp. 155.828.380,- dengan pembiayaan :Belanja Pegawai Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 33.750.000,- honorarium pegawai tidak tetap/Non PNS sebesar Rp. 6.000.000,-, belanja bahan pakai habis Rp. 11.323.380,- belanja Jasa Kerja Rp. 42.250.000,- belanja jasa narasumber Rp. 32.500.000,- , Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 7.325.000,- Belanja makan dan minum rapat dan kegiatan Pemantapan Persiapan Pemilu di 13 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp. 22.680.000,- target Kerja 6 bulan pada Kegiatan Sosialisasi Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan dalam wilayah Kab. Tanjab Barat Tim Rp. 1.280.000,-, target Kinerja 6 bulan Kegiatan Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan di wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat.

- PGU Anggaran : Rp. 155.828.380,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 155.667.260,-
- Sisa Anggaran : Rp. 161.120,-
- Realisasi Anggaran : 98,80 %
- Realisasi Fisik Kegiatan : 100% (13 Kecamatan se Tanjung Jabung Barat)

Kegiatan ini menitik beratkan pada Pemantapan Persiapan Pemilu di 13 Kecamatan.semua elemen masyarakat bersama aparat kecamatan siap melaksanakan pilpres dan Pileg 2019 dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan baik kondusif,aman dan terkendali.

2.4.5. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu

Anggaran yang disediakan pada APBD murni sebesar Rp. 88.005.000,- dengan pembiayaan: Belanja Pegawai Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 70.650.00,- honorarium pegawai tidak tetap sebesar Rp. 9.000.000,-, belanja bahan pakai habis Rp. 1.500.000,- belanja Jasa Kantor (Belanja Transportasi Kendaraan Air) Rp. 3.200.000,-, Belanja Cetak dan Belanja Foto Copy Rp. 2.375.000,- Belanja makan dan minum rapat Tim Rp. 1.280.000,-, tager Kinerja 9 bulan Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan pada Pasca Pemilu 2015,kegiatan pemantauan ini dilaksanakan setiap triwulan dan dibagi dalam empat triwulan,

Kegiatan Pada TW.I

2. Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 pukul 10.00 Wib Bertempat di Ruang Media Center KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Pleno Penyampaian hasil verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Perindo untuk menjadi calon peserta pemilu 2019 oleh KPU Kab. Tanjab Barat.

3. Pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 Sekira pukul 09.00 Wib bertempat di ruang Media Center KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan penyerahan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol Berkarya dan Parpol Garuda oleh KPU Kab. Tanjab Barat.

4. Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di ruang Media Center KPU Tanjab Barat dilaksanakan penyampaian perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual dan penyampaian struktur kepengurusan baru parpol Perindo Tanjab Barat, kegiatan dipimpin anggota KPU Tanjab Barat Divisi Hukum AHMAD HADZIQ, SH.I didampingi anggota KPU Tanjab Barat HAIRUDIN S.Sos., SUROSO, S.Pt., TAUFIK, S.Tr., serta dihadiri pengurus DPD Perindo Tanjab Barat yaitu :

5. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 14.35 Wib Bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat

dilaksanakan RAPAT KOORDINASI Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 Berdasarkan PKPU No 5 tahun 2018 dan PKPU No 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Perindo Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

6. Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat melakukan Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik untuk menjadi peserta pemilu Tahun 2019 berdasarkan PKPU No 5 tahun 2018 tentang Jadwal, Tahapan dan Program Pemilu serta PKPU No 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt., dan didampingi oleh Sekretaris, Komisioner, Tim Pokja Verifikator KPU Kab. Tanjab Barat serta dimonitor oleh Anggota Panwaslu Kab. Tanjab Barat MON REZI, S.sos.I dan Unit I Satintelkam Polres Tanjab Barat.

7. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat melakukan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik untuk menjadi Peserta pemilu tahun 2019 berdasarkan PKPU No 5 tahun 2018 tentang Jadwal, tahapan dan program pemilu serta PKPU No 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD. Kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt., dan didampingi oleh Sekretaris, Komisioner, Tim Pokja Verifikator KPU Kab. Tanjab Barat serta dimonitor oleh Anggota Panwaslu Kab. Tanjab Barat MON REZI, S.sos.I dan Unit I Satintelkam Polres Tanjab Barat

8. Sekira pukul 09.30 Wib bertempat di kantor DPC PPP Kab. Tanjab Barat jalan Beringin Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir. Kegiatan dihadiri Ketua DPD Partai PPP Kab. Tanjab Barat KAMARUDIN, Sekretaris DPD Partai PPP Kab. Tanjab Barat JAHARI, S.Kom, Bendahara DPD Partai PPP Kab. Tanjab Barat, Pengurus DPC Partai PPP Kab. Tanjab Barat, dan 15 orang yang akan di ambil sampel

9. Sekira pukul 10.30 Wib bertempat di kantor DPC PKB Kab. Tanjab Barat jalan Palembang Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir. Kegiatan dihadiri oleh Ketua DPD Partai PKB Kab. Tanjab Barat H. ABDUL HAMID, S.H, Sekretaris DPD Partai PKB Kab. Tanjab Barat NURDIN, Bendahara DPD Partai PKB Kab. Tanjab Barat Hj. NUR ASIAH, S.Pd.I, Pengurus DPD, DPC Partai PKB Kab. Tanjab Barat, dan 17 orang yang akan di ambil sampel.

10. Sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kantor DPD PDIP Kab. Tanjab Barat jalan Kihajar Dewantara Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir. Kegiatan dihadiri oleh Ketua DPD Partai PDIP Kab. Tanjab Barat MULYANI SIREGAR, SH, Sekretaris DPD Partai PDIP Kab. Tanjab Barat HAMDANI, SE, Bendahara DPD Partai PDIP Kab. Tanjab Barat ABDULLAH, SE, Pengurus DPD, DPC Partai PDIP Kab. Tanjab Barat, dan 20 orang yang akan di ambil sampel.

11. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 17.30 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan RAPAT PLENO PENUTUPAN PENYERAHAN BERKAS CALON PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt dan dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris dan Staf KPU Kab. Tanjab Barat.

Hasil rapat pleno sebagai berikut :

1) Jumlah rekap penyerahan berkas dari hari pertama sampai hari ketujuh yaitu mulai tanggal 25 s/d 31 Januari 2018 sebanyak 170 orang, terdiri dari :

a) Kec. Batang Asam 4 (empat) orang;
b) Kec. Betara 12 (dua belas) orang;
c) Kec. Bram Itam 18 (delapan belas) orang;
d) Kec. Kuala Betara 14 (empat belas) orang;
e) Kec. Merlung 2 (dua) orang;
f) Kec. Muara Papalik 1 (satu) orang;
g) Kec. Pengabuan 26 (dua puluh enam) orang;
h) Kec. Renah Mendaluh 3 (tiga) orang;
i) Kec. Seberang Kota 11 (sebelas) orang;
j) Kec. Senyerang 10 (sepuluh) orang;

k) Kec. Tebing Tinggi 3 (tiga) orang;
l) Kec. Tungkal Ilir 61 (enam puluh satu) orang;
m) Kec.Tungkal Ulu : 5 (lima) orang;

2) Pendaftaran PPK di perpanjang selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 1 Februari 2018 s/d 3 Februari 2018. Bagi kecamatan yang jumlah pendaftarnya kurang dari 6 orang saat pendaftaran tanggal 25 s/d 31 Januari 2018.

3) Kecamatan yang dimaksud untuk diperpanjang pendaftaran PPK sebagai berikut :
a) Kec. Batang Asam;
b) Kec. Kec. Renah Mendaluh;
c) Kec. Tungkal Ulu;
d) Kec. Muara Papalik;
e) Kec. Merlung;
f) Tebing Tinggi.

Rapat pleno selesai pukul 18.10 Wib berjalan dengan lancar.

1. Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat melakukan Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 berdasarkan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang jadwal, tahapan dan program Pemilu serta PKPU No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

2. Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 Pukul 14.45 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Penyampaian hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019.

   Kegiatan dipimpin oleh Angota KPU Kab. Tanjab Barat A. HADZIQ, S.H.I, dan didampingi oleh Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat. Dimonitor oleh Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I., Unit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat serta dihadiri oleh Penghubung 12 Parpol :

   1) PDIP
   2) DEMOKRAT
   3) NASDEM
   4) PKB

5) PKS
6) PBB
7) PERINDO
8) GARUDA
9) PPP
10) PAN
11) GERINDRA
12) GOLKAR

Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 untuk 12 Parpol tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)

3. Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat mengumumkan hasil seleksi Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu tahun 2019 di Kab. Tanjab Barat dengan Nomor Pengumuman : 45/PP.05-PU/01/1506/KPU-Kab/II/2018 tanggal 04 Februari 2018. Pendaftaran dibuka dari tanggal 25 Januari 2018 s.d 03 Februari 2018 dengan jumlah pendaftar sebanyak 203 orang dan tidak lulus sebanyak 1 (satu) orang yang berasal dari Kec. Seberang Kota dan lulus 202 orang terdiri dari :

a. Kec. Batang Asam 9 (sembilan) orang Laki-laki;
b. Kec. Betara 12 orang (10 Laki-laki, 2 Perempuan);
c. Kec. Bram Itam 18 orang (13 Laki-laki, 5 Perempuan);
d. Kec. Kuala Betara 14 orang (13 Laki-laki, 1 Perempuan);
e. Kec. Merlung 15 orang (10 Laki-laki, 5 Perempuan);
f. Kec. Muara Papalik 6 (enam) orang (3 Laki-laki, 3 Perempuan);
g. Kec. Pengabuan 26 orang (20 Laki-laki, 6 Perempuan);
h. Kec. Renah Mendaluh 6 (enam) orang Laki-laki;
i. Kec. Seberang Kota 11 orang (10 Laki-laki, 1 Perempuan);
j. Kec. Senyerang 10 (sepuluh) orang Laki-laki;
k. Kec. Tebing Tinggi 6 (enam) orang (5 Laki-laki, 1 Perempuan);
l. Kec. Tungkal Ilir 61 orang (38 Laki-laki, 23 Perempuan);

m. Kec. Tungkal Ulu 8 (delapan) orang (4 Laki-laki, 4 Perempuan).

Keterangan :
Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak untuk mengikuti tes tertulis yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 pukul 14.00 Wib bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati.

4. Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 Pukul 10.15 Wib bertempat di Hotel Rivoli Jl. Prof. Sri Soedewi Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2019. Rapat pleno di pimpin Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt dan didampingi oleh Komisioner sekretaris KPU Kab. Tanjab Barat.

1) Dimonitor oleh :

a) Panwaslu Kab. Tanjab Barat;
b) Unit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat.

2) Dihadiri oleh Penghubung 13 Parpol :

a) PDIP;
b) DEMOKRAT;
c) NASDEM;
d) PKB;
e) PKS;
f) PBB;
g) PERINDO;
h) GARUDA;
i) PPP;
j) PAN;
k) GERINDRA;
l) GOLKAR;
m) BERKARYA.

3) Rekapitulasi hasil verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2019 untuk 12 parpol tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan untuk parpol BERKARYA sudah MS pada saat Verifikasi sebelum dikeluarkannya PKPU No 5 tahun 2018 tentang

jadwal, tahapan dan program pemilu serta PKPU No 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD;

4) Selanjutnya KPU Kab. Tanjab Barat akan mengirim rekapitulasi hasil verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2019 Kab. Tanjab Barat ke tingkat KPU Prov. Jambi pada tanggal 9 s.d 10 Februari 2018.

Kegiatan selesai pukul 11.00 Wib berjalan lancar.

5. Pada Hari Rabu tgl 7 Februari 2018 pukul 14.30 Wib bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat, jumlah yang lulus adminstrasi sebanyak 202 Orang.

1) Jumlah yang mengikuti seleksi tertulis sebanyak 186 orang, tidak hadir 16 orang, peserta yg hadir terdiri dari :
   a) Kec. Batang Asam 5 orang;
   b) Kec. Betara 12 (dua belas) orang;
   c) Kec. Bram Itam 18 (delapan belas) orang;
   d) Kec. Kuala Betara 13 (tiga belas) orang;
   e) Kec. Merlung 10 (sepuluh) orang;
   f) Kec. Muara Papalik 6 (enam) orang;
   g) Kec. Pengabuan 26 (dua puluh enam) orang;
   h) Kec. Renah Mendaluh 6 (enam) orang;
   i) Kec. Seberang Kota 11 (sebelas) orang;
   j) Kec. Senyerang 10 (sepuluh) orang;
   k) Kec. Tebing Tinggi 6 (enam) orang;
   l) Kec. Tungkal Ilir 55 (lima puluh lima) orang;
   m) Kec. Tungkal Ulu 8 (lima) orang.

2) Jumlah Soal Sebanyak 100 Soal dengan waktu pengerjaan 120 menit

3) Kegiatan diawasi oleh :

   a) Komisioner, Sekretaris serta staf KPU Kab. Tanjab Barat;
   b) Panwaslu Kab. Tanjab Barat;
   c) Unit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat.

Keterangan nama-namayang tidak hadir 16 (enam belas) orang sebagi berikut :

1) Kec. Tungkal Ilir tidak hadir 6 (enam) orang :
a) RIANDO RAHMAT;
b) BOBI ANDIRA;
c) YARAMADHAN;
d) FIKRI EFENDI;
e) M. ZAKI DEVITSON;
f) M. SALEH.

2) Kec. Kuala Betara tidak hadir 1 (satu) orang M. ARIF SETIAWAN

3) Kec. Merlung tidak hadir 5 (lima) orang :

a) MUADDAT;
b) YUNIAHRIANTI;
c) SUKAESIH;
d) ERWAN SASI;
e) M. ASIS SAMSUDIN.

4) Kec. Batang Asam tidak hadir 4 (empat) orang :

a) DESRIANTO;
b) RIZKON;
c) EKO PRABOWO;
d) FIKRI ZAWADI.

6. Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 10.00 Wib bertempat di Hotel Syari'ah Kuala Tungkal dilaksanakan UJI PUBLIK Usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilihan umum Tahun 2019 Kab. Tanjab Barat. Kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt., dan didampingi oleh Komisioner dan Sekretaris KPU Kab. Tanjab Barat.

Kegiatan dihadiri :
1) Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I;
2) Sekretaris Kesbangpol Kab. Tanjab Barat PONDI SAYUTI;
3) Staf Dinas Dukcapil HATTA HARAHAP.

Peserta Rakor berjumlah ± 30 orang terdiri dari :
1) Penghubung Parpol :

PAN, PKB, PKS, PDIP, PBB, DEMOKRAT, NASDEM, GOLKAR, PERINDO, BERKARYA, GARUDA, HANURA, PPP, GERINDRA.

2) Ormas NU;
3) Ormas Muhammadiyah;
4) HMI;
5) PMII;
6) GOW.

Penyampaian dari Ketua KPU Kab. Tanjab Barat sebagai berikut :

a) Bahwa usulan Alokasi Kursi anggota DPRD berdasarkan jumlah Penduduk DAKK (Data Agregat Kependudukan Kecamatan) Semester II 2017 sebanyak 322.058;

b) Adanya perubahan alokasi kursi dan berbeda dengan pemilu legislatif 2014 yang lalu yaitu Dapil 1 (Kec. Tungkal Ilir, Kec. Bram Itam, Kec. Sebrang Kota) pada pemilu 2014 sebanyak 12 kursi dan usulan pemilu 2019 berkurang menjadi 11 kursi, dan alokasi di Dapil 4 (Kec. Tungkal Ulu, Kec. Batang Asam, Kec. Tebing Tinggi) dimana pada pemilu 2014 sebanyak 8 kursi dan usulan pemilu 2019 bertambah menjadi 9 (sembilan) kursi, untuk Dapil 2, 3 dan 5 sama seperti Pemilu legislatif 2014;

3) Jumlah Kursi tidak berubah sama dengan Pemilu 2014 yaitu sebanyak 35 kursi;

4) Usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab.Tanjab Barat untuk Pemilu 2019 sebagai berikut :

a) Dapil 1 sebanyak 11 Kursi :
   - Kec. Tungkal Ilir Jumlah Penduduk 73.799 Jiwa;
   - Kec. Bram Itam Jumlah Penduduk 18.833 Jiwa;
   - Kec. Seberang Kota Jumlah Penduduk 9.299 Jiwa.
b) Dapil 2 sebanyak 5 Kursi :
   - Kec. Betara Jumlah Penduduk 28.793 Jiwa;
   - Kec. Kuala Betara Jumlah penduduk 13.253 Jiwa.

c) Dapil 3 sebanyak 4 Kursi :
   - Kec. Merlung Jumlah penduduk 16.536 Jiwa;
   - Kec. Muara Papalik Jumlah penduduk 10.344 Jiwa;
   - Kec. Renah Mendaluh Jumlah penduduk 15.069 Jiwa.

d) Dapil 4 sebanyak 9 Kursi :
- Kec. Tungkal Ulu jumlah penduduk 13.532 Jiwa;
- Kec. Tebing Tinggi Jumlah penduduk 37.163 Jiwa;
- Kec. Batang Asam Jumlah penduduk 32.067 Jiwa.

e) Dapil 5 sebanyak 6 Kursi :
- Kec. Pengabuan Jumlah penduduk 26.933 Jiwa;
- Kec. Senyerang Jumlah penduduk 26.437 Jiwa.

18. Pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 mengumumkan hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat dengan Nomor Pengumuman : 57/PP.05-PU/01/1506/KPU-Kab/II/2018.

Nama yang lulus tes tertulis sebagai berikut :
a. Kec. Batang Asam :
1) ANWAR ALI;
2) BAYU PRATAMA;
3) ARIF IRVAN;
4) EDO SANDI PUTRA;
5) IDRUS.S.

b. Kec. Betara :
1) MAHMUD;
2) ABD GANI;
3) HIKMAL YAKIN;
4) MINANTO;
5) KHOIRUL HAJAINURI;
6) SEPTIAN EKO SAPUTRA.

c. Kec. Bram Itam :
1) M. FAHRUDIN SUKRI;
2) M. ISNAINI;
3) REFI ELIF CANDRA;
4) HENDRA YANI;
5) JAZILATUR RAHMAH;
6) MUHAMMAD IQBAL HELMI.

d. Kec. Kuala Betara :
1) MUHAMMAD ZAKI
2) MUBARAQ ABDUL GHOFUR
3) RAHMAT
4) MUAMMAR
5) BUNARI
6) SITI FATIMAH

e. Kec. Merlung :
1) ERWIN PERLINDUNGAN PANE;
2) ZULFANER.Z.;
3) AGUS NANDO;
4) RESI KARLINA;
5) LAILIYATUL KHOIRIYAH;
6) RAMINDO.

f. Kec. Muara Papalik :
1) MUHAMMAD LAMIDI;
2) SUCIPTO;
3) ERMALIA;
4) NOVA ARDILA;
5) SALIMIN, M.Pd;
6) JUNITA SARI.

g. Kec. Pengabuan :
1) AHMAD AHADILLAH;
2) FAUZI SANTOSO;
3) TOPAN PRIBADI;
4) SUGENG PUSPIANTO;
5) MOH MUSTHOFA;
6) SUGITO.

h. Kec. Renah Mendaluh :
1) AAN KUNAIVI;
2) SUHENDRO;
3) AGUSALIM;
4) MAD. NURJEN;
5) M. TARMIDI;
6) ANDI SAFWAN.

i. Kec. Seberang Kota :
1) TARBUDI;
2) AHMAD RAZAKNI;
3) KOMARUDIN;
4) SYAHRULLAH;
5) ABDUL HARIS;
6) SAHIDURRAHMAN.

j. Kec. Senyerang :
1) SAPARUDIN
2) ARDIANSYAH
3) EDY WALUYO
4) DEDI EFENDI

5) ZAINAL EFENDI
6) AKBAR SAPUTRA

k. Kec. Tebing Tinggi :
1) NURAINI DETIA PUTRI;
2) NARWIZON;
3) BAHRUM GULTOM;
4) PADLI;
5) AHMAD LUTHFI ARRAYYAN;
6) RAMA DINATA GAMA.

l. Kec. Tungkal Ilir :
1) EKA WAHYUDI;
2) PRAYOGA PANGESTU;
3) WIDODO SAPUTRA;
4) M. HENDRI.C;
5) IRMA JULIYANTI PRATIWI;
6) PUTRI ANDINI A.

m. Kec. Tungkal Ulu :
1) PENI HERMA WIRDA;
2) DWI PUJA KUSUMA;
3) RIFA'ATUL MAHMUDAH;
4) ANDI MISRONI SANTOSO;
5) RIKA WIJAYANTI;
6) SYAFRUDIN.

19. Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 21.00 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Pleno hasil tes wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih untuk Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat.

Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt dan dihadiri oleh Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat

Dimonitor oleh Unit I Satintelkam Polres Tanjab Barat

Hasil Rapat Pleno penetapan Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut :
a. Kec. Batang Asam :
1) BAYU PRATAMA;
2) IDRUS. S;
3) EDO SANDI PUTRA.

b. Kec. Betara :
1) MINANTO;
2) MAHMUD;
3) AND. GANI.

c. Kec. Bram Itam :
1) M. FAHRUDIN SUKRI;
2) HENDRA YANI;
3) M. ISNAINI.

d. Kec. Kuala Betara :
1) MUHAMMAD ZAKI;
2) RAHMAT;
3) MUBARAQ ABDUL GHOFUR.

e. Kec. Merlung :
1) ERWIN PERLINDUNGAN PANE;
2) AGUS NANDO;
3) RAMINDO.

f. Kec. Muara Papalik :
1) MUHAMMAD LAMIDI;
2) NOVA ARDILA;
2) SALIMIN, M.Pd.

g. Kec. Pengabuan :
1) AHMAD AHADILLAH;
2) SUGITO;
3) TOPAN PRIBADI.

h. Kec. Renah Mendaluh :
1) AGUS SALIM;
2) ANDI SAFWAN;
3) SUHENDRO.

i. Kec. Seberang Kota :
1) KOMARUDIN;
2) TARBUDI;
3) SYAHRULLAH.

j. Kec. Senyerang :
1) ARDIANSYAH;
2) EDY WALUYO;
3) ZAINAL EFENDI.

k. Kec. Tebing Tinggi :

1) BAHRUL GULTOM;
2) AHMAD LUTHFI ARRAYYAN;
3) NARWIZON.

l. Kec. Tungkal Ilir :
1) EKA WAHYUDI;
2) M. HENDRI.C.;
3) PUTRI ANDINI.A.

m. Kec. Tungkal Ulu :
1) SYAFRUDIN;
2) ANDI MISRONI SANTOSO;
3) RIKA WIJAYANTI.

20. Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat mengeluarkan pengumuman seleksi administrasi pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai tanggal 6 s.d 17 Februari 2018 untuk di 20 Kelurahan dan 114 Desa se Kab. Tanjab Barat.

Nomor Pengumuman : 81/PP.05-Pu/01/KPU-Kab/II/2018 tentang hasil seleksi penelitian administrasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu tahun 2019 di Kab. Tanjab Barat dengan hasil seleksi penelitian administrasi PPS, sebagai berikut :

a. Kec. Tungkal Ulu :
1) Kelurahan Pelabuhan Dagang berjumlah 9 (sembilan) orang;
2) Desa Pematang Pauh berjumlah 8 (delapan) orang;
3) Desa Taman Raja berjumlah 9 (sembilan) orang;
4) Desa Tanjung Tayas berjumlah 9 (sembilan) orang;
5) Desa Badang berjumlah 6 (enam) orang;
6) Desa Kuala Dasal berjumlah 10 (sepuluh) orang;
7) Desa Brasau berjumlah 8 (delapan) orang;
8) Desa Pematang Tembesu berjumlah 7 (tujuh) orang;
9) Desa Gemuruh berjumlah 6 (enam) orang;
10) Desa Badang Sepakat berjumlah 6 (enam).

b. Kec. Tebing Tinggi :
1) Kelurahan Tebing Tinggi berjumlah 7 (tujuh) orang;
2) Desa Purwodadi berjumlah 7 (tujuh) orang;
3) Desa Suka Damai berjumlah 7 (tujuh) orang;
4) Desa Adi jaya berjumlah 5 (lima) orang;
5) Desa Kelagian berjumlah 6 (enam) orang;
6) Desa Teluk Pengkah berjumlah 7 (tujuh) orang;
7) Desa Talang Makmur berjumlah 6 (enam) orang;

8) Desa Sungai Keruh berjumlah 6 (enam) orang;
9) Desa Dataran Kempas berjumlah 6 (enam) orang;
10) Desa Delima berjumlah 6 (enam) orang.

c. Kec. Batang Asam :
1) Kelurahan Dusun Kebun berjumlah 6 (enam) orang;
2) Desa Sri Agung berjumlah 6 (enam) orang;
3) Desa Suban berjumlah 5 (lima) orang;
4) Desa Tanjung Bojo berjumlah 4 (empat) orang;
5) Desa Kampung Baru berjumlah 6 (enam) orang;
6) Desa Lubuk Bernai berjumlah 6 (enam) orang;
7) Desa Rawa Medang berjumlah 8 (delapan) orang;
8) Desa Sungai Penoban berjumlah 3 (tiga) orang;
9) Desa Rawang Kempas berjumlah 6 (enam) orang;
10) Desa Lubuk Lawas berjumlah 6 (enam) orang;
11) Desa Sungai Badar berjumlah 5 (lima) orang.

d. Kec. Rendah Mendaluh :
1) Kelurahan Lubuk Kambing berjumlah 9 (sembilan) orang;
2) Desa Pulau Pauh berjumlah 6 (enam) orang;
3) Desa Rantau Benar berjumlah 6 (enam) orang;
4) Desa Lampisi berjumlah 6 (enam) orang;
5) Desa Cinta Damai berjumlah 6 (enam) orang;
6) Desa Sungai Rotan berjumlah 8 (delapan) orang;
7) Desa Muara Danau berjumlah 7 (tujuh) orang;
8) Desa Tanah Tumbuh berjumlah 6 (enam) orang;
9) Desa Sungai Paur berjumlah 6 (enam) orang;
10 Desa Bukit Bakar berjumlah 6 (enam) orang.

e. Kec. Merlung :
1) Kelurahan Merlung berjumlah 7 (tujuh) orang;
2) Desa Lubuk Terap berjumlah 5 (lima) orang;
3) Desa Penyabungan berjumlah 7 (tujuh) orang;
4) Desa Tanjung Paku berjumlah 6 (enam) orang
5) Desa Tanjung benanak berjumlah 4 (empat) orang;
6) Desa Bukit Harapan berjumlah 7 (tujuh) orang;
7) Desa Adi Purwa berjumlah 6 (enam) orang;
8) Desa Pinang Gading berjumlah 6 (enam) orang;
9) Desa Tanjung Makmur berjumlah 4 (empat) orang;
10) Desa Merlung berjumlah 6 (enam) orang.

f. Kecamatan Muara Papalik :
1) Kelurahan Rantau Badak berjumlah 5 (lima) orang;
2) Desa Dusun Mudo berjumlah 6 (enam) orang;
3) Desa Intan Jaya berjumlah 6 (enam) orang;
4) Desa Bukit Indah berjumlah 7 (tujuh) orang;

5) Desa Kemang Manis berjumlah 6 (enam) orang;
6) Desa Rantau Badak Lamo berjumlah 3 (tiga) orang;
7) Desa Lubuk Sebontan berjumlah 4 (empat) orang
8) Desa Sungai papauh berjumlah 5 (lima) orang;
9) Desa Sungai Muluk berjumlah 7 (tujuh) orang;
10 Desa Pematang Balam berjumlah 5 (lima) orang.

g. Kecamatan Tungkal Ilir :
1) Kelurahan Kampung Nelayan berjumlah 12 orang
2) Kelurahan Patunas berjumlah 16 orang
3) Kelurahan Sriwijaya berjumlah 12 orang
4) Kelurahan Sungai Nibung berjumlah 5 (lima) orang;
5) Desa Teluk Sialang berjumlah 3 (tiga) orang;
6) Desa Tungkal Harapan berjumlah 19 orang;
7) Desa Tungkal I berjumlah 7 (tujuh) orang;
8) Kel. Tungkal II berjumlah 16 orang;
9) Kel. Tungkal III berjumlah 15 orang;
10) Kel. Tungkal IV Kota berjumlah 7 (tujuh) orang.

h. Kecamatan Senyerang :
1) Kelurahan Senyerang berjumlah 5 (lima) orang;
2) Desa Sungai Kayu Aro berjumlah 3 (tiga) orang;
3) Desa Teluk Ketapang berjumlah 4 (empat) orang;
4) Desa Sungai Rambai berjumlah 6 (enam) orang;
5) Desa Margo rukun berjumlah 3 (tiga) orang;
6) Desa Kempas jaya berjumlah 3 (tiga) orang;
7) Desa Lumahan berjumlah 4 (empat) orang;
8) Desa Sungai Landak berjumlah 4 (empat) orang;
9) Desa Sungsang berjumlah 3 (tiga) orang;
10) Desa Sei. Kepayang berjumlah 3 (tiga) orang.

i. Kecamatan Seberang Kota :
1) Kelurahan Tungkal V berjumlah 6 (enam) orang;
2) Desa Tungkal IV Desa berjumlah 5 (lima) orang;
3) Desa Kuala Baru berjumlah 5 (lima) orang;
4) Desa Teluk Pulai Raya berjumlah 8 (delapan) orang;
5) Desa Mekar Alam berjumlah 3 (tiga) orang;
6) Desa Harapan Jaya berjumlah 6 (enam) orang;
7) Desa Kuala Kahar berjumlah 6 (enam) orang;
8) Desa Muara seberang berjumlah 3 (tiga).

j. Kecamatan Betara :
1) Kelurahan Mekar Jaya berjumlah 4 (empat) orang;
2) Desa Makmur Jaya berjumlah 3 (tiga) orang;
3) Desa Pematang Lumut berjumlah 5 (lima) orang;
4) Desa Serdang Jaya berjumlah 8 (delapan) orang;

5) Desa Terjun Gajah berjumlah 4 (empat) orang;
6) Desa Lubuk Terentang berjumlah 3 (tiga) orang;
7) Desa Pematang Buluh berjumlah 3 (tiga) orang;
8) Desa Muntialo berjumlah 5 (lima) orang;
9) Desa Teluk Kulbi berjumlah 5 (lima) orang;
10) Desa Mandala Jaya berjumlah 5 (lima) orang;
11) Desa Sungai Terap berjumlah 3 (tiga) orang;
12) Desa Bunga Tanjung berjumlah 4 (empat) orang.

k. Kecamatan Kuala Betara :
1) Kelurahan Betara Kiri berjumlah 9 (empat) orang;
2) Desa Sungai Dualap berjumlah 3 (tiga) orang;
3) Desa Betara Kanan berjumlah 5 (lima) orang;
4) Desa Sungai Gebar berjumlah 4 (empat) orang;
5) Desa Dataran Pinang berjumlah 3 (tiga) orang;
6) Desa Tanjung Pasir berjumlah 3 (tiga) orang;
7) Desa Sei. Gebar Barat berjumlah 4 (empat) orang;
8) Desa Sei. Dungun berjumlah 3 (tiga) orang;
9) Desa Kuala Indah berjumlah 4 (empat) orang;
10) Desa Suak Labu berjumlah 6 (enam) orang.

l. Kecamatan Pengabuan :
1) Kelurahan Teluk Nilau berjumlah 14 orang;
2) Desa Sungai Serindit berjumlah 3 (tiga) orang;
3) Desa Parit Pudin berjumlah 10 (sepuluh) orang;
4) Desa Mekar Jati berjumlah 3 (tiga) orang;
5) Desa Sungai Pampang berjumlah 4 (empat) orang;
6) Desa Parit Sidang berjumlah 3 (tiga) orang;
7) Desa Sungai Jering berjumlah 3 (tiga) orang;
8) Desa Parit Bilal berjumlah 4 (empat) orang;
9) Desa Suak Samin berjumlah 4 (empat) orang;
10) Desa Karya Maju berjumlah 4 (empat) orang;
11) Desa Sungai Baung berjumlah 3 (tiga) orang;
12) Desa Sungai Raya berjumlah 3 (tiga) orang;
13) Desa Pasar Senin berjumlah 3 (tiga) orang.

m. Kecamatan Bram Itam :
1) Kelurahan Bram Itam Kiri berjumlah 11 orang;
2) Desa Bram Itam Kanan berjumlah 6 (enam) orang;
3) Desa Tanjung Senjulang berjumlah 4 (empat) oirang;
4) Desa Pembengis berjumlah 5 (lima) orang;
5) Desa Bram Itam Raya berjumlah 5 (lima) orang;
6) Desa Pantai Gading berjumlah 3 (tiga) orang;
7) Desa Jati Emas berjumlah 5 (lima) orang;
8) Desa Kemuning berjumlah 3 (tiga) orang
9) Desa Semau berjumlah 9 (sembilan) orang;

10) Desa Mekar Tanjung berjumlah 4 (empat).

21. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Pukul 14.00 wib telah dilaksanakan ujian tertulis tahapan seleksi calon PPS (Panitia Pungutan Suara) bertempat di Aula Kantor Desa Serdang Jaya Kec. Betara Kab. Tanjab Barat oleh Komisioner KPU Tanjab Barat.

    Kegiatan dihadiri oleh Komisioner KPU Tanjab Barat SUROSO dan Staf tenaga pendukung IRMA ASTUTI serta peserta ujian tertulis calon anggota PPS Desa Serdang Jaya :

    1) IMAM;
    2) YUSLIM;
    3) LINDA SURYANI;
    4) EPI YULIANTI;
    5) SOLIKIN;
    6) JAKFAR;
    7) ALNUDDIN;
    8) M. MUSTANGIN HADI.

    Rangkaian kegiatan :

    1) Lembaran ujian tertulis dibagikan ke setiap peserta ujian dan dibacakan tata tertib selama ujian berlangsung;
    2) Kegiatan ujian seleksi calon PPS dibatasi waktu selama 1 (satu) jam dengan 30 soal berganda/pilihan;
    3) Dari 8 (Delapan) calon peserta PPS yang ikut ujian tertulis tahapan seleksi akan diambil 6 (enam) orang calon PPS yang akan ikut tahapan seleksi wawancara;
    4) Pengumuman peserta lulus tahapan seleksi calon PPS yang ikut ujian tertulis akan diumumkan pada tanggal 22 Februari 2018 dan selanjutnya bagi yang lulus ujian tertulis akan dilaksanakan tahapan seleksi wawancara pada tanggal 23 s.d 24 Februari 2018 di kantor Kec. Betara Kab. Tanjab Barat.

    Selama kegiatan berlangsung berjalan dengan tidak ditemukan kecurangan antara peserta ujian maupun kecurangan dari tim Komisioner KPU Tanjab Barat. Kegiatan selesai sekira pukul 15.00 Wib.

22. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Pukul 14.00 Wib telah dilaksanakan ujian tertulis tahapan seleksi calon PPS (Panitia Pungutan Suara) yang bertempat di Aula Kantor

Camat Kuala Betara Kel. Betara Kiri Kec. Kuala Betara Kab. Tanjab Barat oleh Komisioner KPU Tanjab Barat.

Kegiatan dihadiri oleh Komisioner KPU Tanjab Barat ANDREAS ARDANETA, SAIFUL ANWAR, SARWANI dan Anggota PPK Kec. Kuala Betara MUHAMMAD ZAKI, RAKHMAT, MUBARAQ ABD GHOFUR beserta Anggota Panwascam Kuala Betara ABDUL HADI, AKHYARUDIN dan ABDUL KHAIR, S.Pdi.

Kegiatan diikuti oleh peserta ujian tertulis calon anggota PPS Kel. Betara Kiri :

1) SADRI
2) M.SAID
3) SULAIMAN
4.) RAZLI
5) HAMSAN
6) M.HENDRY ARRAHMAN
7) SATRIA

Rangkaian kegiatan :

1) Lembaran ujian tertulis dibagikan ke setiap peserta ujian dan di bacakan tata tertib selama ujian berlangsung;
2) Kegiatan ujian seleksi calon PPS dibatasi waktu selama 1 (satu) jam dengan 30 soal berganda/pilihan;
3) Dari 8 (Delapan) calon peserta PPS yang ikut ujian tertulis tahapan seleksi akan diambil 6 (enam) orang calon PPS yang akan ikut tahapan seleksi wawancara;
4) Pengumuman peserta lulus tahapan seleksi calon PPS yang ikut ujian tertulis akan diumumkan pada tanggal 22 Februari 2018 dan selanjutnya bagi yang lulus ujian tertulis akan dilaksanakan tahapan seleksi wawancara pada tanggal 23 s.d 24 Februari 2018 di kantor Kec. Kuala Betara Kab. Tanjab Barat.

23. Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat mengeluarkan pengumuman seleksi hasil tes tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018. Pengumuman hasil tes tertulis, Nomor Pengumuman : 83/PP.05-Pu/01/KPU-Kab/II/2018 dengan hasil sebagai berikut :
    1) Kec. Tungkal ulu :

a) Kel. Pelabuhan dagang
- Lulus 6
- Tidak Lulus

b) Desa Pematang pauh
- Lulus 6
- Tidak Lulus 2

c) Desa Taman raja
- Lulus 6
- Tidak Lulus 3

d) Desa Tanjung Tayas
- Lulus 6
- Tidak Lulus 3

e) Desa Kuala dasal
- Lulus 6
- Tidak Lulus 4

f) Desa Brasau
- Lulus 6
- Tidak Lulus 2

g) Desa Pematang tembesu
- Lulus 6
- Tidak Lulus 1

2) Kec. Tebing tinggi :

a) Kel. Tebing tinggi
- Lulus 5
- Tidak Lulus 2

b) Desa Purwodadi
- Lulus 6
- Tidak Lulus 1

c) Desa Suka damai
- Lulus 6
- Tidak Lulus 1

d) Desa Teluk pengkah
- Lulus 4
- Tidak Lulus 3

3) Kec. Batang asam :
Desa Rawa Medang
- Lulus 6
- Tidak Lulus 2

4) Kec. Rendah Mendaluh :
a) Kel. Lubuk kambing
- Lulus 6
- Tidak Lulus 3

b) Desa Sungai rotan
- Lulus 6
- Tidak Lulus 2

c) Desa Muara danau
- Lulus 6
- Tidak Lulus 1

5) Kec. Merlung :

a) Kelurahan Merlung
- Lulus 6
- Tidak Lulus 1

b) Desa Penyabungan
- Lulus 6
- Tidak Lulus 1

c) Desa Bukit harapan
- Lulus 2
- Tidak Lulus 5

6) Kec. Muara papalik :

a) Desa Bukit indah
- Lulus 4
- Tidak Lulus 1

b) Desa Sungai muluk
- Lulus 5
- Tidak Lulus 2

7) Kec. Tungkal Ilir :

a) Kel. Kampung Nelayan
- Lulus 6
- Tidak Lulus 6

b. Kel. Patunas
- Lulus 6
- Tidak Lulus 10

c) Kel. Sriwijaya
- Lulus 6
- Tidak Lulus 6

d) Desa Tungkal harapan
- Lulus 6
- Tidak Lulus 9

e) Desa Tungkal I
- Lulus 6
- Tidak Lulus 1

f) Kel. Tungkal II
- Lulus 6
- Tidak Lulus 10

g) Kel. Tungkal III
- Lulus 6
- Tidak Lulus 9

h) Kel. Tungkal IV Kota
- Lulus 6
- Tidak Lulus 2

8) Kec. Seberang kota :
Desa Teluk pulai raya
- Lulus 6
- Tidak Lulus 2

9) Kec. Betara :
Desa Serdang jaya
- Lulus 6
- Tidak Lulus 2

10) Kec. Kuala betara :
Kel. Betara kiri
- Lulus 6
- Tidak Lulus 3

11) Kec. Pengabuan :

a) Kel. Teluk nilau
- Lulus 6
- Tidak Lulus 8

b) Desa Parit pudin
- Lulus 6
- Tidak Lulus 4

12) Kec. Bram itam :

a) Kel. Bram itam kiri
- Lulus 6
- Tidak Lulus 5

b) Desa Semau
- Lulus 6
- Tidak Lulus 3

Catatan :
Dari sejumlah Kel/Desa yang melaksanakan tes terulis ditemukan 1 (Desa) yaitu Desa Bukit Harapan Kec. Merlung yang peserta lulusnya kurang dari target yaitu hanya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang yang nantinya dibutuhkan, peserta yang tidak lulus tes tertulis untuk PPS Desa Bukit Harapan

dikarenakan 1 (satu) orang tidak hadir dan 4 (empat) orang hanya mengisi absen dan tidak mengerjakan soal tes tetulis.

Keterangan :

- Bagi Peserta yang telah lulus tes tertulis akan melakukan tes wawancara bersama peserta dari Desa lain yang jumlah pendaftar perdesa/Kelurahan hanya 6 (enam);
- Tes wawancara akan dilakukan oleh KPU Kab. Tanjab Barat terhadap 20 Kel/114 Desa;
- Jadwal dan tempat Tes Wawancara PPS dijadwalkan pada hari sabtu tgl 24 s.d hari minggu 25 Februari 2018 pukul 09.00 wib di masing masing Kantor Camat yaitu sebanyak 13 Kecamatan.

21. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 pukul 09.00 Wib di 13 Kantor Camat se-Kabupaten Tanjab Barat KPU Tanjab Barat melakukan tes wawancara Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 20 Kelurahan dan 114 Desa untuk pelaksanaan Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat. Kegiatan wawancara dilakukan secara serentak oleh KPU Kab. Tanjab Barat, dengan Petugas sebagai berikut :

a. Di Kantor Camat Batang Asam : RENO, JUMIATI
b. Di Kantor Camat Betara : NOPRIADI, RUDI
c. Di Kantor Camat Bram Itam : Hj. NANIK MUSROFAH, SUGENG
d. Di Kantor Camat Kuala Betara :ALI , SUDARMADI
e. Di Kantor Camat Merlung : HAIRUDIN S.Sos, SAINI, MUKTI
f. Di Kantor Camat Muara Papalik : YENI, EKO
g. Di Kantor Camat Pengabuan : TAUFIK, S.Tr, NOVI
h. Di Kantor Camat Renah Mendaluh: AMIN, ANDRE, LATIF
i. Di Kantor Camat Seberang Kota : RAMA SEPYANA , FATIMAH, TABRANI
a. Di Kantor Camat Senyerang : SUTRISNO, S.Pd, S.AP, IRMA
b. Di Kantor Camat Tebing Tinggi : A. HADZIQ, SH.I, RETNO
c. Di Kantor Camat Tungkal Ilir : APNIZAL, S.Pt, TARI
d. Di Kantor Camat Tungkal Ulu : LEVI, NITA

Jumlah peserta tes wawancara sebanyak 6 (enam) orang atau kurang dari 6 (enam) orang / Desa/Kelurahan.

Jumlah Kelurahan 20, jumlah Desa 114 se-Kab. Tanjab Barat terdiri dari :

a. Kec. Tungkal Ilir : - 9 (sembilan) Kelurahan;
- 1 (satu) Desa.

b. Kec. Bram Itam : -1 (satu) Kelurahan;
- 9 (sembilan) Desa.

c. Kec. Seberang Kota : - 1 (satu) Kelurahan;
- 7 (tujuh) Desa.

d. Kec. Betara : - 1 (satu) Kelurahan;
- 11 Desa.

e. Kec. Kuala Betara - 1 (satu) Kelurahan;
- 9 (sembilan) Desa.

f. Kec. Merlung : - 1 (satu) Kelurahan;
- 9 (sembilan) Desa.

g. Kec. Muara Papalik : - 1 (satu) Kelurahan;
- 9 (sembilan) Desa.

h. Kec. Renah Mendaluh :- 1 (satu) Kelurahan;
- 9 (sembilan) Desa.

i. Kec. Tungkal Ulu : - 1 (satu) Kelurahan;
- 9 (sembilan) Desa.

j. Kec. Batang Asam : -1 (satu) Kelurahan;
- 10 (sepuluh) Desa.

k. Kec. Tebing Tinggi : -1 (satu) Kelurahan;
- 9 (sembilan) Desa.

l. Kec. Pengabuan : - 1 (satu) Kelurahan;
- 11 Desa

m. Kec. Senyerang : - 1 (satu) Kelurahan;
-9 (sembilan) Desa.

22. Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 KPU Kab. Tanjab Barat mengeluarkan pengumuman Hasil Tes Wawancara/Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk di 20 Kelurahan dan 114 Desa se Kab. Tanjab Barat Pada Pemilu 2019. Nomor Pengumuman : 81/PP.05-Pu/01/KPU-Kab/II/2018 tentang hasil seleksi penelitian administrasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu tahun 2019 di Kab. Tanjab Barat dengan hasil seleksi penelitian administrasi PPS, sebagai berikut :

a. Kecamatan Tungkal Ilir :

1) Kel. Kampung Nelayan 3 (tiga) orang;
2) Kel. Patunas 3 (tiga) orang;
3) Kel. Sriwijaya 3 (tiga) orang;
4) Kel. Sungai Nibung 3 (tiga) orang;
5) Desa Teluk Sialang 3 (tiga) orang;
6) Kel. Tungkal harapan 3 (tiga) orang;
7) Desa Tungkal I 3 (tiga) orang;
8) Kel. Tungkal II 3 (tiga) orang;
9) Kel. Tungkal III 3 (tiga) orang;
10) Kel. Tungkal IV Kota 3 (tiga) orang;

b. Kecamatan Seberang kota :
1) Kel. Tungkal V 3 (tiga) orang;
2) Desa Tungkal IV desa 3 (tiga) orang;
3) Desa Kuala baru 3 (tiga) orang;
4) Desa Teluk pulai raya 3 (tiga) orang;
5) Desa Mekar alam 3 (tiga) orang;
6) Desa Harapan jaya 3 (tiga) orang;
7) Desa Kuala Kahar 3 (tiga) orang;
8) Desa Muara seberang 3 (tiga) orang;

c. Kecamatan Bram itam :
1) Kel. Bram itam kiri 3 (tiga) orang;
2) Desa Bram itam kanan 3 (tiga) orang;
3) Desa Tanjung senjulang 3 (tiga) orang;
4) Desa Pembengis 3 (tiga) orang;
5) Desa Bram itam raya 3 (tiga) orang;
6) Desa Pantai gading 3 (tiga) orang;
7) Desa Jati emas 3 (tiga) orang;
8) Desa Kemuning 3 (tiga) orang;
9) Desa Semau 3 (tiga) orang;
10) Desa Mekar tanjung 3 (tiga) orang;

d. Kecamatan Betara :
1) Kel. Mekar jaya 3 (tiga) orang;
2) Desa Makmur jaya 3 (tiga) orang;
3) Desa Pematang lumut 3 (tiga) orang;
4) Desa Serdang jaya 3 (tiga) orang;
5) Desa Terjun gajah 3 (tiga) orang;
6) Desa Lubuk terentang 3 (tiga) orang;
7) Desa Pematang buluh 3 (tiga) orang;
8) Desa Muntialo 3 (tiga) orang;
9) Desa Teluk kulbi 3 (tiga) orang;
10) Desa Mandala jaya 3 (tiga) orang;

11) Desa Sungai terap 3 (tiga) orang;
12) Desa Bunga tanjung 3 (tiga) orang;

e. Kecamatan Kuala betara :
1) Kel. Betara kiri 3 (tiga) orang;
2) Desa Sungai dualap 3 (tiga) orang;
3) Desa Betara kanan 3 (tiga) orang;
4) Desa Sungai gebar 2 (dua) orang;
5) Desa Dataran pinang 3 (tiga) orang;
6) Desa Tanjung pasir 3 (tiga) orang;
7) Desa Sungai gebar barat 3 (tiga) orang;
8) Desa Sungai dungun 3 (tiga) orang;
9) Desa Kuala indah 3 (tiga) orang;
10) Desa Suak labu 3 (tiga) orang;

f. Kec. Merlung :
1) Kel. Merlung 3 (tiga) orang;
2) Desa Lubuk terap 3 (tiga) orang;
3) Desa Penyabungan 3 (tiga) orang;
4) Desa Tanjung paku 3 (tiga) orang;
5) Desa Tanjung benanak 3 (tiga) orang;
6) Desa Bukit harapan 1 (satu) orang;
7) Desa Adi Purwa 3 (tiga) orang;
8) Desa Pinang gading 3 (tiga) orang;
9) Desa Tanjung makmur 3 (tiga) orang;
10) Desa Merlung 3 (tiga) orang;

g. Kec. Rendah Mendaluh :
1) Kel. Lubuk kambing 3 (tiga) orang;
2) Desa Pulau pauh 3 (tiga) orang;
3) Desa Rantau benar 3 (tiga) orang;
4) Desa Lampisi 3 (tiga) orang;
5) Desa Cinta damai 3 (tiga) orang;
6) Desa Sungai rotan 3 (tiga) orang;
7) Desa Muara danau 3 (tiga) orang;
8) Desa Tanah tumbuh 3 (tiga) orang;
9) Desa Sungai paur 3 (tiga) orang;
10) Desa Bukit bakar 3 (tiga) orang;

h. Kecamatan Muara papalik :
1) Kel. Rantau badak 3 (tiga) orang;
2) Desa Dusun Mudo 3 (tiga) orang;
3) Desa Intan jaya 3 (tiga) orang;
4) Desa Bukit indah 3 (tiga) orang;
5) Desa Kemang manis 3 (tiga) orang;

6) Desa Rantau badak lamo 3 (tiga) orang;
7) Desa Lubuk sebontan 3 (tiga) orang;
8) Desa Sungai papauh 3 (tiga) orang;
9) Desa Sungai muluk 3 (tiga) orang;
10) Desa Pematang balam 3 (tiga) orang;

i. Kec. Tungkal ulu :
1) Kel. Pelabuhan dagang 3 (tiga) orang;
2) Desa Pematang pauh 3 (tiga) orang;
3) Desa Taman raja 3 (tiga) orang;
4) Desa Tanjung Tayas 3 (tiga) orang;
5) Desa Badang 3 (tiga) orang;
6) Desa Kuala dasal 3 (tiga) orang;
7) Desa Brasau 3 (tiga) orang;
8) Desa Pematang tembesu 3 (tiga) orang;
9) Desa Gemuruh 3 (tiga) orang;
10) Desa Badang sepakat 3 (tiga) orang.

j. Kec. Tebing tinggi :
1) Kel. Tebing tinggi 3 (tiga) orang;
2) Desa Purwodadi 3 (tiga) orang;
3) Desa Suka damai 3 (tiga) orang;
4) Desa Adi jaya 3 (tiga) orang;
5) Desa Kelagian 3 (tiga) orang;
6) Desa Teluk pengkah 3 (tiga) orang;
7) Desa Talang makmur 3 (tiga) orang;
8) Desa Sungai keruh 3 (tiga) orang;
9) Desa Dataran kempas 3 (tiga) orang;
10) Desa Delima 3 (tiga) orang;

k. Kec. Batang asam :
1) Kel. Dusun kebun 3 (tiga) orang;
2) Desa Sri agung 3 (tiga) orang;
3) Desa Suban 3 (tiga) orang;
4) Desa Tanjung bojo 3 (tiga) orang;
5) Desa Kampung baru 3 (tiga) orang;
6) Desa Lubuk Bernai 3 (tiga) orang;
7) Desa Rawa Medang 3 (tiga) orang;
8) Desa Sungai penoban 3 (tiga) orang;
9) Desa Rawang kempas 2 (dua) orang;
10) Desa Lubuk lawas 3 (tiga) orang;
11) Desa Sungai badar 3 (tiga) orang;

l. Kecamatan Senyerang :
1) Kel. Senyerang 3 (tiga) orang;
2) Desa Sungai kayu Aro 3 (tiga) orang;

3) Desa Teluk Ketapang 3 (tiga) orang;
4) Desa Sungai Rambai 3 (tiga) orang;
5) Desa Margo rukun 3 (tiga) orang;
6) Desa Kempas jaya 2 (dua) orang;
7) Desa Lumahan 3 (tiga) orang;
8) Desa Sungai landak 3 (tiga) orang;
9) Desa Sungsang 3 (tiga) orang;
10) Desa Sungai Kepayang 3 (tiga) orang;

m. Kecamatan Pengabuan :
1) Ke. Teluk nilau 3 (tiga) orang;
2) Desa Sungai serindit 3 (tiga) orang;
3) Desa Parit pudin 3 (tiga) orang;
4) Desa Mekar jati 3 (tiga) orang;
5) Desa Sungai Pampang 3 (tiga) orang;
6) Desa Parit sidang 3 (tiga) orang;
7) Desa Sungai jering 3 (tiga) orang;
8) Desa Parit Bilal 3 (tiga) orang;
9) Desa Suak Samin 3 (tiga) orang;
10) Desa Karya maju 3 (tiga) orang;
11) Desa Sungai baung 3 (tiga) orang;
12) Desa Sungai raya 3 (tiga) orang;
13) Desa Pasar senen 3 (tiga) orang.

Ada 3 (tiga) Desa yang diumumkan oleh KPU Kab. Tanjab Barat hanya 2 (dua) orang Calon anggota PPS terpilih dikarenakan pada saat tes wawancara yang hadir hanya 2 (dua) orang yaitu :

a. Desa Kempas Jaya Kec. Senyerang;
b. Desa Rawang Kempas Kec. Batang Asam;
c. Desa Sungai Gebar Kec. Kuala Betara.

Ada 1 (satu) Desa yang diumumkan oleh KPU Kab. Tanjab Barat hanya 1 (satu) orang calon anggota PPS terpilih dikarenakan pada saat tes wawancara yang hadir hanya 2 (dua) orang tetapi salah satu peserta sudah 2 (dua) periode menjadi PPS pada Pemilu yang telah lalu, desa yang dimaksud yaitu Desa Bukit Harapan Kec. Merlung. Menyikapi hal tersebut maka KPU Kab. Tanjab Barat akan berkoordinasi dengan 4 Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang wilayahnya ada kekurangan guna berkoordinasi untuk merekrut calon anggota PPS guna mencukupi jumlah 3 (orang) perdesa yang kurang tersebut.

23. Pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 KPU Kab. Tanjab Barat mengumumkan hasil tes wawancara calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang telah dilakukan wawancara susulan oleh KPU Kab. Tanjab Barat pada tanggal 1 s/d 2 Maret 2018 untuk 4 (empat) Desa yang masih kurang jumlah PPS nya dari 3 (tiga) orang hanya ada 2 (orang) Perdesa yang ada, karena pada saat tes wawancara serentak pada tanggal 24 Februari 2018 oleh KPU Kab. Tanjab Barat hanya dihadiri 2 (orang).

1. Nomor Pengumuman : 112/PP 05.-PU/01/1506/KPU-Kab/III/2018.

2. Nama yang lulus tes wawancara pada tanggall 1 s/d 2 Maret 2018 sebagai berikut :

   a. ISKANDAR HAFIZ AKBAR untuk Desa Sungai Gebar Kec. Kuala Betara;

   b. ISTIQOMAH dari desa Kempas Jaya Kec. Senyerang;

   c. SUDARJA untuk Desa BukitHarapan Kec. Merlung;

   d. ADI PURNAWAN untuk Desa Bukit Harapan Kec. Merlung;

   e. KASBY untuk Desa Rawang Kempas Kec. Batang Asam.

   Keterangan :
   dengan telah dikeluarkannya pengumuman tersebut diatas maka seluruh anggota panitia pemungutan suara (PPS) untuk di 20 Kelurahan dan 114 Desa Se Kab. Tanjab Barat terpenuhi 3 (tiga) orang Perdesa dan Kelurahan

24. Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 13.59 Wib bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Kab. Tanjab Barat dilaksanakan PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KAB. TANJAB BARAT PADA PEMILU 2019.

   Kegiatan dihadiri oleh Bupati Kab. Tanjab Barat Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS.
   Didampingi oleh :
   1) Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat Drs. H. AMIR SAKIB;

2) Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt.

Dan dihadiri oleh :
1) Sekda Kab. Tanjab Barat Drs. H. AMBOK TUO, MM;
2) Kasdim 0419/Tanjab MAYOR INF. FIRDAUS;
3) Kasat Intelkam Polres Tanjab Barat IPTU DADANG SAPUTRA;
4) Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
5) Kasi Pidsus Kejari Kab. Tanjab Barat;
6) Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I;
7) Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat;
8) Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat R. AZIZ MUSLIM, M.AP;
9) Para Camat Se-Kab. Tanjab Barat;
10) Pimpinan Parpol;
11) 39 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

25. Pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Kegiatan Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Tungkal Ilir pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU Kab. Tanjab Barat dihadiri oleh :

a. Anggota Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat, HAIRUDIN, S.Sos.;
b. Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kab. Tanjab Barat NOPRIADI;
c. Perwakilan Panwascam Tungkal Ilir :
1) SADAM HUSEIN, S.Kom;
2) ANDRE DARMA.
d. Anggota PPK Kec.Tungkal Ilir :
1. EKA WAHYUDI;
2. E. HENDRI.C.
e. Unit 1 Satintelkam Polres Tanjab Barat;
f. 28 Anggota PPS.

25. Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 KPU Kab. Tanjab Barat melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Kelurahan dan Desa di 12 Kecamatan untuk Pemilu 2019 Kab. Tanjab Barat.

a) Pukul 13.00 Wib di Kantor Camat Seberang Kota. Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :

1) APNIZAL, S.Pt;
2) YENI KARLINDA, S.H.;
3) ALI AKBAR;
4) NITA ZAKIA, S.E.;
5) AHMAD HUMAIDI, S.E.;
6) REZA FAHLEVI.

Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :

a. Kel. Tungkal V;
b. Desa Tungkal IV desa;
c. Desa Kuala baru;
d. Desa Teluk pulai raya;
e. Desa Mekar alam;
f. Desa Harapan jaya;
g. Desa Kuala Kahar;
h. Desa Muara seberang.

b) Pukul 13.00 Wib di Kantor Camat Bram itam. Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :

1) APNIZAL, S.Pt.;
2) YENI KARLINDA, S.H.;
3) ALI AKBAR;
4) NITA ZAKIA, S.E.;
5) AHMAD HUMAIDI, S.E.;
6) REZA FAHLEVI.

Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :

a. Kel. Bram itam kiri;
b. Desa Bram itam kanan;
c. Desa Tanjung senjulang;
d. Desa Pembengis;
e. Desa Bram itam raya;
f. Desa Pantai gading;
g. Desa Jati emas;
h. Desa Kemuning;
i. Desa Semau;
j. Desa Mekar tanjung.

c) Pukul 09.00 Wib di Kantor Lurah Mekar Jaya Kec. Betara, Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :

1) APNIZAL, S.Pt.;
2) YENI KARLINDA, S.H.;

3) ALI AKBAR;
4) NITA ZAKIA, S.E.;
5) AHMAD HUMAIDI, S.E.;
6) REZA FAHLEVI.

Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :
a. Kel. Mekar jaya
b. Desa Makmur jaya;
c. Desa Pematang lumut;
d. Desa Serdang jaya;
e. Desa Terjun gajah;
f. Desa Lubuk terentang;
g. Desa Pematang buluh;
h. Desa Muntialo;
i. Desa Teluk kulbi;
j. Desa Mandala jaya;
k. Desa Sungai terap;
l. Desa Bunga tanjung.

d) Pukul 14.00 Wib di Kantor Camat Kuala betara Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :
1) APNIZAL, S.Pt.;
2) YENI KARLINDA, S.H.;
3) ALI AKBAR;
4) NITA ZAKIA, S.E.;
5) AHMAD HUMAIDI, S.E.;
6) REZA FAHLEVI.

Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :
a. Kel. Betara kiri;
b. Desa Sungai dualap;
c. Desa Betara kanan;
d. Desa Sungai gebar;
e. Desa Dataran pinang;
f. Desa Tanjung pasir;
g. Desa Sungai gebar barat;
h. Desa Sungai dungun;
i. Desa Kuala indah;
j. Desa Suak labu.

e) Pukul 09.00 Wib di Kantor Camat Merlung. Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :

1) HAIRUDIN, S.Sos;
2) M. AMIN, S.H.;
3) ANDREAS ARDANETA, A.md.;
4) RENO ILMA MIZAMI;
5) M. SAINI;
6) FATIMAH, S.E.

Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :

a. Kel. Merlung;
b. Desa Lubuk terap;
c. Desa Penyabungan;
d. Desa Tanjung paku;
e. Desa Tanjung benanak;
f. Desa Bukit harapan;
g. Desa Adi Purwa;
h. Desa Pinang gading;
i. Desa Tanjung makmur;
j. Desa Merlung.

f) Pukul 11.00 Wib dikantor Camat Muara papalik Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :

1) HAIRUDIN, S.Sos;
2) M. AMIN, S.H.;
3) ANDREAS ARDANETA, A.md.;
4) RENO ILMA MIZAMI;
5) M. SAINI;
6) FATIMAH, S.E.

Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :

a. Kel. Rantau badak;
b. Desa Dusun Mudo;
c. Desa Intan jaya;
d. Desa Bukit indah;
e. Desa Kemang manis;
f. Desa Rantau badak lamo;
g. Desa Lubuk sebontan;
h. Desa Sungai papauh;
i. Desa Sungai muluk;
j. Desa Pematang balam.

g) Pukul 15.00 Wib di Kantor Camat Rendah Mendaluh. Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :
   1) HAIRUDIN, S.Sos;
   2) M. AMIN, S.H.;
   3) ANDREAS ARDANETA, A.md.;
   4) RENO ILMA MIZAMI;
   5) M. SAINI;
   6) FATIMAH, S.E.

   Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :
   a. Kel. Lubuk kambing;
   b. Desa Pulau pauh;
   c. Desa Rantau benar;
   d. Desa Lampisi;
   e. Desa Cinta damai;
   f. Desa Sungai rotan;
   g. Desa Muara danau;
   h. Desa Tanah tumbuh;
   i. Desa Sungai paur;
   j. Desa Bukit bakar.

h) Pukul 09.00 Wib dikantor Camat Tebing tinggi. Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :
   1) AHMAD HADZIQ, S.HI.;
   2) NOPRIADI;
   3) RUDI KARTONO;
   4) FADILAH UTARI, ST;
   5) EKO PRIHARYANTO.

   Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :
   a. Kel. Tebing tinggi;
   b. Desa Purwodadi;
   c. Desa Suka damai;
   d. Desa Adi jaya;
   e. Desa Kelagian;
   f. Desa Teluk pengkah;
   g. Desa Talang makmur;
   h. Desa Sungai keruh;
   i. Desa Dataran kempas;
   j. Desa Delima.

i) Pukul 13.00 Wib dikantor Camat Tungkal ulu. Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :
   1) AHMAD HADZIQ, S.HI.;
   2) NOPRIADI;
   3) RUDI KARTONO;
   4) FADILAH UTARI, ST;
   5) EKO PRIHARYANTO.

   Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :
   a. Kel. Pelabuhan dagang;
   b. Desa Pematang pauh;
   c. Desa Taman raja;
   d. Desa Tanjung Tayas;
   e. Desa Badang;
   f. Desa Kuala dasal;
   g. Desa Brasau;
   h. Desa Pematang tembesu;
   i. Desa Gemuruh;
   j. Desa Badang sepakat.

j. Pukul 15.00 Wib dikantor Camat Batang asam. Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :
   1) AHMAD HADZIQ, S.HI.;
   2) NOPRIADI;
   3) RUDI KARTONO;
   4) FADILAH UTARI, ST;
   5) EKO PRIHARYANTO.

   Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :
   a. Kel. Dusun kebun;
   b. Desa Sri agung;
   c. Desa Suban;
   d. Desa Tanjung bojo;
   e. Desa Kampung baru;
   f. Desa Lubuk Bernai;
   g. Desa Rawa Medang;
   h. Desa Sungai penoban;
   i. Desa Rawang kempas;
   j. Desa Lubuk lawas;
   k. Desa Sungai badar.

k) Pukul 11.00 Wib dikantor Camat Senyerang. Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :

1) AHMAD HADZIQ, S.HI.;
2) NOPRIADI;
3) RUDI KARTONO;
4) FADILAH UTARI, ST;
5) EKO PRIHARYANTO.

Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak 3 (tiga) orang Anggota PPS antara lain :

a. Kel. Senyerang;
b. Desa Sungai kayu Aro;
c. Desa Teluk Ketapang;
d. Desa Sungai Rambai;
e. Desa Margo rukun;
f. Desa Kempas;
g. Desa Lumahan;
h. Desa Sungai landak;
i. Desa Sungsang;
j. Desa Sungai.

l) Pukul 14.00 Wib di Kantor Camat Pengabuan. Sebagai petugas yang melantik dari KPU Kab. Tanjab Barat antara lain :

1) M. TAUFIK, S.Tr.;
2) SUTRISNO, S.Pd, S.AP.;
3) M. KARTUBI, S.Pdi.;
4) SARWANI, A.md.;
5) JUMIATI;
6) RETNO WULANDARI;
7) IRMA ASTUTI, S.Kom.

Masing-masing Kel/Desa melantik sebanyak (tiga) orang Anggota PPS antara lain :

a. Kel. Teluk nilau;
b. Desa Sungai serindit;
c. Desa Parit pudin;
d. Desa Mekar jati;
e. Desa Sungai Pampang;
f. Desa Parit sidang;
g. Desa Sungai jering;
h. Desa Parit Bilal;
i. Desa Suak Samin;
j. Desa Karya maju;
k. Desa Sungai baung;
l. Desa Sungai raya;
m. Desa Pasar senen.

Keterangan :

a) Kab. Tanjab Barat terdapat 13 Kecamatan yang terdiri dari 20 Kelurahan dan 114 Desa;
b) PPS Kec. Tungkal Ilir sudah dilakukan Pelantikan oleh KPU Kab. Tanjab Barat Pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 Pukul 21.30 Wib di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat;
c) Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah dihadiri oleh Rohaniawan, Camat, PPK, Panwascam, Polsek;
d) Selama Kegiatan berjalan aman dan tertib dilakukan Pengamanan Tertutup oleh Unit Intelkam Polsek Jajaran.

28. Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Hotel Syari'ah Jl. Prof. Sri Soedewi Kuala Tungkal KPU Kab. Tanjab Barat melaksanakan Rapat Koordinasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Tahun 2019 Kab. Tanjab Barat.

Kegiatan dipimpin oleh Anggota KPU Kab. Tanjab Barat Divisi Data Pemilih SUROSO, S.Pt dan didampingi oleh Sekretaris KPU Kab. Tanjab Barat SUTRISNO, S.Pd., S.AP., anggota KPU Kab. Tanjab Barat Divisi Hukum A. HADZIQ, S.H., dan anggota KPU Kab. Tanjab Barat Divisi Sosialisasi HAIRUDIN, S.Sos., dan dihadiri oleh para Kasubbag dan staf Sekretariat KPU Kab. Tanjab Barat serta 39 Orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kab. Tanjab Barat.

Rangkaian kegiatan :

a) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
b) Pembacaan Do'a;
c) Sambutan Pimpinan Rakor;
d) Penyampaian materi oleh Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat, dengan Materi sebagai berikut :

1)Kebijakan umum dan Kode etik penyelenggara emilu;
2) Pelanggaran dan Pidana Pemilu;
3) Pembentukan Pantarlih;
4) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu;
5) Tugas dan Wewenang PPK;
6) Tugas Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

Kegiatan Pada TW.II

1. Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 09.00 Wib di ruang rapat Kantor Badan Kesbangpol Tanjab Barat dilaksanakan rapat persiapan pemantapan pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Kecamatan di wilayah Kab. Tanjab Barat. Rapat dipimpin Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat R. AZIZ MUSLIM, M.AP serta dihadiri :
   1) Kabag Pem Umum Setda Tanjab Barat DIANDA PUTRA, S.STP;
   2) Kasat Intelkam Polres Tanjab Barat IPTU DADANG SAPUTRA, SH;
   3) Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat BRIPKA HARIS FADHILLAH;
   4) Anggota KPU Kab. Tanjab Barat HAIRUDIN, S.Sos;
   5) Anggota KPU Kab. Tanjab Barat TAUFIK, S.Tr;
   6) Staf Sekretariat Panwaslu Kab. Tanjab Barat AHMAD S.M. DANI;
   7) Kabid Bina Politik Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat TAUFIQURRAHMAN, SE;
   8) Staf Bidang Bina Politik Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat.

   Hasil rapat sebagai berikut :
   1) Sosialisasi Pemilu terdiri 1 orang moderator dan 5 narasumber :
      a) Asisten 1 Setda Kab. Tanjab Barat;
      b) Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat;
      c) KPU Kab. Tanjab Barat;
      d) Panwaslu Kab. Tanjab Barat;
      e) Polres Tanjab Barat.
   2) Rencana Sosialisasi dimulai tanggal 23 April 2018;
   3) Tim Sosialisasi terdiri dari 2 (dua) tim;
   4) Peserta sosialisasi sebanyak 30 orang terdiri dari Perwakilan Polsek, Perwakilan Koramil, PPK, Panwascam, Staf Kecamatan, perwakilan Kades;
   5) Jadwal sosialisasi akan dibuat Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat.

   Kegiatan selesai pukul 10.15 Wib berjalan tertib dan lancar.

2. Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09. 00 Wib di Hotel Syariah Kuala Tungkal telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan dan Bimtek Panitia Pendaftaran Pemilih (pantarlih) pada pemilu 2018 di KPU Tanjab Barat. Kegiatan dipimpin anggota KPU Kab. Tanjab Barat Divisi hukum AHMAD HADZIQ, SH dan didampingi Komisioner dan para Kasubbag Sekretariat KPU Tanjab Barat serta dihadiri Sekretaris PPK yaitu masing - masing Sekcam, PPK Se Kab. Tanjab Barat berjumlah 39 orang dan Staf Sekretariat KPU Kab. Tanjab Barat. Kegiatan diisi dengan Paparan dan arahan komisioner menjelang Pencocokan dan Penelitian oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Coklit Pantarlih) mulai tanggal 17 April 2018 s.d 17 Mei 2018 sesuai PKPU RI No 5 tahun 2018 atas Perubahan PKPU RI No 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

3. Pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib dilaksanakan kegiatan Bimtek PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pemilu Tahun 2018/2019 Se - Kecamatan Betara. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat.

Hasil yang dicapai :

1) Hadir dalam Bimtek PPS Se - Kecamatan Betara sebagai berikut :
a) Camat Betara TONI ERMAWAN PUTRA, S.STP. Msi;
b) Anggota Komisioner KPUD Tanjab Barat SURORO, Spt;
c) Kapolsek Betara yang diwakili Kasium Polsek AIPTU WIDIHARTO;
d) Ketua PPK Kec. Betara MINANTO, Spdi beserta Anggota PPK;
e) Anggota Panwascam Betara FAUZI;
f) Ketua dan Anggota PPS Se - Kecamatan Betara sebanyak 36 Peserta.

2) Sambutan Camat Betara sebagai berikut :
a) Seluruh petugas PPS Se - Kecamatan Betara yang saat ini diberikan bimtek agar diperhatikan dan dipahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menghadapi Tahapan Pemilu 2018/2019;
b) Mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan tahapan Pemilu sehingga tidak terjadi permasalahan terutama terkait DPT.

3) Sambutan Kasium Polsek Betara :

a) Peserta Bimtek PPS Se Kecamatan Betara diharapkan dapat mempedomani buku panduan tahapan Pemilu terkait tugas dan tanggung jawab sebagai PPS sehingga mampu menerapkan kepada Pantarlih tingkat Kelurahan/Desa;
b) Jagalah Netralisasi sebagai Petugas PPS karena hal ini rawan dapat terjadinya Konflik pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 di Wilayah Kec. Betara dan apabila diketemukan hal yang menonjol agar dikoordinasikan dengan PPK Kec. Betara;
c) Mari bersama menjaga Sitkamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Betara demi berjalannya Pesta Demokrasi Pemilu Tahun 2019 dan tetap menjaga kekompakan dan sinergitas antara Forkompimcam sehingga apabila terjadinya Konflik pada rawan Pemilu dapat segera diantisipasi bersama.

4) Penyajian Materi Bimtek PPS oleh Komisioner KPUD Tanjab Barat SUROSO,Spt adalah sebagai berikut :
a) Penjelasan mengenai Coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih;
b) Tata Kerja PPS sesuai dengan Buku Pedoman Kerja PPS;
c) Tata Cara Pengisian Formulir Daftar Pemilih oleh Pantarlih.

Kegiatan selesai sekira pukul 11.30 Wib, selama kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar.

4. Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertampat di depan Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Apel Kesiapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) untuk 10 (sepuluh) Kelurahan dan 2 (dua) Desa se Kec. Tungkal Ilir, kegiatan dipimpin oleh anggota KPU Prov. Jambi SANUSI serta dihadiri Komisioner, Sekretaris dan Staf Sekretariat KPU Kab. Tanjab Barat, PPK, PPS se Kec. Tungkal Ilir.

Kegiatan selesai sekira pukul 09.00 Wib selanjutnya Komisioner KPU Tanjab Barat melakukan Pemantauan Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih terhadap beberapa tokoh yaitu :

a. Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS (Bupati Kab. Tanjab Barat);
b. Hj. CICI HALIMAH, S.E. (Anggota DPRD Kab. Tanjab);

c. KH. HALIM KASIM, S.H. (Ketua MUI Kab. Tanjab Barat);
d. SYAFRIZAL LUBIS (Anggota DPRD Kab. Tanjab Barat);
e. H. ABDUL HAMID, S.H. (Anggota DPRD Kab. Tanjab Barat).

Keterangan :

a. jumlah TPS di Kab. Tanjab Barat berjumlah 1.004;
b. setiap TPS ada 1 (satu) orang Petugas Pantarlih;
c. Kelengkapan Petugas Pantarlih diantaranya Formulir, ATK, Stiker tanda telah di Coklit;
d. Cara Kerja Petugas Pantarlih diantaranya yaitu masyarakat harus dapat menunjukkan secara langsung E-KTP atau surat Keterangan E-KTP sementara dari Dinas Dukcapil atau apabila tidak ada ditempat dapat berkomunikasi melalui video call dengan menunjukkan E-KTP.

5. Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 09.20 Wib bertempat di Ex. Gedung serba guna Kuala Tungkal dilaksanakan Pagelaran Seni Budaya Menyongsong 1 (satu) tahun Pemilu Serentak 2019.

Tema "Melalui Pagelaran Seni Budaya Membangun Pemilu Berdaulat Guna Mensukseskan Pemilu Serentak 2019".

Kegiatan dihadiri oleh :
a. Wakil Bupati Tanjab Barat Drs. H. AMIR SAKIB;
b. Ketua PN Kab. Tanjab Barat AHMAD PETTENSILI, S.H., M.H.;
c. Kasatintelkam Polres Tanjab Barat IPTU DADANG SAPUTRA;
d. Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt;
e. Perwakilan Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
f. Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I;
g. Kabid Bina Politik Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat TAUFIQURRAHMAN, S.H.;
h. Sekretaris Satpol PP RUSMAN, S.Pd;
i. Sekretaris KPU Kab. Tanjab Barat SUTRISNO, S.Pd, S.Ap;
j. Sekretaris Panwaslu Kab. Tanjab Barat ZAKARIA;
k. Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Kab. Tanjab Barat M. NASIR.

Dihadiri juga oleh :
a. Komisioner KPU, staf Sekretariat KPU Kab. Tanjab Barat;

b. Anggota Panwaslu Kab. Tanjab Barat;
c. Ketua/perwakilan 16 Parpol peserta Pemilu tahun 2019 diantaranya PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, BERKARYA, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PBB, PKPI;
d. Kepala Sekolah SMA 1 Kuala Tungkal;
e. Kepala SMK N 1 Kuala Tungkal;
f. PPK Tungkal Ilir;
g. Panwaslu Kec. Tungkal Ilir;
h. PPS Se Kec. Tungkal Ilir;
i. Ormas;
j. Wartawan Media Cetak dan elektronik lokal;
k. Siswa SMA/SMK/MA sederajat yg ada di Kuala Tungkal peserta pagelaran seni dan budaya;
l. Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kuala Tungkal peserta Pagelaran seni dan budaya.

Susunan acara :
a. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
b. penampilan tari persembahan dari siswi SMA 2 Kuala Tungkal;
c. pembacaan Do'a;
d. laporan Ketua Panitia;
e. sambutan Ketua KPU Kab. Tanjab Barat menyampaikan diantaranya sebagai berikut :

1) 17 April 2019 adalah tahapan pencoblosan Pemilu 2019, yaitu Pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Prov, DPRD Kab.;

2) pada hari ini KPU se Indonesia secara serentak melaksanakan pagelaran seni dan budaya untuk mensosialisasikan 1 tahun menyongsong Pemilu 2019;

3) pada bulan Mei adalah tahapan Pendaftaran Caleg untuk DPRD Kab oleh karena itu setiap Parpol harus menempatkan minimal 30 % keterwakilan perempuan;

4) pagelaran seni dan budaya kali ini kami fokuskan kepada SMA/SMK/MA sederajat karena siswa dan sisiwi ini adalah Potensi Pemilih Pemula.

f. sambutan Wakil Bupati Tanjab Barat :

1) untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan peserta pemilu maupun masyarakat walaupunpun nantinya pilihan berbeda;

2) berharap kegiatan pagelaran seni dan budaya sebagai proses pendidikan politik;

3) agar kita semua menjaga keharmonisan ketenteraman dan keamananan di Kab. Tanjab Barat;

g. penampilan Jingle KPU Jaya oleh staf KPU Kab. Tanjab Barat;
h. ramah tamah hiburan yang diiringi organt QQ Musik.

Pembukaan selesai pukul 11.00 Wib dilanjutkan dengan acara pagelaran seni budaya sebagai berikut :
a. SLB menampilkan kesenian Pantomim;
b. SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMK N 1 menampilkan Kesenian Tari;
c. MAN 1 dan PHI menampilkan kesenian Hadrah;

6. Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 10.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Merlung dilaksanakan Sosialisasi Pemantapan Pemilu 2019 di Kab Tanjab Barat, dengan moderator Staf Kec. Merlung NORA serta pemberi Materi Sosialisasi sbb :

1) Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat Drs. H. AZIZ MUSLIM, M.AP;
2) Ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt;
3) Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I;
4) KBO Sat Intelkam Polres Tanjab Barat IPDA EFRIYADI.

Peserta Sosialisasi sebanyak 30 orang yang terdiri dari Staf Kantor Camat, Kades, Lurah, Tokoh masyarakat, tokoh agama. Setelah Pemberian materi dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab.Kegiatan selesai pukul 12.00 Wib berjalan lancar

7. Pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 10.30 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Tungkal Ulu dilaksanakan Sosialisasi Pemantapan Pemilu 2019 di Kab Tanjab Barat, dengan moderator Sekcam Tungkal Ulu NANDA LIZA derta pemberi Materi :

1) Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Tanjab PONDI SAYUTI.
2) Anggota KPU Kab. Tanjab Barat HAIRUDIN, S.Sos
3) Anggota Panwaslu Kab. Tanjab Barat Dr. M. YASIN, SH.I, MH
4) Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab BRIPKA HARIS FADHILLAH

Peserta Sosialisasi berjumlah 30 orang yang terdiri dari Staf Kantor Camat, Kades, Lurah, Tokoh masyarakat, Tokoh agama. Setelah Pemberian materi dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab Kegiatan selesai pukul 12.30 Wib berjalan lancar.

8. Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, KPU Tanjab Barat, Kesbangpol Tanjab Barat, Panwaslu dan Satintelkam Polres Tanjab Barat melaksanakan Sosialisasi Pemantapan Pemilu 2019 Kab. Tanjab Barat sebagai berikut :

a. sekira pukul 10.00 Wib bertempat di aula kantor Camat Muara Papalik dilaksanakan sosialisasi dengan narasumber :

1) Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat PONDI SAYUTI;
2) Anggota KPU Kab. Tanjab Barat AHMAD HADZIQ, SH.I;
3) Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I;
4) KBO Sat Intelkam Polres Tanjab Barat IPDA EFRIYADI.

Bertindak sebagai Moderator yakni Sekcam Kec. Muara Papalik JOAN PRAYUDA dan dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta sosialisasi yang terdiri dari Staf Kantor Camat, Kades, Lurah, Tokoh masyarakat dan Tokoh agama. setelah Pemberian materi oleh Nara Sumber dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab, kegiatan selesai pukul 12.00 Wib berjalan lancar.

b. sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Renah Mendaluh dilaksanakan sosialisasi dengan narasumber :

1) Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat PONDI SAYUTI.
2) Anggota KPU Kab. Tanjab Barat SUROSO, S.Pt
3) Anggota Panwaslu Kab. Tanjab Barat MON REZI, S.Sos.I

4) Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab BRIPKA HARIS FADHILLAH

Bertindak sebagai moderator yakni Staf Kec. Renah Mendaluh SAMSIR dan dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta sosialisasi yang terdiri dari Staf Kantor Camat, Kades, Lurah, Tokoh masyarakat dan Tokoh agama. setelah Pemberian materi oleh Nara Sumber dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab, kegiatan selesai pukul 12.30 Wib berjalan lancar.

9. Pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 14.30 Wib bertempat di Aula Rapat Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih 2019 untuk Pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat.

Rapat dipimpin oleh Anggota KPU Kab. Tanjab Barat SUROSO, S.Pt dan didampingi oleh Anggota KPU Kab. Tanjab Barat AHMAD HADZIQ, S.H.I

Dihadiri oleh :
a. TAUFIQURRAHMAN, S.H. (Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat);
b. FERIZANO (Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat);
c. HATTA HARAHAP (Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat);
d. KIKI KARLINA (Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat);
e. BRIPKA HARIS FADHILLAH (Ps. Kanit I Satintelkam Polres Tanjab Barat).

Penyampaian Anggota KPU Kab. Tanjab Barat sebagai berikut :
a. sehubungan saat ini KPU Kab. Tanjab Barat melalui Petugas Pantarlih melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terhadap masyarakat mulai tanggal 17 April 2018 s.d 17 Mei 2018 maka warga yang tidak sesuai alamat dengan E-KTP maka akan dimasukkan dalam formulir khusus sebagai dasar Data Pemilih Sementara (DPS);

b. didalam PKPU RI No 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu bahwa syarat pemilih salah satunya adalah berdomisili diwilayah administratif yang disertai dengan E-KTP;

c. petugas Pantarlih menemukan warga yang tidak sesuai dengan alamat setempat dimasukkan ke dalam format khusus;

d. meminta Dinas Dukcapil untuk dapat membantu mencari solusi terhadap warga yang ada disuatu daerah yang tidak sesuai dengan E-KTP.

Penyampaian dari Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat sebagai berikut :

a. bahwa Dinas Dukcapil tidak bisa merubah identitas E-KTP apabila tidak ada surat pindah dari asal;

b. warga yang sudah pindah dan tidak mengurus surat pindah memang menjadi kendala, salah satu cara mengurus surat pindah adalah warga tersebut tidak harus datang ke daerah asal tapi cukup menghubungi keluarga disuatu tempat tersebut dan apabila sudah diurus dan mendapatkan Nomor Registrasi dari Dinas Dukcapil tersebut segera melaporkan ke Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat untuk dimasukkan datanya.

Penyampaian Ps. Kanit I Satintelkam Polres Tanjab Barat sebagai berikut :

a. salah satu kerawanan Pemilu adalah data pemilih karena kerawanannya adalah pemilih ganda dan warga yang akan protes karena nantinya tidak masuk dalam DPT;

b. mengharapkan kepada Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat dapat membuat berupa surat dan himbauan kepada *stake holder* terhadap tata cata mengurus surat pindah, karena banyak warga yang terkadang malas mengurus surat pindah karena harus pulang ke daerah asalnya;

c. apabila ada surat atau himbauan dari Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat maka dapat menjadi dasar Polres Tanjab Barat untuk menyurati jajaran agar dapat bersinergi dengan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, Lurah, Desa sampai RT dalam hal kepengurusan surat pindah tersebut.

Penyampaian Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat :

Apabila ada surat atau himbauan dari Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat maka akan menjadi dasar Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat untuk diumumkan melalui media baik

itu Radio, Media Elektronik, media sosial agar masyarakat luas dapat mengetahuinya.

9. Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 10.23 Wib bertempat di aula Hotel Masa Kini Kuala Tungkal dilaksanakan RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PEMILU 2019 PEMILU SERENTAK 2019.

Kegiatan dimpin oleh Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I
Didampingi oleh Anggota Panwaslu Kab. Tanjab Barat :
a. Dr. M. YASIN, SH.I, M.H;
b. MONREZI, S.Sos.I

Dihadiri oleh 11 Perwakilan Parpol :
a. PKB;
b. GERINDRA;
c. PDIP;
d. GOLKAR;
e. NASDEM;
f. BERKARYA;
g. PKS;
h. PERINDO;
i. PPP;
j. PAN;
k. DEMOKRAT.

Panwascam Se Kab. Tanjab Barat sebanyak 39 orang
Dimonitor oleh Unit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat
Susunan acara :
a. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya
b. Menyanyikan lagu Mars Bawaslu
c. Laporan Ketua Panitia yg disampaikan oleh Sekretaris Panwaslu Kab. Tanjab Barat
d. Sambutan Ketu Panwaslu Kab. Tanjab Barat menyampaikan sbb :
   1) Kegiatan ini diselenggarakan guna membahas tahapan Pemilu agar Parpol dan Panwascam dapat mengetahui apa yg boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mencegah Pelanggaran oleh Parpol.

   2) Panwascam agar berkoordinasi dengan PAC Parpol serta gencar melakukan sosialisasi terhadap lapisan masyarakat tentang peran pengawas Pemilu.

e. Sambutan Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat :

1) Polres bertanggung jawab dalam menjaga Kamtibmas

2) Dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2019 mari kita bersama sama bersinergi dalam menjaga Kamtibmas agar Pemilu 2019 Di Indonesia khususnya di Kab. Tanjab Barat berjalan aman dan lancar

3) Hasil Rapat Koordinasi pada hari ini kami mengingatkan kepd Parpol untuk dapat menyampaikan kepada pimpinan Parpol dan Tingkat bawah karena telah disampaikan oleh Ketua Panwaslu tadi bahwa Panwascam untuk dapat mensosialisasikan di tingkat kecamatan

4) Kami menghimbau kepada Parpol apabila Kantor sekretariatnya belum memasang Plang agat dapat memasang plang untuk mempermudah anggota Polri maupun Penyelenggara pemilu menemui

5) Dalam hal kegiatan kami juga menghimbau kepada Parpol untuk memberitahukan pihak kepolisian minimal 3 hari dan sampaikan juga kepada Panwaslu serta mungkin lebih baik sebelum melakukan koordinasi dulu dengan panwaslu tentang giat yg dimaksud

6) Sehubungan masih digodoknya PKPU serta juknis tentang kampanye nanti apabila sudah ada diharapkan kita duduk bersama kembali dengan Pemda, Penyelenggara Pemilu, Parpol serta stake holder untuk menyatukan persepsi

g. Pemberian Materi oleh Anggota Panwaslu Kab. Tanjab Barat tentang :

1) Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-sd/06/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal Kampanye Pada Pemilihan umum;
2) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K. Bawaslu/PM.00.00/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebelum jadwal tahapan kampanye.

10. Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 pukul 09.15 Wib bertempat di Aula Hotel Syariah Kuala Tungkal dilaksanakan

Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Menuju Pemilu Serentak 2019.

11. Pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 09.50 Wib bertempat di Aula Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Kursus Kepemiluan Menuju Pemilu Serentak 2019 kegiatan di pimpin oleh Anggota KPU Kab. Tanjab Barat AHMAD HADZIQ, SH.I

12. Pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pukul 11.00 Wib Bertempat di Kantor Desa Sungai Dungun Kec. Kuala Betara dilaksanakan KURSUS KEPEMILUAN MENUJU PEMILU SERENTAK 2019

13. Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 pukul 09.30 Wib bertempat di aula kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan kursus kepemiluan menuju Pemilu serentak 2019. kegiatan di pimpin oleh ketua KPU Kab. Tanjab Barat APNIZAL, S.Pt.

14. Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wib telah dilaksanakan kegiatan arahan KPUD Provinsi. Jambi Korwil Tanjab Barat didampingi KPUD Tanjab Barat Korwil Betara tentang coklit data pemilih Pemilu DPR/DPR Prov/DPR Kab dan Presiden tahun 2019.bertempat di sekretariat PPS Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat.

15. Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Pukul 16.00 wib bertempat di Kantor DPD Partai Berkarya Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) Partai Berkarya Kab. Tanjab Barat. Kegiatan dihadiri oleh :

    1) Ketua DPW Partai Berkarya Prov. Jambi Sdr. AMBIAR USMAN, S.H;
    2) Sekretaris DPW Partai Berkarya Prov. Jambi Sdr. AYANG KURNIAWAN;
    3) Koordinator Partai Berkarya Dapil Tanjab Barat dan Tanjab Timur Sdr. H. ARFAH;
    4) Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Tanjab Barat H. ABDURRAHMAN;
    5) Pengurus DPD Partai Berkarya Kab. Tanjab Barat;
    6) Ketua DPC Partai Berkarya Kab. Tanjab Barat;
    7) Kader Partai Berkarya ± 20 orang.

6) Sambutan Ketua DPD Partai Kab. Tanjab Barat sebagai berikut :

a) Sebagaimana amanat pada Rapimnas Partai Berkarya untuk bertekad berjuang memenangkan Pemilu 2019;
b) Permasalahan yang Riil kita hadapi saat ini adalah Pengkaderan dan masih belum terbentuk kepengurusan Partai Berkarya di Tingkat Kel/Desa, namun kita Patut berbangga karena Partai Baru kita dapat membentuk 13 DPC Se Kab. Tanjab Barat;
b) Pada Rapimda ini mari kita rumuskan untuk memecahkan Permasalahan.

16. Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 mulai pukul 10.00 wib s/d 13.30 wib Telah Dilaksanakan Rapat Pleno Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Betara sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Aula Kantor Camat Betara.

Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Betara 11 Desa dan 1 Kelurahan yakni sebagai berikut :

1. Serdang Jaya
Jumlah TPS = 10
Pemilih Baru = 283 Laki-laki dan 297 Perempuan
Pemilih TMS = 411 Laki-laki dan 424 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 161 Laki-laki dan 156 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 74 Laki-laki dan 76 Perempuan
DPS = 1880 Orang, 961 Laki-laki dan 919 Perempuan

2. Lubuk Terentang
Jumlah TPS = 4
Pemilih Baru = 186 Laki-laki dan 173 Perempuan
Pemilih TMS = 182 Laki-laki dan 170 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 21 Laki-laki dan 15 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 35 Laki-laki dan 24 Perempuan
DPS = 1041 Orang, 529 Laki-laki dan 512 Perempuan

3. Terjun Gajah

Jumlah TPS = 7
Pemilih Baru = 505 Laki-laki dan 474 Perempuan
Pemilih TMS = 591 Laki-laki dan 549 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 4 Laki-laki dan 5 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 64 Laki-laki dan 73 Perempuan
DPS = 1621 Orang, 848 Laki-laki dan 773 Perempuan

4. Teluk Kulbi
Jumlah TPS = 6
Pemilih Baru = 358 Laki-laki dan 368 Perempuan
Pemilih TMS = 359 Laki-laki dan 350 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 41 Laki-laki dan 46 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 67 Laki-laki dan 66 Perempuan
DPS = 1627 Orang, 836 Laki-laki dan 791 Perempuan

5. Sungai Terap
Jumlah TPS = 5
Pemilih Baru = 261 Laki-laki dan 256 Perempuan
Pemilih TMS = 236 Laki-laki dan 237 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 17 Laki-laki dan 10 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 22 Laki-laki dan 16 Perempuan
DPS = 1201 Orang, 624 Laki-laki dan 577 Perempuan

6. Desa Pematang Lumut
Jumlah TPS = 13
Pemilih Baru = 736 Laki-laki dan 690 Perempuan
Pemilih TMS = 842 Laki-laki dan 782 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 93 Laki-laki dan 75 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 40 Laki-laki dan 37 Perempuan
DPS = 3060 Orang, Laki-laki dan Perempuan

7. Kelurahan Mekar Jaya
Jumlah TPS = 8
Pemilih Baru = 117 Laki-laki dan 127 Perempuan
Pemilih TMS = 135 Laki-laki dan 132 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 130 Laki-laki dan 124 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 36 Laki-laki dan 39 Perempuan
DPS = 1873 Orang, 922 Laki-laki dan 951 Perempuan

8. Desa Mandala Jaya
Jumlah TPS = 4

Pemilih Baru = 39 Laki-laki dan 41 Perempuan
Pemilih TMS = 93 Laki-laki dan 75 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 34 Laki-laki dan 37 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 39 Laki-laki dan 19 Perempuan
DPS = Orang, Laki-laki dan Perempuan

9. Desa Makmur Jaya
Jumlah TPS = 6
Pemilih Baru = 77 Laki-laki dan 72 Perempuan
Pemilih TMS = 84 Laki-laki dan 62 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 75 Laki-laki dan 54 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 48 Laki-laki dan 39 Perempuan
DPS = 1219 Orang, 6491 Laki-laki dan 570 Perempuan

10. Desa Muntialo
Jumlah TPS = 4
Pemilih Baru = 224 Laki-laki dan 210 Perempuan
Pemilih TMS = 287 Laki-laki dan 284 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 14 Laki-laki dan 13 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 26 Laki-laki dan 25 Perempuan
DPS = 767 Orang, 404 Laki-laki dan 363 Perempuan

11. Desa Pematang Buluh
Jumlah TPS = 2
Pemilih Baru = 20 Laki-laki dan 26 Perempuan
Pemilih TMS = 32 Laki-laki dan 34 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 32 Laki-laki dan 13 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 34 Laki-laki dan 24 Perempuan
DPS = 544 Orang, 295 Laki-laki dan 249 Perempuan

12. Desa Bunga Tanjung
Jumlah TPS = 12
Pemilih Baru = 370 Laki-laki dan 381 Perempuan
Pemilih TMS = 446 Laki-laki dan 403 Perempuan
Perbaikan Data Pemilih = 45 Laki-laki dan 32 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 97 Laki-laki dan 108 Perempuan
DPS = 2871 Orang, 1482 Laki-laki dan 1389 Perempuan

17. Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 mulai pukul 10.00 wib s/d 13.30 wib Telah Dilaksanakan Rapat Pleno

Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Kuala Betara sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Aula Kantor Camat Kuala Betara.

Pembacaan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Kuala Betara 9 Desa dan 1 Kelurahan yakni sebagai berikut :

1). Kelurahan Betara kiri
Jumlah TPS = 5
Pemilih Aktif = 566 Laki-laki dan 548 Perempuan
Pemilih Baru = 22 Laki-laki dan 28 Perempuan
Pemilih TMS = 35 Laki-laki dan 40 Perempuan
Pemilih Pindah TPS = 15 Laki-laki dan 10 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 42 Laki-laki dan 41 Perempuan

2). Desa Betara Kanan
Jumlah TPS = 5
Pemilih Aktif = 322 Laki-laki dan 290 Perempuan
Pemilih Baru = 27 Laki-laki dan 27 Perempuan
Pemilih TMS = 38 Laki-laki dan 15 Perempuan
Pemilih Pindah TPS = 338 Laki-laki dan 290 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 29 Laki-laki dan 28 Perempuan

3). Desa Dataran pinang
Jumlah TPS = 5
Pemilih Aktif = 509 Laki-laki dan 444 Perempuan
Pemilih Baru = 29 Laki-laki dan 43 Perempuan
Pemilih TMS = 51 Laki-laki dan 52 Perempuan
Pemilih Pindah TPS = 0 Laki-laki dan 0 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 63 Laki-laki dan 69 Perempuan

4). Desa Sungai Dungun
Jumlah TPS = 4
Pemilih Aktif = 334 Laki-laki dan 313 Perempuan
Pemilih Baru = 17 Laki-laki dan 23 Perempuan
Pemilih TMS = 61 Laki-laki dan 57 Perempuan
Pemilih Pindah TPS = 52 Laki-laki dan 46 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 24 Laki-laki dan 20 Perempuan

5). Desa Suak labu
Jumlah TPS = 4
Pemilih Aktif = 425 Laki-laki dan 374 Perempuan
Pemilih Baru = 31 Laki-laki dan 34 Perempuan
Pemilih TMS = 70 Laki-laki dan 56 Perempuan
Pemilih Pindah TPS = 3 Laki-laki dan 2 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 37 Laki-laki dan 19 Perempuan

6). Desa Sungai Gebar
Jumlah TPS = 3
Pemilih Aktif = 323 Laki-laki dan 300 Perempuan
Pemilih Baru = 45 Laki-laki dan 45 Perempuan
Pemilih TMS = 38 Laki-laki dan 22 Perempuan
Pemilih Pindah TPS = 1 Laki-laki dan 1 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 69 Laki-laki dan 58 Perempuan

7). Desa Sungai Gebar Barat
Jumlah TPS = 4
Pemilih Aktif = 364 Laki-laki dan 360 Perempuan
Pemilih Baru = 20 Laki-laki dan 29 Perempuan
Pemilih TMS = 42 Laki-laki dan 39 Perempuan
Pemilih Pindah TPS = 8 Laki-laki dan 8 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 23 Laki-laki dan 22 Perempuan

8). Desa Panjung Pasir
Jumlah TPS = 6
Pemilih Aktif = 552 Laki-laki dan 475 Perempuan
Pemilih Baru = 46 Laki-laki dan 49 Perempuan
Pemilih TMS = 54 Laki-laki dan 55 Perempuan
Pemilih Pindah TPS = 100 Laki-laki dan 83 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 40 Laki-laki dan 36 Perempuan

9). Desa Sungai Dualap
Jumlah TPS = 6
Pemilih Aktif = 552 Laki-laki dan 483 Perempuan
Pemilih Baru = 21 Laki-laki dan 18 Perempuan
Pemilih TMS = 65 Laki-laki dan 68 Perempuan
Pemilih Pindah TPS = 26 Laki-laki dan 26 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 32 Laki-laki dan 25 Perempuan

10). Desa Kuala Indah
Jumlah TPS = 3
Pemilih Aktif = 286 Laki-laki dan 249 Perempuan
Pemilih Baru = 15 Laki-laki dan 22 Perempuan
Pemilih TMS = 28 Laki-laki dan 29 Perempuan
Pemilih Pindah TPS = 102 Laki-laki dan 89 Perempuan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik = 14 Laki-laki dan 10 Perempuan

18. Pada hari Kamis Tanggal 14 Juni 2018 pukul 10.15 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Tebing Tinggi di laksanakan rapat Pleno DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran) Pemilihan umum Tahun 2019 oleh PPK Kec. Tebing Tinggi.

Hadir dalam kegiatan :

a. Camat Tebing Tinggi di wakili Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kec. Tebing Tinggi Sdr. GUNARDI;

b. Kasub Sektor Tebing Tinggi di wakili Banit Intelkam BRIPKA JULIANTO, S.H.;

c. Ketua PPK Kec. Tebing Tinggi BAHRUN GULTOM, S.Pd. beserta anggota;

d. Ketua Panwaslu Kec. T. Tinggi DENI MS dan Anggota;

e. Perwakilan Pengurus Partai Politik Kec. Tebing Tinggi;

f. Ketua PPS dari 1 Kelurahan dan 9 Desa Dalam Kec. Tebing Tinggi;

g. Tokoh Masyarkat Kec. Tebing Tinggi.

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran Pemilihan Umum 2019 Kec. Tebing Tinggi sbb :

a. Jumlah Pemilih Baru : 5.738;
b. Pemilih tidak memenuhi syarat : 7.621;
c. Perbaikan data pemilih : 1.108;
d. Jumlah rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial NON KTP-elektronik di Kec. Tebing Tinggi dengan jumlah pemilih sebanyak 655.

Kegiatan selesai pukul. 11. 20 Wib berjalan aman dan tertib.

19. Pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 Pukul 20.43 Wib bertempat di Hotel Rivoli Jl. Prof. Sri Soedewi Kuala Tungkal dilaksanakan RAPAT PLENO TERBUKA Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

- Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat HAIRUDIN, S.Sos
- Didampingi oleh :

1) APNIZAL, S.Pt (Anggota KPU Prov. Jambi)
2) NUR HOLIK, M.Pd (Anggota KPU Prov. Jambi)
3) AHMAD HADZIQ, SH.I (Anggota KPU Kab. Tanjab Barat)
4) M. ILYAS, S.Kom.I (Anggota KPU Kab. Tanjab Barat)
5) HADI SISWA, S.Pd.I (Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat)
6) MON REZI, S.Sos.I (Anggota Panwaslu Kab. Tanjab Barat)
7) SUTRISNO, S.Pd, S.AP (Sekretaris KPU Kab. Tanjab Barat)

- Dihadiri oleh :

1) TAUFIQURRAHMAN, SH (Kabid Bina Politik Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat)
2) ERMA HARIYANI, S.E (Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil)
3) BRIPKA HARIS FADHILLAH (PS. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat)
4) 13 PPK Se Kab. Tanjab Barat
5) Perwakilan Parpol :

PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, BERKARYA, PKS, PERINDO, PPP, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PBB, PKPI.

- Hasil Rapat Pleno Sbb :

a. Kec. Batang Asam :
1. Jmh Kel/Desa : 11
2. Jmh TPS : 87
3. Jmh Pemilih : 19.060
(L : 9941, P : 9119)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih : 1.060
(L : 564, P : 496)

b. Kec. Betara :
1. Jmh Kel/Desa : 12

2. Jmh TPS : 81
3. Jmh Pemilih 19.511
(L : 10.105, P : 9.406)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih : 1.128
(L : 582, P : 546)

c. Kec. Bram Itam :
1. Jmh Kel/Desa : 10
2. Jmh TPS : 58
3. Jmh Pemilih : 13.404
(L : 7.069, P : 6335)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih : 685
(L : 357, P : 328)

d. Kec. Kuala Betara :
1. Jmh Kel/Desa : 10
2. Jmh TPS : 45
3. Jmh Pemilih : 9.038
(L : 4.724, P : 4314)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih 699
(L : 373, P : 326)

e. Kec. Merlung :
1. Jmh Kel/Desa : 10
2. Jmh TPS : 54
3. Jmh Pemilih : 10.552
(L : 5.381, P : 5.171)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih : 1.066
(L : 532, P :534)

f. Kec. Muara Papalik :
1. Jmh Kel/Desa : 10
2. Jmh TPS : 40
3. Jmh Pemilih : 6771
(L : 3.535, P : 3236)
* Non E - KTP :
Jmh Pemilih 430 (L : 218, 212)

g. Kec. Pengabuan :
1. Jmh Kel/Desa : 13
2. Jmh TPS : 87
3. Jmh Pemilih 18.332 (L : 9.623, P: 8.709)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih : 948
(L: 494, P :454)

h. Kec. Renah Mendaluh :
1. Jmh Kel/Desa : 10
2. Jmh TPS : 47
3. Jmh Pemilih : 9.816
(L : 5065, P : 4751)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih 336
(L :156, P : 180)

i. Kec. Seberang Kota :
1. Jmh Kel/Desa : 8
2. Jmh TPS : 31
3. Jmh Pemilih : 7.418
(L : 3.919, P : 3. 499)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih 395
(L : 205, P : 190)

j. Kec. Senyerang :
1. Jmh Kel/Desa : 10
2. Jmh TPS : 83
3. Jmh Pemilih : 18.972
(L : 9.941, P : 9031)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih : 1.507
(L : 729, P : 778)

k. Kec. Tebing Tinggi :
1. Jmh Kel/Desa : 10
2. Jmh TPS : 108
3. Jmh Pemilih :21.124
(L : 10.937, P : 10.187)

* Non E-KTP :

Jmh Pemilih : 655
(L : 351, P :304)

l. Kec. Tungkal Ilir :
1. Jmh Kel/Desa : 10
2. Jmh TPS : 238
3. Jmh Pemilih : 46.432
(L : 23.511, P : 22.921)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih :
2.048 (L : 1.095, P : 953)

m. Kec. Tungkal Ulu :
1. Jmh Kel/Desa : 10
2. Jmh TPS : 45
3. Jmh Pemilih : 9.000
(L : 4.548, P : 4.452)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih : 500
(L : 271, P :229)

TOTAL DAFTAR PEMILIH SEMENTARA :
1. Jmh Kel/Desa : 134
2. Jmh TPS : 1.004
3. Jmh Pemilih : 209.430
(L :108.299, P : 101.131)

* Non E-KTP :
Jmh Pemilih : 11.457
(L : 5.927, P : 5.530)

Giat selesai Pukul 23.30 Wib berjalan aman dan lancar

Ket :
1. Jmh Pemilih Non E-KTP yg berjmh 11.457 sudah termasuk didalam Jmh DPS 209.430

2. Dinas Dukcapil meminta KPU untuk menjelaskan Kriteria Non E - KTP dan segera menyampaikan ke Dinas Dukcapil untuk ditindak lanjuti

3. KPU Kab. Tanjab Barat melakukan Pencatatan pada saat Coklit yg termasuk Non E-KTP yaitu :

- Pemilih Pemula Pada saat Pemilu berusia 17 th
- Memang belum merekam E-KTP
- Domisili/Pindah
- E-KTP Hilang
- Hanya ada Surat keterangan

Kegiatan Pada TW.III

1. Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Pukul 14.30 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rakor Persiapan Calon anggota DPRD Kab. Tanjab Barat Pada Pemilu 2019

   Rakor Dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat HAIRUDIN, S.Sos

   Kegiatan dihadiri oleh :
   a. Komisioner, Sekretaris dan Kasubbag KPU Kab. Tanjab Barat;
   b. Panwaslu Kab. Tanjab Barat;
   c. Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat;
   d. Perwakilan RS. Daud Arif Kuala Tungkal;
   e. Perwakilan Dinas Dikbud Kab. Tanjab Barat;
   f. Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat;
   g. Penghubung Parpol yang hadir sebanyak 12 Parpol :
   - PKB;
   - PDIP;
   - GOLKAR ;
   - PKS;
   - PPP;
   - BERKARYA ;
   - HANURA;
   - PAN;
   - PBB;
   - NASDEM;
   - DEMOKRAT ;
   - PERINDO.
2. Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Pukul 10.30 Wib s/d 12.00 Wib bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Kab. Tanjab Barat KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Tes Kejiwaan (Rohani) Bakal Caleg DPR RI/DPRD Prov/DPRD Kab. Tanjab Barat yang difasilitasi oleh KPU Kab. Tanjab Barat bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Prov. Jambi dan RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal.

   Kegiatan diikuti oleh 171 orang Peserta dan di hadiri oleh :

1) Dr. VICTOR ELIEZER, S.P.KJ dari Rumah Sakit Jiwa Prov. Jambi;
2) dr. BUDIAWAN AKBAR selaku Kabid Pelayanan RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal;
3) Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat;
4) Panwaslu Kab. Tanjab Barat.

Total sampai hari ini yang telah melaksanakan tes kejiwaan sebanyak 287 orang.

3. Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Pukul 14.30 Wib s/d 16.30 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rakor Pengajuan Bakal Calon DPRD Kab. Tanjab Barat sehungan dengan telah di undangkannya Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota oleh Kemenkum HAM RI dan KPU RI pada tanggal 2 Juli 2018.

4. Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Pukul 09.30 Wib bertempat di Hotel Masa Kini Jl. Kihajar Dewantara Kuala Tungkal dilaksanakan Sosialisasi Pembinaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2019

5. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Pengajuan Bakal Calon anggota Legislatif DPRD Kab. Tanjab Barat dalam Pemilu 2019 oleh Parpol.

7. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 Pukul 09.15 Wib bertempat di Hotel Masa Kini Kuala Tungkal dilaksanakan RAPAT PLENO TERBUKA Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

   Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab Barat HAIRUDIN, S.Sos

   Didampingi oleh :
   1) AHMAD HADZIQ, SH.I (Anggota KPU Kab. Tanjab Barat)
   2) M. ILYAS, S.Kom.I (Anggota KPU Kab. Tanjab Barat)
   3) SUTRISNO, S.Pd, S.AP (Sekretaris KPU Kab. Tanjab Barat)

8. Pada hari Jum'at tanggal 3 Agusus 2018 Pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Koordinasi tentang Rencana lanjutan Sosialisasi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Kecamatan wilayah Kab. Tanjab Barat

   kegiatan dipimpin oleh Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat R. AZIZ MUSLIM, M.AP

   Dihadiri oleh :

   a. Ketua KPU Kab. Tanjab Barat HAIRUDIN, S.Sos;
   b. Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I;
   c. KBO Satintelkam Polres Tanjab Barat IPDA MUJIRIN;
   d. Ps. Kanit 1 Satintelkam Polres Tanjab Barat BRIPKA HARIS FADHILLAH;
   e. Kabid Bina Politik Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat TAUFIQURRAHMAN, SH.

9. Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 pukul 09.30 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Tebing Tinggi dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT.

10. Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 pukul 10.30 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Batang Asam dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT.

11. Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Pukul 14.40 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Pleno Penyampaian Hasil Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD dan Sinkronisasi rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tanjab Barat Untuk Pemilu Tahun 2019.

12. Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 pukul 1.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Bram Itam dilaksanakan sosialisasi pemantapan pemilu 2019 di kab. Tanjab barat, sebagai moderator adalah Sekcam Bram Itam.

    Nara Sumber sebagai berikut :

1) Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat Bpk. PONDI SAYUTI;
2) Komisioner KPU Kab. Tanjab Barat M. ILYAS, S.Kom.I;
3) Ketua Panwaslu Kab. Tanjab Barat HADI SISWA, S.Pd.I;
4) Ps Kanit 1 Sat Intelkam Polres Tanjab Barat BRIPKA HARIS FADHILLAH.

b. Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 pukul 10.30 Wib bertempat di Aula Kantor camat betara dilaksanakan sosialisasi pemantapan pemilu 2019 di kab. tanjab barat sebagai moderator adalah Sekcam Betara.

13. Pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Pukul 15.10 Wib bertempat di Hotel Masa Kini Kuala Tungkal dilaksanakan RAPAT PLENO TERBUKA Penyampaian Hasil Penetapan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

14. Pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Tungkal Ilir dilaksanakan Sosialisasi pemantapan pemilu 2019 di Kab. Tanjab Barat

15. Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Kuala Betara dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT

16. Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 11.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Seberang Kota dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT

17. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 09.30 Wib bertempat di Kantor PKK Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka pelaksanaan Pengasawasan Pemilu 2019 Di Kab. Tanjab Barat

18. Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 pukul 06.00 Wib bertempat di Alun alun Kota Kuala Tungkal dilaksanakan DEKLARASI PEMILU 2019 YANG AMAN, SEJUK DAN DAMAI yang diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Kab. Tanjab Barat.

19. Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Pukul 15.00 Wib bertempat di Kantor KPU Kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Koordinasi Penempatan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Untuk Pemilu 2019 Di Kab. Tanjab Barat

20. Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, pukul 10.30 Wib di Aula Hotel AW Syariah Kuala Tungkal dilaksanakan Bimtek Aplikasi Pelaporan dana kampanye oleh KPU Tanjab Barat.

21. Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Pukul 15.00 Wib bertempat di Kantor KPU kab. Tanjab Barat dilaksanakan Rapat Persiapan Pemilu 2019. Kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Tanjab HAIRUDIN, S.Sos.I, didampingi oleh Anggota KPU Kab. Tanjab Barat M. ILYAS, S.Kom.I.

22. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Pengabuan dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT.

23. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 11.00 Wib bertempat di Aula Kantor Camat Senyerang dilaksanakan SOSIALISASI PEMANTAPAN PEMILU 2019 DI KAB. TANJAB BARAT.

- PGU Anggaran : Rp. 88.005.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 87.825.000,-
- Sisa Anggaran : Rp. 900.000,-
- Realisasi Anggaran : 98,81 %
- Realisasi Fisik Kegiatan : 100% (13 Kecamatan se Tanjung Jabung Barat)

Kegiatan ini menitik beratkan pada peningkatan pelaksanaan koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik Pemilu 2019 dalam rangka Pemantauan dan Pelaporan.

2.4.5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

Anggaran yang disediakan pada APBD murni adalah sebesar Rp 56.475.000 dengan pembiayaan pada Belanja

Pegawai Panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp 55.250.000 , Honorarium pegawai tidak tetap sebesar Rp10.000.000, Belanja makan dan minum rapar Rp 800.000 . Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Rp - ,serta belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp - , target 50 orang . Adapun hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman tentang peraturan dan perundang – undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan teknis penelitian Dokumen Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan serta peningkatan pemahaman tentang peraturan dan perundang – undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan ini telah di ikuti tidak ada oleh ormas yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

12. Pagu Anggaran = Rp 56.475.000.00,-
13. Realisasi anggaran sebesar = Rp 56.475.000.00,-
14. Sisa Anggaran = Rp –
15. Realisasi anggaran = 100%
16. Reaslisasi Fisik Kegiatan = 100%

Selengkapnya Realisasi capaian Program dan Kegiatan serta serapan anggaran dan prosentasenya dapat di lihat pada table :5 dan 6.

B. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran dalam mewujudkan setiap misi dapat diuraikan secara ringkas dan dapat disajikan sebagai berikut :

Misi Ke 1:

Mewujudkan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas, misi ini bertujuan untuk: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk menunjang profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan, dengan sasaran: Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan yang efektif, Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/ teknis perkantoran,Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran, Tersedianya sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kegiatan yang berkontribusi dalam mewujudkan misi ini adalah: Kegiatan kegiatan yang bersifat Administrasi baik administrasi umum dan kepegawaian maupun adminidtrasi keuangan serta admiistrasi pelaporan.

Misi Ke 2.

Mewujudkan iklim kehidupan diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa di daerah, misi ini bertujuan untuk : Memantapkan wawasan kebangsaan sebagai perekat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sasaran Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegrasi bangsa), Kegiatan yang berkontribusi dalam mewujudkan misi ini adalah : 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama , 2) Sosialisasi Permendagri No 20 Tahun 2016 Tentang Ketahanan Seni dan Budaya, 3) Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan.

Misi Ke 3.

Meningkatnya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan lembaga infrastruktur politik., , misi ini bertujuan

untuk : Terwujudnya stabilitas politik yang dinamis dan kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan, dengan sasaran: Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan politik masyarakat yang berorientasi pada pengembangan masyarakat Madani yang dicita – citakan, Kegiatan yang berkontribusi dalam mewujudkan misi ini adalah:1). Tim Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Parpol, 2). Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM, 3). Pemantapan dalam rangka rencana pelaksanaan PEMILU, 4). Pembinaan pendidikan Politik Masyarakat,5) Tim Perkembangan Politik Daerah.

Misi Ke 4

Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi, mencegah, terjadinya Gangguan dan Keamanan.; misi ini bertujuan untuk : Terwujudnya peran aktif dalam mengantisipasi, mencegah, terjadinya Gangguan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dengan sasaran : Meningkatnya pencegahan dini penanganan Gangguan Keamanan, Kegiatan yang berkontribusi dalam mewujudkan misi ini adalah : 1) Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan,2). Komonitas Inteligen Daerah (Kominda),3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Misi Ke 5

Mewujudkan pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan masyarakat. misi ini bertujuan untuk: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai, tentram dan bersatu, dengan sasaran : Terwujudnya Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Kegiatan yang berkontribusi dalam mewujudkan misi ini adalah :1). Koordinasi Kegiatan Orang – orang Asing,LSM Asing,(NGO), dan lembaga Asing di Daerah,2) Penanganan gangguan Keamanan

Pada tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sebanyak 2 sasaran. Kedua sasaran telah mampu dilaksanakan dengan analisis dan evaluasi.

Untuk mengantisifasi ancaman instabilitas daerah kedepannya diperlukan pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah perlu didukung dengan kebijakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Disamping itu juga perlu mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi verttikal sebagai jaringan intelijen utamanya kepada pihak intelkam.

Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang heterogen, baik dilihat dari segi agama,budaya, suku, maupun etnis. Tingkat heterogenitas yang cukup tinggi ditambah lagi dengan sejarah panjang politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sedikit keras memiliki dengan warna kekerasan, hal ini terjadinya beberapa sengketa lahan perkebunan dan telah menumbuhkan ancaman instabilitas. Di daerah tertentu, Karena itu dilakukan berbagai macam upaya untuk dapat mengatasinya.

Bahwa tingkat capaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bebas dari ancaman instabilitas relatif aman dan terkendali. Ini dibuktikan dengan tingkat capaian 100 % kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan ancaman instabilitas daerah dengan melakukan penyerapan informasi, penghimpun, merumuskan dan penyaluran kepada pemimpin sebagai bahan untuk megambil suatu kebijakan yang tepat. Pada tingkat pimpinan dibentuk Dewan Pembina Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) yang tugas dan fungsinya membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah dan mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai jaringan intelijen.

Dalam Kominda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas yaitu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Seperti diketahui adanya kunjungan orang asing yang datang ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik hanya melewati Kota Kuala Tungkal menuju Kota Jambi dan kota lainnya maupun sebagai Touris, bahkan ada sebagai pekerja dan menetap hal ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan pariwisata daerah, namun perlu juga diingat bahwa tidak semua orang asing yang datang tersebut membawa dampak positif. Untuk itu kegiatan pemantauan tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang yang berlaku.

Untuk mewujudkan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis, terbuka dengan mengutamakan azas musyawarah mufakat ditetapkan indikator berupa adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik serta mengingkatkan kesadaran politik masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan sasara ini adalah dengan melakukan berbagai kegiatan dengan target dan tingkat capaiannya.

Bahwa pencapaian target dan capaiannya cukup baik/berhasil. Kegiatan pertama s/d kedua tingkat capaiannya sebesar 100%. Pencapaian penetapan target tersebut disebabkan oleh dukungan dana yang memadai dan SDM serta peserta dan elemen masyarakat yang bersedia berpartisifasi pada kegiatan tersebut.

Capaian Kinerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan RPJMD 2016-2021 pada kegiatan tahun Anggaran 2018

Misi IV :MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya;
Tujuan 3: Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Sasaran Strategis 1: Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Utama

Tabel Target, Realisasi Kinerja dan Capaian

Tabel 7

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2017

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2021
		2015	2016	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Deteksi Dini penanganan konflik kurang dari 24 jam	43 Kasus	2 Kasus	50 Kasus	25 Kasus	50 %	100 %

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2018

(Berdasarkan Perubahan Renstra 2016-2021)

Tabel 8

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2018

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD 2021
		2016	2017	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Deteksi Dini penanganan konflik kurang dari 24 jam	2 Kasus	25 Kasus	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %

Aanalisis Tabel :

Analisis Realisasi Tahun 2018 dan pengukuran kinerja, pada tahun 2018 jumlah Dokumen laporan yang terealisasi adalah sebanyak 4 Dokumen dari target sebanyak 4 Dokumen sehingganya diperoleh prosentase keberhasilan sebesar 4/4 X 100 % 100 %,

Analisis perbandingan dengan Tahun lalu 2017 dan 2018, pada tahun 2017 jumlah kasus yang terdeteksi dan dilaporkan adalah sebanyak 43 Kasus dan pada tahun 2018 adalah sebesar 2 kasus sehingga terjadi penurunan kejadian, hal ini disebabkan terjadinya kesadaran masyarakat dan berhasilnya FKDM dalam mensosialisasikan dan memberikan motivasi untuk melakukan temu lapor dan tindak lanjut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan mayarakat itu sendiri,

Analisis perbandingan dengan target RPJMD Anggara 2018, pada tahun 2018 tersedia laporan sebanyak 4 Dokumen dari target yang direncanakan sebanyak 4 dokumen.

Misi IV :MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya;

Sasaran Strategis 1: Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Utama

Tabel Target, Realisasi Kinerja dan Capaian

Tabel 9

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2017

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2021
		2015	2016	Target	Realisasi	% Capaian	
2	Indeks kerukunan Ummat Beragama	74,77	99,97	100	99,07 %	99,07 %	85 %

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2018
(Berdasarkan Perubahan Renstra 2016-2021)

Tabel 10
Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2018

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD 2021
		2016	2017	Target	Realisasi	% Capaian	
2	Indeks kerukunan Ummat Beragama	99,07	100	92%	100 %	100 %	85 %

Aanalisis Tabel :

Analisis Realisasi Tahun 2016 dan pengukuran kinerja, pada tahun 2016 angka indeks kerukunan Umat beragama mencapai 99,07 % hal ini berdasarkan laporan dan pengamatan dari berbagai pemuka agama yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kerukunan Ummat Beragama di setiap wilayah Kecamatan. Capaian Nilai Indeks Kerukunan Ummat Beragama (KUB) tahun 2017 adalah 100 % melampauai target yang ditentukan dalam RPJM 2016 -2021 sebesar 92% sehingganya nilai target akhir RPJMD 2011-2016 adalah 95 %

Analisis perbandingan dengan Tahun lalu 2016 dan 2017: Pada tahun 2016 Persentase Indeks Kerukunan Ummat beragama sebesasr 99,07 % dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 100 % ada kenaikan sebesar 0,3 % dan tahun 2018 nilai capaian tetap 100% dari target RPJMD sebesar 92 %

Hal ini disebabkan bekerjanya dengan baik FKUB Kabupataen yang dapat memberikan masukan masukan atau nilai nilai positif pada masyarakat antar pemeluk agama, sehingga di kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak pernah terjadi suatu kejadian yang bersinggungan dengan SARA .

Misi IV :MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya;
Tujuan 3: Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Sasaran Strategis 1: Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya

Evaluasi Capaian Kinerja Utama

Tabel Target, Realisasi Kinerja dan Capaian

Tebel11

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2017

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2021
		2016	2016	Target	Realisasi	% Capaian	
3	Persentase perempuan di lembaga DPRD	14,28%	14,28 %	20%	14,28 %	14,28 %	20 %

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2018
(Berdasarkan Perubahan Renstra 2016-2021)

Tabel 12

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2018

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD 2021
		2016	2017	Target	Realisasi	% Capaian	
3	Persentase perempuan di lembaga DPRD	14,28%	14,28 %	20%	14,28 %	14,28 %	20 %

Aanalisis Tabel :

Analisis Realisasi Tahun 2018 dan pengukuran kinerja, pada tahun 2018 keberaadaan perempuan yang menjadi anggota legislative di DPRD adalah sebanyak 5 Orang atau sebesar 14,28 % dari dari 35 orang anggota legislatif sementara undang undang mengharuskan 30% kaum

perempuan dari total Anggota DPRD. Hal ini belum maksimalnya pendidikan politik yang dapat memotivasi kaum perempuan untuk ikut berpartisifasi dalam Pemilu Legislatif.

Analisis perbandingan dengan Tahun lalu 2016 dan 2017, pada tahun 2016 jumlah perempuan dalam anggota DPRD Tanjung Jabung Barat sebanyak 5 Orang begitu juga pada tahun 2017, tidak ada perubahan.

Analisis perbandingan dengan target RPJMD Anggara 2017, Perbandingan target RPJMD tahun 2017 dimana pada target RPJMD 2017 adalah sebesar 20 % kaum perempuan dapat mewakili rakyat di DPRD. Sementara yang ada adalah sebesar 14,28 % sehingga target RPJMD 2017 kurang dari 20 % atau sebesar 5 %.

Persentase Keg. = 5/35 X 100 % 14,28

Misi IV :MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya;
Tujuan 3: Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Sasaran Strategis 1: Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Utama

Tabel Target, Realisasi Kinerja dan Capaian

Tabel 13

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2017

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2021
		2015	2016	Target	Realisasi	% Capaian	

4	Persentase pendidikan politik Masyarakat	97,16	99,18	86%	99,63 %	115,84%	95 %

Tabel 14

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2018

(Berdasarkan Perubahan Renstra 2016-2021)

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD 2021
		2016	2017	Target	Realisasi	% Capaian	
4	Persentase pendidikan politik Masyarakat	115,84 %	100	93%	100%	107%	95 %

Aanalisis Tabel :

Analisis Realisasi Tahun 2018 dan pengukuran kinerja:

Keberhasilan kegitan/pendidikan Politik masyarakat tahun 2018 adalah 107 % sedangkan target sebesar 93 % sehingga nilai keberhasilan capaian kinerjanya mencapai 115,05% atau

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\,\% = \frac{100}{93} \times 100\,\% = 115{,}05\%$$

Analisis perbandingan dengan Tahun lalu 2016 dan 2017: pada tahun 2016 realisasi kegiatan sebesar 115,84 dan tahun 2017 sebesar 100 sehingga pada tahun 2018 ada penurunan sebesar 8,84% dari tahun 2016

Analisis perbandingan dengan target RPJMD Anggara 2016: perbandingan RPJMD 2016 dimana target yang di tetapkan adalah sebesar 93 % sementara realisasi tahun 2018 adalah 115,05% atau ada penurunan sebesar 0,079%

Misi IV :MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya;
Tujuan 3: Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Sasaran Strategis 1: Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Utama

Tabel Target, Realisasi Kinerja dan Capaian

Tabel 15

Tabel Target, realisasi kinerja dan capaian Tahun 2017

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2021
		2015	2016	Target	Realisasi	% Capaian	
5	Jumlah demo	13 Kali	7 Kali	7 Kali	6 Kali	116,6	2 Kasus

Tabel 16

Tabel Target Realisasi kinerja 2018

(Berdasarkan Perubahan Renstra 2016-2021)

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD 2021
		2016	2017	Target	Realisasi	% Capaian	
5	Jumlah demo	16 Kali	5 Kali	5 Kali	4 Kali	200	2 Kasus

Aanalisis Tabel :

Analisis Realisasi Tahun 2018 dan pengukuran kinerja;

Pada tahun 2018 terjadi 4 kali kasus /Demo dari target paling banyak 5 kali kasus/Demo, artinya ada peningkatan penurunan kasus/demo 4 kasus dari 5 kasus/Demo yang ditargetkan dengan capaiian kinerja sebesar 200% dengan rumus : $\frac{\text{Target}}{\text{Kejadia}} \times 100\% = \frac{2}{4} \times 100\% = 200\%$ dari rumus ini menyatakan bahwa semakin besar nila persentasenya dari angka 100 % maka nilai keberhasilan kinerjanya adalah lebih bagus

Analisis perbandingan dengan Tahun lalu 2016 dan 2017, pada tahun 2016 terjadi 6 kali kasus/demo dan tahun 2017 terjadi 5 kasus/demo artinya dari tahun 2016 ke tahun 2017 ada penurunan kasus sebesar 11 kasus atau 31,25 %

Analisis perbandingan dengan target RPJMD Anggara 2016:

Analisis perbandingan dengan target RPJMD Anggaran 2018, Perbandingan target RPJMD tahun 2018 dimana pada target RPJMD 2018 adalah sebesar 5 kasus. Sementara kasus demo yang terjadi adalah sebanyak 4 kasus

Persentase Keg. = $\frac{\text{Target}}{\text{Kejadia}}$ x 100 %= $\frac{4}{5}$ x100 % = 80 %

C. Aspek Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta Perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan struktur belanja dikelompokkan menjadi :

1. Belanja tidak langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

2. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yangdianggarkan terkait langsung dengan pelaksnaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta program prioritas pembangunan.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018, didukung dengan sejumlah anggaran pada APBD murni yaitu sebesar Rp.4.724.749.446 dengan pembagian belanja sebagai berikut:

1). Belanja Tidak langsung (Belanja Pegawai (PNS)) sebesar Rp. 2.639.712.400, atau 55,86 %.
2). Belanja Langsung sebesar Rp. 2.085.037.046,atau sebesar 44,13%. Belanja Langsung ini terdiri dari : Belanja Pegawai pada Belanja Langsung sebesar Rp. 937.775.000,- atau sebesar 44,97%. Dari belanja langsung.Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.076.262.046,- atau sebesar 51,61%.dari total belanja langsung

Namun setelah melalui APBD-Perubahan menjadi sebesar Rp.4.998.225.663,- berkurang sebesar Rp.273.476.217,-atau bertambah sebesar (5,79%) dari APBD murni,dengan pembagian belanja sebagai berikut:

1). Belanja Tidak langsung (Belanja Pegawai (PNS)) sebesar Rp. 2.510.787.100,- berkurang sebesar Rp.128.925.300 atau 4,88% sehingga persentase belanja tidak langsung menjadi 50,23%

2).Belanja Langsung sebesar Rp.2.487.438.563- atau sebesar 49,76%. Berkurang sebesar Rp. 402.401.517 atau 16,17 %. Belanja Langsung ini terdiri dari : Belanja Pegawai pada Belanja Langsung sebesar Rp. 1.009.150.000,dari 937.775.000 terdapat perubahan kenaikan sebesar 71.375.000 atau 7,61% ,Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.283.173.563 dari 1.076.262.046 ,- bertambah menjaadi Rp. 206.911.517 atau sebesar 19,23 %.

Reliasasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.803.091.696 ,- atau 96,10% dari total anggaran

belanja sebesar Rp. 4.998.225.663. dengan rincian Realisasi belanja sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tidak Lngsung sebesar Rp. 2.434.303.089 dari anggaran tersedia sebesar Rp. 2.510.787.100 atau sebesar 96,95% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 76.484.011

Realisasi Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 2.368.788.607 dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 2.487.438.563 atau sebesar 95,23% dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 118.649.956,

Tabel 17
Pagu Belanja Tidak Langsung
Sebelum dan Sesudah APBD-P
Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran Sebelum APBD-P	Anggaran Setelah APBD-P	Bertambah (Berkurang)	% +(-)
1	Gaji Pokok PNS	1.589.125.600	1.472.801.700	(116.323.900)	(7,32)
2	Tunjangan Keluarga	165.517.800	167.445.400	1.927.600	1,16
3	Tunjangan Jabatan	147.708.000	158.390.000	10.682.000	7,23
4	Tunjangan Fungsional Umum	49.400.000	46.935.000	(2.465.000)	(4,99)
5	Tunjangan Beras	122.945.000	99.126.000	(13.819.000)	(12,24)
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.200.000	1.405.000		(70,00)
7	Pembulatan Gaji	416.000	439.000	23.000	(5,53)
8	Iuran Pemeliharaan Jaminan Kesehatan	53.400.000	57.700.000	4.300.000	8,05
8	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	516.000.000	506.550.000	9.450.000	(1,83)
	Jumlah	2.639.712.400	2.510.787.100	(128.925.300	(4,88)

Tabel 18
Pagu Belanja Langsung
Sebelum dan Sesudah APBD-P
Tahun 2018

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		Bertambah/ (Berkuran)	%
		Sebelum APBD_P JUMLAH (Rp)	Sesudah APBD-P JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**686.847.666**	**786.847.666**	**100.000.000**	**14,56%**
1.	Penyediaan Surat menyurat	2.250.000	2.250.000	-	-
2.	Penyediaan jasa komonikasi,sumberdaya air dan listrik	77.500.000	77.500.000	-	-
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.500.000	70.500.000	-	-
4.	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	10.695.601	10.695.601	-	-
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.776.700	48.776.700	-	-
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.872.000	32.072.000	(800.000)	(2.43%)
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangllan Bangunan Kantor	28.327.950	28.327.950	-	-
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang undangan	4.200.000	4.200.000	-	-
9.	Penyediaan makan dan minum	4.200.000	4.200.000	-	-
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	477.230.000	577.230.000	100.000.000	20,95%
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**206.800.000**	**334.540.000**	**127.740.000**	**61,77**
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua		20.000.000	20.000.000	-
12.	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	73.000.000	180.740.000	107.740.000	147,59%
13.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	116.000.000	116.000.000	-	-
14.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung/ kantor	6.300.000	6.300.000	-	-
3.	**Program Peningkatan**	**15.750.000**	**15.750.000**	**-**	**-**

	Kapasitas Sumber daya Aparatur				
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	15.750.000	15.750.000	-	-
4.	**Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan**	**60.012.500**	**97.835,000**	**37.822.500**	**63,02%**
16.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	24.737.500	40.337.500	15.600.000	63,06%
17	Penyusunan LKPJ dan LPPD	16.165.000	27.087.500	10.922.500	67,57%
18	Penyusuynan Laporan Aset(BMD) Kesbangpol	19.110.000	30.410.000	11.300.000	59,13%
5.	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**59.600.000**	**59.600.000**	**-**	**-**
19.	Koordinasi kegiatan orang asing LSM(NGO) dan lembaga Asing di Daerah	64.790.000	58.955.000	(5.835.000)	(9,01%)
20.	Penanganan Konflik Sosial	6.975.000	6.975.000	-	-
6.	**Program Pengembangan wawasan kebangsaan**	**309.598.690**	**334.158.690**	**24.560.000**	**7,93%**
21.	Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	107.878.690	107.878.690	-	-
22.	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	135.450.000	160.010.000	24.560.000	18,13%
	Bintek Bela Negara	32.945.000	32.945.000	-	-
23.	Forum Diskusi Penguatan Nilai Nilai sejarah kebangsaan	33.325.000	33.325.000	-	-
7.	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**	**287.096.400**	**343.956.400**	**56.860.000**	**19,81%**
24.	Komunitas Intelelijen Daerah Kominda	81.975.000	81.975.000	-	-
25.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakatm (FKDM)	77.925.000	77.925.000	-	-
26.	Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba	41.281.400	98.141.400	56.860.000	137,74%
27.	Fasilitasi Pembentukan BNN.Kabupaten Tanjung Jabung Barat	85.915.000	85.915.000	-	-
8.	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**459.331.790**	**514.750.807**	**55.419.017**	**12,07%**
	Tim Penilai dan Pemeriksa	51.939.170	75.866.707	23.927.537	46,07%

28.	Administrasi Keuangan Parpol				
29.	Pembinaan Organisasi kemasyarakatan dan LSM	56.475.000	56.475.000	-	-
30.	Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat	30.173.240	61.664.720	31.491.480	104,37%
31.	Pemantauan PerkembanganPolitik Daerah	76.911.000	76.911.000	-	-
32.	Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan	155.828.380	155.828.380	-	-
33.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu	88.005.000	88.005.000	-	-
	Jumlah	**2.085.037.046**	**2.487.438.563**	**402.401.517**	**19,30 %**

Tabel 19.
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Setelah APBD-P Tahun 2018

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji Pokok PNS	2.510.787.100	2.434.303.089	96,95
2	Tunjangan Keluarga	167.445.400	157.324.495	93,95
3	Tunjangan Jabatan	158.390.000	154.210.000	97,36
4	Tunjangan Fungsional Umum	46.935.000	45.070.000	96,02
5	Tunjangan Beras	99.126.000	91.828.560	92,63
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.400.000	1.260.841	90,06
7	Pembulatan Gaji	. 439.000	22.835	5,20
	Iuran Jaminan Kesehatan	57.700.000	55.007.008	95,33
8	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	506.550.000	500.131.050	98,73
	Jumlah	2.711.494.400	2.272.891.406	83,82

Belanja langsung pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 sebesar Rp. 1.283.357.848 yang terdiri dari sebelas (8) program dan dua puluh tujuh (33) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20

PROPORSI ANGGARAN
PER KEGIATAN TAHUN 2018

No	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI		
		JUMLAH	PROPORSI %	KEUANGAN		FISIK
				JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Pelayanan Aadministrasi Perkantoran**	**786.847.666**	**31.63%**	**769.577.265**	**97,88**	**98,96**
1.1.	Penyediaan Surat menyurat	2.250.000	0.09%	2.250.000	100	100
1.2.	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	77.500.000	3.12%	60.307.234	77,82	89,58
1.3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.500.000	2.83%	77.500.000	100	100
1.4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.695.601	0.43%	10.695.601	100	100
1.5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.327.950	1.14%	28.327.950	100	100
1.6.	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	9.222.000	0.37%	9.222.000	100	100
1.7.	Penyediaan Komponen Listrik Instalaasi/penerangan bangunan Kantor	2.722.115	0.11%	2.722.115	100	100
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	4.200.000	0.17%	4.200.000	100	100
1.9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.200.000	0.17%	4.200.000	100	100
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	577.230.000	23.21%	577.152.365	99,99	100
2	**Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur**	**334.540.000**	**13.45%**	**303.630.325**	**90.76%**	**78,47**
2.1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	20.000.000	0.80%	20.000.000	0	0
2.2.	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	11.000.000	0.44%	10.920.000	99.27	100
2.3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	180.740.000	7.27%	180.466.000	99,85	100
2.4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	116.000.000	4.68%	105.964.325	90,96	92,35
2.5	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	6.300.000	0.25%	6.300.000	99.68	100

3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**15.750.000**	**0.63%**	**15.750.000**	**100**	**100**
3.1.	Pengadaan Pakaian DInasbeserta perlengkapannya	15.750.000	0.63%	15.750.000	100	100
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**	**97.835,000**	**3.93%**	**97.835,000**	**100**	**100**
4.1.	Monitoring,Evaluai dan Pelaporan	40.337.500	1.62%	40.337.500	100	100
4.2.	Penyusunan LKPJ dan LPPD. Badan Kesbangpol	27.087.500	1.09%	27.087.500	100	100
4.3.	Penyusunan Aset (BMD) OPD Kesbangpol	30.410.000	1.22%	30.410.000	100	100
5	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**59.600.000**	**2.40%**	**58.225.000**	**97,69**	**100**
5.1.	Koordinasi Kegiatan orang Asing,LSM, Asing(NGO) dan lembaga asing di Daerah	52.625.000	2.12%	51.250.000	97,39	100
5.2.	Penanganan Konflik Sosial	6.975.000	0.28%	6.975.000	100	100
6.	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**	**343.956.400**	**13.83%**	**280.196.100**	**81.46%**	**82,78**
6.1	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	77.925.000	3.13%	76.525.000	98,20	100
6.2.	Komonitas Intelijen Daerah (Kominda)	81.975.000	3.30%	80.225.000	97,87	100
6.3	Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba	98.141.400	3.95%	94.391.400	96.18	100
6.4	Fasilitasi Pembentukan BNN.Kabupaten Tanjung Jabung Barat	85.915.000	3.45%	29.055.000	33,82	31.11
7.	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**334.158.690**	**13.43%**	**333.109.930**	**99.69%**	**100**
7.1.	Bintek Bela Negara	32.945.000	1.32%	32.896.240	99.85	100
7.2.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	107.878.690	4.34%	107.878.690	100	100
7.3	Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	.33.325.000	1.34%	33.325000	100	100
7.4.	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	160.010.000	6.43%	159.010.000	99,38	100
8.	**Program Pendidikan**	**514.750.807**	**20.69%**	**510.464.687**	**99,17**	**100**

	Masyarakt					
8.1.	Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat	61.664.720	2.48%	59.514.720	96,51	100
8.2.	Pemantauan PerkembanganPolitik Daerah	76.911.000	3.09%	76.016.000	98.84	100
8.3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Parpol	75.866.707	3.05%	74.966.707	98.81	100
8.4.	Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan	155.828.380	6.26%	155.667.260	99.90	100
8.5.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu	88.005.000	3.54%	87.825.000	99.80	100
8.6.	Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	56.475.000	2.27%	56.475.000	100	100
Jumlah 2018		**2,487,438,563**	**100 %**	**2.368.788.607**	**95,23**	**94,66**
Jumlah 2017		**1.487.633.863**		**1.422.731.394**	**95,64**	**95,20**

Grafik 1
PAGU APBD MURNI 2018

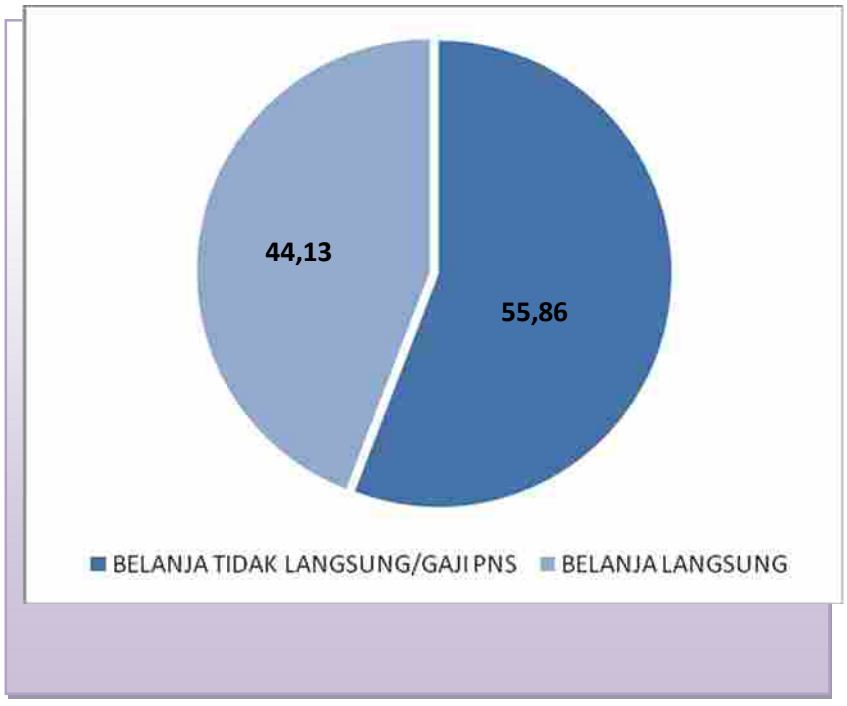

Grafik 2
PAGU APBD PERUBAHAN

Grafik 3
Porsi Anggaran Sekretariat
Kesbangpol